



T: 0744

PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA

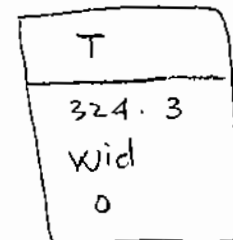


**ORIENTASI PEMBERITAAN MEDIA MASSA NASIONAL DALAM --
ISU PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN POLITIK --**

**(Suatu studi Deskriptif dengan Teknik Analisis Isi Pesan tentang Perempuan --
sebagai Pemimpin Politik pada Harian Umum Kompas dan --
Rakyat Merdeka selama kurun waktu Juni s/d Nopember 1999) --**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Sains
Dalam bidang Ilmu Komunikasi**



**Oleh :
T. Titi Widaningsih
8398140143**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
KEKHUSUSAN MANAJEMEN KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
2000**

Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial Politik
Program Pascasarjana
Program Studi Ilmu Komunikasi
Kekhususan Manajemen Komunikasi

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

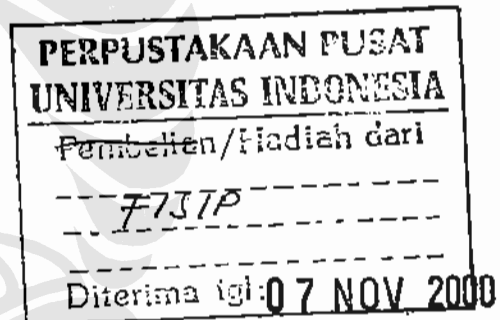
Judul : **Orientasi Pemberitaan Media Massa**
Nasional Dalam Isu Perempuan sebagai
Pemimpin Politik

Penyusun : **T. Titi Widaningsih**

NPM : **8398140143**

Program Studi : **Ilmu Komunikasi**

Kekhususan : **Manajemen Komunikasi**



04769

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Harsono Suwardi, M.A

Pembimbing Tesis,

Victor Menayang, Ph.D.

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA**

**ORIENTASI PEMBERITAAN MEDIA MASSA NASIONAL
DALAM ISU PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN POLITIK**

**(Suatu Studi Diskriptif dengan Teknik Analisis Isi Pesan tentang Perempuan
sebagai Pemimpin Politik pada Harian Umum Kompas dan
Rakyat Merdeka Selama Kurun Waktu Juni s/d Npember 1999)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains
dalam Bidang Ilmu Komunikasi**

Oleh

**Nama : T. Titi Widaningsih
NPM : 8398140143
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Kekhususan : Manajemen Komunikasi**

JAKARTA

2000

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : T. Titi Widaningsih
NPM : 8398140143
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Kekhususan : Manajemen Komunikasi
Judul : Orientasi Pemberitaan Media Massa
Nasional Dalam Isu Perempuan
sebagai Pemimpin Politik

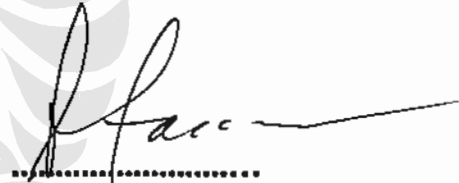
Telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Komunikasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Indonesia pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Agustus 2000
Waktu : 15.00 -16.00

dan dinyatakan **LULUS**

1. Ketua Sidang

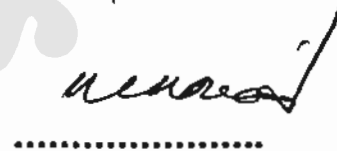
Prof. Dr. Harsono Suwardi, M.A



.....

2. Sekretaris Sidang

Drs. M. Riduansyah, M.Si.



.....

3. Dosen Pembimbing

Victor Menayang, Ph.D.



.....

4. Penguji Ahli

Eduard Lukman MA.



.....

UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
KEKHUSUSAN MANAJEMEN KOMUNIKASI

ABSTRAK

T. TITI WIDANINGSIH

8398140143

ORIENTASI PEMBERITAAN MEDIA MASSA NASIONAL
DALAM ISU PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN POLITIK

Xiii + 108 halaman + 17 Tabel + 7 lampiran

Isu gender pertama kali menjadi isu penting di Indonesia, menjelang Pemilu dan Sidang Umum MPR tahun 1999. Isu ini terutama dimunculkan oleh Partai Politik dengan menggunakan terutama alasan agama yang memojokkan perempuan.

Studi ini memusatkan perhatian pada pemberitaan mengenai isu kepemimpinan politik perempuan. Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik produk terutama dilihat dari frekwensi pemuatan, sebaran berita, obyektifitas/keberpihakan yaitu mendukung, netral dan menentang, serta proses memproduksi berita.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study). Pertimbangannya karena obyek yang diteliti adalah lebih satu media. Media yang dipilih adalah *Kompas* dan *Rakyat Merdeka*, dengan pertimbangan *Kompas* adalah harian umum yang bersifat netral sementara harian umum *Rakyat Merdeka* adalah harian yang menempatkan diri sebagai oposisi.

Obyek penelitian pada tingkat teks unit analisisnya adalah berita. Yaitu semua berita yang dimuat pada dua harian umum tersebut selama enam bulan yaitu dari bulan Juni sampai dengan November 1999. Pada tingkat organisasi adalah redaksi *Kompas* dan *Rakyat Merdeka*. Pengumpulan data pada tingkat teks dilakukan dengan analisis

isi, pada kebijakan redaksional dilakukan melalui interview dengan redaktur di dua media massa tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa isu kepemimpinan politik perempuan tidak mendapat porsi yang cukup bagus di dua media massa tersebut. Orientasi informasi banyak bersifat netral/informatif, berarti pola pemihakan isi pesan cenderung mengambil jalan tengah.

Sumber berita cukup bervariasi terutama Kompas, tetapi aktivis LSM/Ormas lebih banyak mengambil peran. Sumber berita tersebut juga lebih banyak didominasi laki-laki. Ini menunjukkan perempuan belum mengambil peran yang banyak di media massa. Padahal sumber berita dan jenis kelamin sumber mempengaruhi keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan.

Proses produksi berita di kedua media tersebut hampir sama. Namun hasilnya relatif berbeda. Karena Rakyat Merdeka lebih menonjolkan aspek menarik dari judul. Hal ini terkait dengan strategi pemasaran dimana 80 persen pembaca harian Rakyat Merdeka adalah eceran. Sementara Kompas lebih mengutamakan obyektivitas dan kelengkapan berita karena pembaca Kompas 90% adalah pelanggan.

Kedua media tersebut tidak sensitif gender tetapi lebih menekankan segi keuntungan/ekonomi. Hal ini dikarenakan media massa masih merupakan dunia patriaki karena yang berkecimpung didalamnya lebih didominasi laki-laki. Ini terlihat dari jumlah jurnalis perempuan kedua media tersebut tidak mencapai 20% dari seluruh jumlah jurnalis yang ada. Dari keseluruhan jumlah pimpinan redaksi, jumlah perempuan yang duduk dalam pimpinan redaksi kurang dari 15%.

UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
KEKHUSUSAN MANAJEMEN KOMUNIKASI

ABSTRACT

T. TITI WIDANINGSIH
8398140143
ORIENTATION OF NATIONAL MASS MEDIA
ON WOMEN LEADERSHIP ISSUES IN POLITICAL FIELD.

Gender became an important issue in Indonesia while facing the General Election and General Assembly of Parliament in 1999. This issue was raised prominently by political parties which using mostly religion as a reason to put women in the corner.

This study focused on report about women leadership in political field. The main problem in this research was how are product characteristics, prominently seen by frequency of reporting, news spreading, objectivity of supporting, netral and opposing , and the process of news productions.

This research used case study as a method. The reason was because the objects to be researched were more than one media. The choosed media were *Kompas* and *Rakyat Merdeka*, considering that *Kompas* was a netral general daily, while *Rakyat Merdeka* was general daily that daimed an oppositie-side.

Research object on text level was news as unit of analysis. It meant that all news that was loaded on those dailies for six (6) months. Started from June until November

1999. On the organizational level was editorialship in *Kompas* and *Rakyat Merdeka*. Data collecting on text level was collected by content analysis, on editorial policy was collected by interviews conducted with the editorial directory in both media.

Research concluded that women leadership issue on political field had no good portion in both media. Orientation of information was netral/informatif meaning that side pattern of content tended to be netral.

News source was various, mostly in *Kompas*, but NGO's activist took more part. This news source was dominated by men. This point out that womwn had not taken more part ini mass media. Whereas in fact news source and source gender influencing side position of women leadership in political field.

Process of news production in both media almost the same, but the result relatively different. *Rakyat Merdeka* focused mostly on interesting aspect of heading. This related with marketing strategy which 80% of *Rakyat Merdeka*'s reader was retail, while *Kompas* focused on objectivity and news completeness because *Kompas*'s reader 90% were subscriber

Both media had no sensitivity of gender but focused more on profit/economic. This was caused of mass media as paathriaarcy word and dominated mostly by men. It can be seen from number of women journalist on both media that did not reachead 20% from total number of journaliest. Number of women that have position editorial staffs was less than 15%.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan, karena berkat rahmat dan karunianya disertai usaha yang sungguh-sungguh, serta melalui perjalanan yang panjang, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Orientasi Pemberitaan Media Massa Nasional Dalam Isu Perempuan sebagai Pemimpin Politik”

Penelitian bidang ilmu komunikasi tentang kepemimpinan politik perempuan belum banyak dilakukan oleh akademisi di Indonesia. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penelitian tesis ini yaitu “Orientasi Pemberitaan Mengenai Kepemimpinan Politik Perempuan pada media massa nasional” Penulisan tesis ini akan mencoba mendeskripsikan orientasi pemberitaan harian Kompas dan Harian Rakyat Merdeka dilihat dari karakteristik produk dan kebijakan redaksional.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu penulis secara khusus mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Victor Menayang, Ph.D, pembimbing tesis yang telah banyak memberikan masukan, wawasan dalam penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof.Dr. Harsono Suwardi, MA Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Kekhususan Manajemen Komunikasi. Bapak Dedy Nur Hidayat Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi

3. Bapak Prof.Dr. Martani Huseini atas perhatian dan dorongannya, beserta seluruh dosen. Juga seluruh staf administrasi yang secara tulus memberikan pelayanan administrasi secara baik.
4. Bapak. Eduard Lukman, MA. Sebagai penguji ahli dan Bapak Riduansyah, Msi. Selaku sekretaris sidang.
5. Bapak Taufik H. Miharja Wakil Redaktur Pelaksana *Kompas*, Bapak Budiman Tanureja Kepala desk nasional serta Ibu Endang dari bagian pengembangan sumber daya manusia *Kompas* atas bantuan data dan kesediaan untuk wawancara.
6. Bapak Zaenuddin HM Redaktur Pelaksana Rakyat Merdeka, Ibu Ratna Susilawati dan Bapak Nurhilal sebagai koordinator peliputan, Bapak Endang bagian dokumentasi dari harian umum *Rakyat Merdeka* atas bantuan data dan kesediaan waktu untuk memberikan informasi dan wawancara
7. Rekan-rekan kelas B angkatan V, Dorin, Yusti, Ninik khususnya Muntaha yang telah banyak memberi dorongan dan kiriman buku. Rekan kerja dan sahabat; Loina, Yuli, Imas dan Sambas.
8. Titi P, Sunarko, Dwi W, Titi H, Victor H, Jauhari , Ida dan Dharma Oratmangun selaku kakak, Bambang, Heru, Irene dan Nanang selaku adik yang banyak memberikan perhatian.

Kepada mereka semua penulis mengucapkan terima kasih yang tulus, disertai doa semoga kebaikan yang mereka berikan mendapat balasan dari Tuhan.

Tesis ini secara khusus penulis persembahkan kepada Rb.S. Pudjo Winarso dan V. Sri Sunarni selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan penulis, pendamping setia Irbayana Oratmangun, serta buah hati tercinta Gusti, Ayu, Bagas dan Bagus yang selalu mendukung dan mencurahkan perhatian buat penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, guna perbaikan selanjutnya segala masukan, kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga penelitian ini dapat menambah khasanah bagi pembaca.

Jakarta, Agustus 2000

Penulis.



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iv
Abstract	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
d. Signifikasi Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KERANGKA KONSEP	11
A. Karakteristik Produk	12

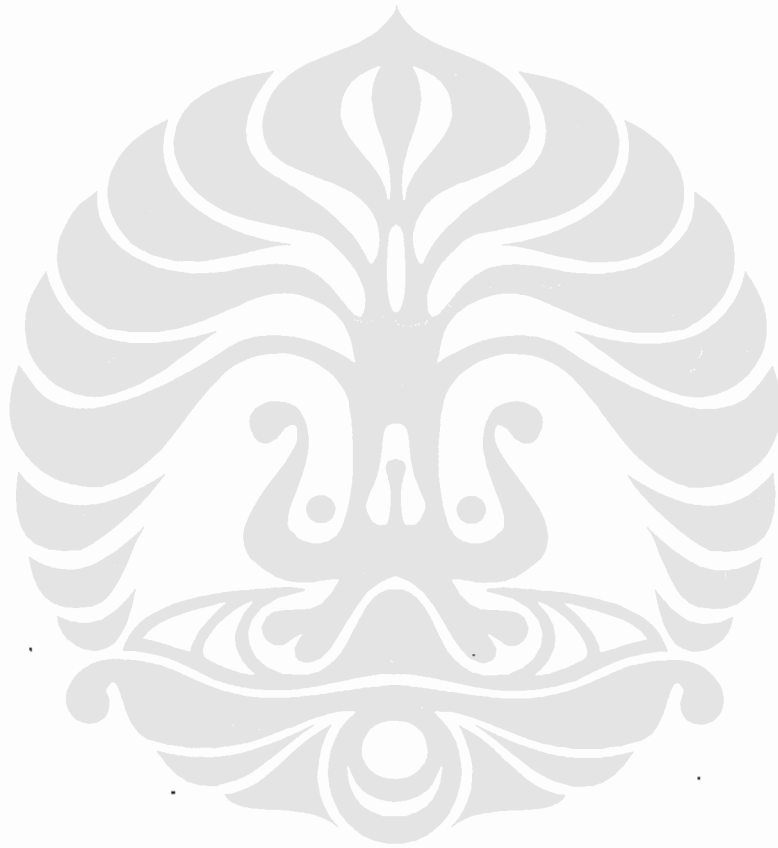
B. Orientasi Informasi	18
C. Perempuan dan Media	23
E. Perempuan dan Politik	26
F. Kebijakan Rdaksional	31
G. Sumber Informasi	33
H. Pansuan Wawancara	36
Bab III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian	38
B. Desain Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	40
D. Unit Analisis.....	41
E. Variable Penelitian	42
F. Metode Pengumpulan data	46
G. Metode Analisis Data	46
H. Validitas dan Reliabilitas Penejitian	47
I. Rancangan Analisis	49
J. Hipotesis penelitian	50
k. Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Karakteristik dan Kualitas Produk	52
B. Orientasi Informasi.....	55
C. Sumber Berita	64
D. Uji Variabel.....	69
E. Proses Produksi Berita	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	98
A. Diskusi	98
B. Kesimpulan	100
C. Implikasi Studi	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	150

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Sebaran Berita	54
2.	Keberpihakan	57
3.	Alasan Keberpihakan	60
4.	Alasan Ketidak Berpihakan	63
5.	Sumber Berita	66
6.	Jenis Kelamin Sumber	68
7.	Tabulasi Silang Sumber Berita dan Jenis Kelamin	69
8.	Tabulasi Silang Sumber Berita dan jenis Keberpihakan	70
9.	Tabulasi Silang Sumber Berita dan Alasan Keberpihakan	72
10.	Tabulasi Silang Sumber Berita dan Alasan Ketidak Berpihakan	73
11.	Tabulasi Silang Jenis Kelamin Sumber dan jenis Keberpihakan	75
12.	Tabulasi Silang Jenis Kelamin sumber dan alasan keberpihakan	76
13.	Tabulasi Silang Jenis Kelamin Sumber dan Alasan Ketidak Berpihakan	77
14.	Korelasi Pelaku Koding Untuk Sumber Berita <i>Kompas</i>	107
15.	Korelasi Pelaku Koding untuk Keberpihakan <i>Kompas</i>	108
16.	Korelasi Pelaku Koding untuk Alasan Keberpihakan <i>Kompas</i>	109

15.	Korelasi Pelaku Koding untuk Sumber Berita <i>Rakyat Merdeka</i>	110
16.	Korelasi Pelaku Koding untuk Keberpihakan <i>Rakyat Merdeka</i>	111
17.	Korelasi Pelaku Koding untuk Keberpihakan <i>Rakyat Merdeka</i>	112



DAFTAR LAMPIRAN

1. Judul Berita yang menjadi Obyek Penelitian	109
2. Hasil Observasi Pelaku Koding <i>Kompas</i>	112
3. Hasil Observasi Pelaku Koding <i>Rakyat Merdeka</i>	115
4. Coding book	118
5. Struktur Organisasi <i>Kompas</i>	135
6. Struktur Organisasi <i>Rakyat Merdeka</i>	136
7. Contoh Berita	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peluang bagi perempuan menjadi pemimpin semakin terbuka. Sudah terbukti pula, perempuan mampu menampilkan pola dan gaya kepemimpinan yang tersendiri dan khas. Keberhasilan dan kehebatan memimpin ternyata bukan hanya monopoli kaum pria.

Persepsi terhadap kepemimpinan kekuasaan dan kekuatan memang banyak berubah. Di masa lalu, kepemimpinan lebih menekankan kekuatan otot dan keperkasaan. Alam yang keras dan kecenderungan perang antar-suku dan antar-bangsa, menuntut pemimpin yang perkasa. Itulah antara lain mengapa pria dianggap lebih cocok menjadi pemimpin.

Akan tetapi di zaman modern, keperkasaan otot tidak lagi menjadi tuntutan utama. Pada zaman modern, penguasa diidealkan sebagai pemimpin yang mampu memajukan kesejahteraan umum, tidak diktator, serta mampu menciptakan pemerintahan yang bersih. Syarat-syarat semacam itu tidak jarang lebih bisa dipenuhi oleh perempuan pemimpin dibandingkan pria pemimpin.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat mencerminkan partisipasi perempuan dalam bidang politik. Jadi rasanya sangat mengesankan jika pada masa

Orde Baru hanya 8% perempuan yang menjadi anggota legislatif, itupun berasal dari KKN. Mereka adalah anggota keluarga para aktor politik. Padahal keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif serta institusi-institusi pengambil keputusan merupakan salah satu indikator dihormatinya hak asasi manusia, juga merupakan indikator kemajuan bangsa. Sementara perempuan yang berada di eselon satu, yang berarti berada pada posisi pengambilan keputusan sebanyak 5,2 % (Chusnul Mar'iyah dalam Pemimpin Perempuan Mengapa Tidak?, 199 : 44).

Masa Reformasi yang dimulai sejak jatuhnya Rezim Orde baru dan disusul oleh Pemilu tanggal 7 Juni 1999 yang lalu dianggap dapat memberikan angin segar pada pola kepemimpinan perempuan. Namun pada saat yang sama justru muncul isu gender terhadap kepemimpinan politik perempuan. Isu itu terutama dimunculkan oleh partai-partai politik, dengan menggunakan alasan agama/ kutipan dari ayat-ayat kitab Suci yang memojokkan perempuan.

Dalam proses sosialisasi angin perubahan ini media massa mengambil peran sebagai "pendidik" bangsa. Dalam pemberitaannya, pesan mengenai perempuan pemimpin dapat diberikan secara seimbang, tanpa keberpihakan. Tidak semua media massa menggunakan kesempatan ini untuk mendidik bangsa menerima perempuan sebagai pemimpin bangsa. Hal ini dapat terlihat dari gambaran perempuan di media massa selama ini yang masih memperlihatkan stereotip yang merugikan : perempuan pasif, tergantung pada pria, didominasi, menerima keputusan yang dibuat oleh pria, hal ini disebabkan karena :

1. realitas sosial dan budaya perempuan memang belum menggembirakan di dalam masyarakat, media merupakan cermin dan refleksi dari masyarakat secara umum.
2. Media massa pada dasarnya cenderung mengangkat hal-hal yang menarik dalam masyarakat.
3. Media massa biasanya menganggap hal-hal yang memilukan sebagai sesuatu yang menarik untuk diangkat.
4. Gambaran perempuan dalam media masih cenderung sebagai obyek karena yang mendominasi media : Pemilik, penulis, reporter, editor dan sebagainya masih didominasi oleh pria.

Media massa ikut memelihara dan mengukuhkan pertentangan mengenai peran politik perempuan. Dalam kisah-kisah berita (*news stories*), misalnya pengalaman wanita , kultur wanita, kehidupan wanita, olahraga wanita dan termasuk media wanita digeneralisasikan dan didefinisikan dalam perbandingan dengan norma dan dikonstruksikan secara sosial, yang digenderkan dan tentu saja dihadapkan dengan laki-laki. Media dalam hal ini telah ikut mempertahankan status quo kediktatoran dualisme antara wanita dan pria.

Pembedaan gender dalam media massa, menurut Wolf (1993) (Wolf dalam Subandy Idy, Suranto, Hanif 1998) akan menimbulkan dampak yaitu :

1. Mematikan perdebatan, sehingga membuat saluran politik perempuan tersumbat
2. Redaktur dimedia massa merasa tidak perlu meliput isu-isu yang akan mempengaruhi lebih dari separuh pembaca, Mediapun gagal memberi informasi

yang diperlukan oleh masyarakat. Redaktur gagal memenuhi tanggung jawab mereka.

3. Bias ini melecehkan gerakan perempuan, dan akibatnya mengasingkan perempuan pada umumnya dari wakil-wakil mereka di institusi-institusi demokrasi dalam masyarakat modern.
4. Isu-isu yang berpengaruh terhadap perempuan hampir tidak pernah menembus ruang publik untuk diangkat dalam dialog yang bebas, maka jadinya komentar-komentar umum yang bisa lolos ke gelanggang politik dihargai tinggi.

Karena itu melalui penelitian ini akan dianalisis harian Umum *Kompas* yang merupakan media massa cetak terbesar oplahnya di Indonesia dan yang dipandang cukup netral dalam pemberitaannya dan juga memiliki kredibilitas yang tinggi. *Kompas* juga merupakan media yang mengartikulasikan kepentingan pembaruan di Indonesia (Mallarangeng, 1992 : 37). *Kompas* merupakan harian yang menekankan pada produksi surat kabar yang menguntungkan sebagai komoditas karena bukan mengemban beban politik atau suara dari komunitas dan kelompok agama tertentu. Meskipun awalnya mengemban misi dari partai Katolik namun dalam perkembangannya *Kompas* menjadi nasionalis. *Kompas* sebagai sebuah koran yang berkualitas untuk pembaca kelas menengah dan menengah atas. (Hill , David T, 1995 : 36).

Selain *Kompas* akan dianalisis juga Harian Umum *Rakyat Merdeka* yang selama ini kita kenal sebagai koran oposisi hal ini dilihat dari judul yang cenderung sensasional, hal demikian dikarenakan karena posisi *Rakyat Merdeka* sebagai koran

oposisi. Sebagai oposisi maka *Rakyat Merdeka* bertugas pengkritik. Karena berfungsi sebagai pengkritik maka kritik tersebut harus dilakukan secara keras, kalau lembek tidak akan didengar (Journal MWCC, April 2000 : 33).

Rakyat Merdeka juga merupakan korang yang mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena PDIP dianggap partai oposisi/partai yang tertindas. Dukungan tersebut dapat dilihat dari ketika kasus 27 Juli 1998 diangkat lagi kepermukaan maka *Rakyat Merdeka* mengangkat berita tersebut paling banyak dibandingkan dengan harian lainnya seperti *Kompas*, *Media Indonesia*, *Suara Pembaharuan* dan *Republika*. (Journal MWCC, Mei 2000 : 33).

Dukungan *Rakyat Merdeka* tidak semata ditujukan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tapi dukungan tersebut juga ditujukan kepada kepemimpinan politik wanita khususnya kepada Megawati. Dukungan tersebut terlihat selama kongres PDIP bulan Maret di Semarang pemberitaan *Rakyat Merdeka* cenderung menyudutkan Dimiaty Hartono dan Eros Jarot. Sementara dukungan selalu diberikan kepada Megawati.

Masing-masing media massa akan diteliti berdasarkan pesan yang ditulis dalam edisi mereka. Pesan yang akan dianalisis adalah pesan yang menegaskan keberpihakan atau ketidak-berpihakan pada potensi dan keberadaan perempuan sebagai pemimpin dalam percaturan politik nasional sekarang ini.

Petimbangan memilih kasus untuk permasalahan penelitian ini antara lain adalah:

1. Memperoleh gambaran tentang kepemimpinan politik perempuan di media massa.

2. Mengetahui bagaimanakah kecenderungan berita yang ada di media massa tentang kepemimpinan politik perempuan.
3. Memperoleh pemahaman permasalahan secara lebih mendalam berupa proses produksi berita yang dilakukan oleh dua redaksi pers tersebut.

B. Rumusan Permasalahan

Isu kepemimpinan politik perempuan menjadi isu nasional di media massa terutama pada pemilu dan menjelang sidang umum MPR 1999 untuk menentukan kepemimpinan politik nasional. Suatu isu yang cukup mengejutkan karena isu tersebut justru muncul pada saat reformasi dimana kebebasan dan demokrasi digaungkan. Oleh karena itu melalui penelitian ini akan diteliti bagaimanakah orientasi informasi terhadap isu kepemimpinan politik perempuan di media massa nasional terutama dilihat dari :

1. Bagaimanakah Karakteristik produk/berita tentang perempuan sebagai pimpinan politik?
2. Bagaimanakah orientasi informasi tentang perempuan sebagai pimpinan politik ?
3. Bagaimanakah proses produksi berita, dilihat dari kebijakan redaksional ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui perbedaan karakteristik produk/berita tentang perempuan sebagai pemimpin politik dilihat dari sebaran berita, frekwensi pemuatan.

2. Mengetahui orientasi informasi kecenderungan berita, apakah mendukung, netral atau menentang
3. Mengetahui proses produksi berita dilihat dari kebijakan redaksional.

D. Signifikansi Penelitian

1. Akademis -Teoritis

Mengacu pada hasil Penelitian tentang perempuan di media massa (Thamrin Tomagola, 1990, Ashadi Siregar 1991), dimana dari hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya gambaran perempuan di media massa yang menunjukkan adanya stereotip yang merugikan perempuan. Penelitian ini ingin meneruskan penelitian sejenis dengan pendekatan yang berbeda. Yaitu sebagai kajian terhadap bias gender yang ada di media massa terutama dilihat dari orientasi informasi. Dari penelitian isu kepemimpinan politik perempuan dapat dilihat bagaimanakah keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan.

2. Praktis

Sebagai masukan bagi pengelola media terutama media yang diteliti dalam menetapkan kebijakan (Lanjutan) bidang redaksional.

E. Sistematika Penulisan

Secara umum sistematika penulisan yang dipakai dalam penulisan tesis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini, sesuai dengan judulnya pendahuluan, menjelaskan tentang gambaran umum rencana penelitian ini; meliuti latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian serta signifikansi penelitian baik teoritis-akademis maupun praktis.

BAB II : KERANGKA KONSEP

Kerangka konsep berisi uraian konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian, sesuai dengan bibliografi yang dikumpulkan oleh penulis. Uraian dimulai dengan kerangka analisis (*analytical framework*) yang dipilih yang meliputi teks dan kebijakan redaksional. Konsep pokok yang dibahas meliputi : karakteristik produk, orientasi informasi, Gender dalam perspektif politik, perempuan dan media, perempuan dan politik, kebijakan redaksional, sumber informasi.

BAB III : METODOLOGI

Bab ini menjelaskan tentang seluruh unsur metodologi yang dipakai dalam penelitian. Baik jenis penelitian, desain penelitian, unit analisis, variable penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, validitas dan reliabilitas penelitian alat ukur yang dipakai dalam penelitian, rancangan analisis untuk uji statistik serta kelemahan dan keterbatasan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan namanya, bab ini memaparkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan metodologi yang ditetapkan. Hasil penelitian kemudian dibahas dengan urutan logis sebagai berikut : (1) karakteristik produk meliputi jumlah produk dan sebaran berita. (2) orientasi informasi meliputi keberpihakan, alasan keberpihakan dan alasan keberpihakan. (3) sumber berita (4) uji variable (5) proses produksi berita

BAB V : DISKUSI, KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada bagian ini penulis memberikan interpretasi terhadap hasil-hasil data yang diperoleh (bab IV). Interpretasi dilakukan dengan mempergunakan kerangka analisis (*analytical framewark*) dan kerangka konsep (*conceptual framework*) yang ditetapkan pada bab kerangka konsep. Selanjutnya diajukan rekomendasi akademis maupun praktis untuk studi dan aplikasi hasil di masa yang akan datang.

BAB II

KERANGKA KONSEP

Isi media merupakan hasil dari pengaruh kuat media, isi media bersifat terbuka. Pada saat membaca sebuah surat kabar yang tampak adalah sajian berita dari media tersebut. Isi media yang terbuka membuat dapat dipelajari. Shoemaker dan Reese mengemukakan beberapa kegunaan mempelajari isi media :

1. Membantu menyimpulkan sesuatu mengenai fenomena baik yang tampak jelas maupun faktor-faktor yang ada dibelakang layar. Setiap media menampilkan isi dengan ciri khas yang berbeda satu sama lain.
2. Memprediksi pengaruh terhadap *audience*. Penelitian efek media pertama-tama akan menentukan pesan apa yang tersedia bagi audience dan dari pesan-pesan yang mana seharusnya mempunyai pengaruh terhadap *audience*.
3. Menilai realita apa yang media gunakan, dengan asumsi bahwa media menyajikan sebagian besar realitas yang ada diluar pengalaman pribadi seseorang. (Shoemaker dan Reese, 1966 : 45)

Isi media merupakan produk yang diciptakan secara sosial, bukan merupakan refleksi dari realitas obyektif. Isi media tidak selalu mencerminkan realitas terlihat bahwa media yang berbeda akan menghasilkan isi yang berbeda. Perbedaan ini dikarenakan adanya fungsi dari jaringan media.

Ada beberapa tingkatan yang mempengaruhi isi media yaitu :

1. *Individual Level*, pengaruh dari para pekerja media. Di sini diperlukan sikap dan konsepsi pekerja media untuk bekerja secara profesional yang sadar akan peranannya dengan meningkatkan tanggung jawab dan ketrampilannya.
2. *Media Routines Level*, pengaruh dari suasana kerja dan iklim kerja didalam media. Dalam level ini diperlukan suasana kerja dan iklim kerja didalam media mampu dijaga untuk mendukung konsep idealis media. Media berani menetapkan konsep jurnalisme sejati dalam pengambilan keputusan, mematuhi kode etik dan bebas dari pengaruh serta intervensi siapapun.
3. *Organization Level*, pengaruh dari kebijakan organisasi. Media yang profesional mampu mengembangkan antara kepentingan idealisme dengan kepentingan bisnis atau komersial, dengan menempatkan kepentingan idealisme di lini utama. Meletakkan khalayak dan publik dalam setiap keputusan yang akan diambil.
4. *Extramedia Level*, pengaruh dari luar media seperti sumber berita, kelompok kepentingan , khalayak sasaran. Besar tidaknya kekuatan ekonomi dan politik extramedia akan mempengaruhi isi berita.
5. *Ideological Level*, pengaruh bagaimana orang-orang media, praktek-praktek media dan hubungan media berfungsi secara ideologis. Ideologi lebih mewakili fenomena dalam level sosial. Dalam level ideologi dalam butir-butir media dan kontrol sosial salah satu fungsi media adalah memelihara dan mempertahankan batas-batas yang ada dalam suatu budaya, media dan penyimpangan, bagaimana penyimpangan

dikomunikasikan. (Shoemaker dan Reese, 1966 : 90)

Kenyataan isi media mengenai wanita jarang muncul dibandingkan dengan pria, ditampilkannya juga secara berbeda. Jika wanita ditampilkan bersama pria, wanita umumnya ditampilkan dalam peran yang lebih rendah.

A. Karakteristik Produk

Produk industri media bersifat unik atau "*the dual product market*" (Albarran, 1996 : 43); satu sisi berupa barang (*good*) yang berisi kandungan informasi dan hiburan yang dikonsumsi oleh sasaran atau khalayak pembaca (*audience market*), dan sisi lain sebagai jasa (*service*) yaitu akses/penyedia tempat bagi calon konsumen potensial yang dilakukan oleh pengiklan (*advertiser market*).

Hal ini sesuai dengan pendapat Lavine and Wackman (dikutip Hidayat 1997), bahwa "*nature of the product : media companies must produce a new product during every production cycle* (Lavine and Wackman, 1988).

Yang dibahas dalam penelitian ini adalah produk dalam pengetahuan informasi yang dibutuhkan oleh khalayak pembaca (*audience market*) : yaitu berita.

1. Pengertian Berita

Keberadaan pers dalam sistem kemasyarakatan suatu negara dimanapun mempunyai fungsi universal yakni : *pertama*, fungsi informasi yang dilakukan melalui pemberian informasi kepada khalayak. *Kedua*, fungsi mendidik yakni pendidikan massa

(*mass education*) yang dilakukan melalui pemberian informasi berupa pengetahuan. *Ketiga*, fungsi menghibur. *Keempat*, fungsi mempengaruhi atau fungsi kontrol sosial (*social control*) yang menjadikan pers memegang peranan penting dalam masyarakat. Menurut Dja'far Assegaf, fungsi keempat ini pada hakekatnya juga dianggap sebagai kekuatan keempat (*the fourth estate*) yakni menjalankan fungsi kontrol sosial masyarakat (Assegaf, 1983, 1983 : 12).

Menurut Onong Uchyana Effendy 1992 : 52, pelaksanaan fungsi kontrol sosial tersebut ditempuh oleh pers dalam hal ini surat kabar melalui dua cara yaitu secara *eksplisit* dan *implisit*. Secara *eksplisit* dilakukan melalui penyajian tajuk rencana (*editorial*) dan artikel (*column*). Sedangkan secara *implisit* dapat dilakukan melalui penyajian berita (*news*).

Berita sebagai kontrol sosial, menurut Ana Nadhya Abrar dimaksudkan untuk memberitakan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan ikwal yang menyalahi peraturan; supaya peristiwa buruk itu tidak terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi. Faktor itulah yang menjadikan berita sebagai alat kontrol sosial menjadi penting dalam rangka meningkatkan daya nalar khalayak. (Abrar, 1995, 50-51).

Kategori berita merupakan kategori terbesar dalam sajian sebuah media massa (Mc Quail, 1994:262). Selain itu berita adalah karya jurnalistik yang "mahapenting" karena lebih dari 90% isi surat kabar adalah berita dalam arti luas jika iklan digolongkan sebagai berita. Apa yang dibacakan penyiar sewaktu menyampaikan warta

berita di televisi atau radio dan apa yang dimuat di halaman surat dan majalah semuanya adalah berita. Dengan kata lain, berita adalah apa yang tersaji di media massa (Assegaf, 1983:22). Namun bukan pekerjaan mudah untuk memberikan definisi sebuah berita karena berita lebih mudah dikenali daripada didefinisikan.

Walaupun sulit untuk mendefinisikan berita, namun beberapa ahli berusaha merumuskannya. Diantaranya rumusan dari Mitchel V.Charnley yang menyebutkan : *“News is the timely report of facts or opinion of either enterest or importance, or both, to a considerable number of people”*. (Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang mengandung hal yang menarik minat atau penting, atau kedua-duanya, bagi sejumlah besar penduduk) (Charnley dalam Effendy, 1981:130)

Senada dengan rumusan ini, Eric C. Hepwood memformulasikan rumusan berita sebagai berikut : *“berita adalah laporan pertama dari kejadian yang penting yang dapat menarik perhatian umum”* (Hepwood dalam Assegaf, 1983:24)

Menurut Michael V.Charn, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang mengandung hal yang menarik minat atau penting, atau kedua-duanya, bagi sejumlah besar penduduk (Michael V.Charn, dalam Effendy, 1992:67). Definisi lain menyebut berita sebagai laporan peristiwa (*a report of an event*) (Ecip, 1995:48).

Menurut Mangiang, berita adalah laporan jurnalistik yang memperhatikan empat hal yaitu : Peristiwa, Masalah, Penting, Menarik (Mangiang, 1999)

Jika kita cermati kedua rumusan berita tersebut, ditemukan beberapa beberapa unsur hakiki berita, yaitu: *pertama*, bahwa berita merupakan laporan fakta atau opini.

Kedua, unsur waktu yang merupakan laporan tercepat (*timeless*) atau laporan pertama.

Ketiga, unsur menarik minat atau penting bagi kepentingan umum (*public interest*).

Selain ketiga unsur hakiki berita tersebut, masih terdapat beberapa unsur lain yang cukup penting yang menyertai sifat suatu berita. Dja'far H. Assegaf merincinya sebagai berikut : (1) Berita itu haruslah termasa (baru) (2) Jarak (dekat jauhnya lingkungan) yang terkena oleh berita (3) Penting (ternama) tidaknya orang yang diberitakan (4) Keluar biasaan dari berita (5) Akibat yang ditimbulkan dari berita itu (6) Ketegangan yang ditimbulkan oleh berita (7) Pertentangan (*conflic*) yang terlihat dalam berita (8) Seks yang ada dalam pemberitaan (9) Kemajuan-kemajuan yang diberitakan (10) Emosi yang ditimbulkan berita itu (11) Humor yang ada dalam berita (Assegaf, 1983, hal: 25-26)

Dalam berita dikenal berbagai istilah seperti *Spot News* yaitu berita yang disusun berdasarkan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Selain itu, dikenal juga istilah *hard news* yaitu berita yang sudah diturunkan di surat kabar dalam rantang waktu 24 jam. istilah lain *straight news* adalah *hard news* yang ditulis dalam bentuk langsung, singkat dan lugas. Sedangkan *feature news* adalah berita yang sudah diolah lebih lanjut.

Selain tersebut diatas, jenis berita dapat dibagi lagi menjadi :

- 1) Berita harian : adalah berita yang harus secepat mungkin disajikan kepada khalayak luas melalui media massa. Sifatnya sangat terikat waktu (*timeconcern*).
- 2) Berita berkala : adalah berita yang tidak perlu secepat mungkin disajikan kepada

kahalayang luas. Sifatnya *timeless*.

- 3) *Information news* : adalah penjelasan lebih lanjut dari suatu item/butir berita, atau keterangan lebih lanjut dari berita.

2. Berita Utama

Berita yang utama berkaitan dengan peristiwa, hal ini dapat dilihat dari pendapat berikut : Peristiwa adalah realitas atau fakta yang direkam oleh wartawan dan pada gilirannya dilaporkan secara terbuka melalui media massa. Laporan tersebut berupa rekonstruksi atas peristiwa, yang berarti luas, antara lain meliputi keterangan, peristiwa, suasana, manusia dan pendapat (Ecip, 1995:48).

Berita utama menurut Rizal Mallarangeng adalah sebagai berikut : Informasi atau berita yang dianggap terpenting dari seluruh informasi yang disajikan oleh sebuah koran. Berita utama juga dianggap sebagai paling aktual pada hari terbit. Ia ditempatkan pada halaman depan di sudut kiri atau kanan atas. Layaknya, pada setiap terbitan hanya ada satu berita utama. (Mallarangeng, 1992:15)

Salah satu unsur terpenting dari bagian berita utama adalah judul berita (*headline*). Fungsi *headline* adalah untuk menarik perhatian, sekaligus untuk membedakannya dengan rubrik-rubrik lain. *Headline* berita utama dicetak tebal dalam ukuran besar. *Headline* tersebut harus singkat serta mampu mengatakan inti persoalan yang ditulis serta harus mampu menarik perhatian agar pembaca tergiring untuk mengikuti berita selengkapnya. Menurut Garst dan Bernstein "headline harus

berpegang pada prinsip *beauty and utility* (Garst dan Bernstein dalam Mallarangeng, 1992 : 15) yaitu keindahan dan kegunaan.

Kondisi yang berkembang saat ini semakin hari manusia semakin sibuk melakukan aktifitas. Informasi yang disuguhkan dan hendak dikonsumsi semakin bertambah banyak, sedangkan waktu dirasakan menjadi semakin sempit dan mendesak. Akibatnya, pola membaca pun berubah dengan penuh ketergesaan, akhirnya mereka hanya membaca judul. Realitas hadir melalui rangkaian *headline* “sorot mata pembaca” kata Norval Neil Luxon (Luxon dalam Mallarangeng, 1992 :16)

Sementara itu, George Fox Mott mengatakan pembaca “melintas cepat pada sebuah halaman, berhenti beberapa saat pada setiap *headline*, seketika itu pembaca memutuskan apakah akan membaca atau tidak membaca berita selanjutnya” Oleh sebab itu, menurut Luxon *headline* yang tidak menarik perhatian pada lirikan pertama, gagal mengemban tujuannya (Mott dalam Mallarangeng, 1992:16)

Pembaca tidak mungkin mengikuti setiap berita yang disajikan koran. Oleh karena itu, prinsip *headline* seperti singkat, menarik, memberi sensasi, menggiring dan penting; perlu diterapkan dalam masyarakat sekarang yang merupakan pembaca *headline*. Selain *headline* unsur penting lain yang terdapat dalam berita utama adalah lead, klimaks, teknik penulisan dan penutup.

Berita utama sebagai sebuah sajian surat kabar tentu tidak dihidangkan secara mentah-mentah, dalam arti berdasarkan ciri utamanya yang bersifat informatif. Lebih jauh sajian berita utama ini dalam proses pengolahannya mengalami proses

penyeleksian yang sedemikian ketat. Proses pembabakan seleksi dapat didasarkan pada *pertama*, berdasarkan pedoman norma-norma dasar jurnalistik yang meliputi fungsi dasar pers sebagai saluran informasi dan nilai-nilai berita. *Kedua*, berdasarkan visi dan misi surat kabar yang bersangkutan yang kadang kala menimbulkan subyektifitas. Oleh karena itu, untuk menilai sebuah kecenderungan pemihakan suatu surat kabar dapat pula dicermati melalui penyajian berita utamanya.

Seperti dikatakan oleh Heikal *news dan view* tidak mungkin dipisahkan secara kaku dan diberi batas-batas yang jelas. Selain itu, seperti juga tajuk rencana, kemungkinan-kemungkinan politik tidak kurang pula menentukannya dalam proses pemilihan sebuah berita menjadi berita utama (Heikal dalam Mallarangeng, 1992:16).

B. Orientasi Informasi

1. Informasi yang berorientasi pada realitas

Realitas sosial adalah apa yang dilakukan individu oleh individu, kelompok, atau lembaga dalam masyarakat, atau apa yang sungguh-sungguh terjadi dalam realitas (empiris). Informasi yang berorientasi pada realitas dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Informasi yang berorientasi pada realitas Sosial : informasi yang diangkat dari realitas sosial. misalnya berita tentang kondisi perumahan rakyat, berita tentang nasib rakyat yang tergesur.
- b. Informasi yang berorientasi pada realitas psikologis : apa yang dipikirkan atau dikatakan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya berada

pada dunia subyektif sebagai lawan dari dunia obyektif pada realitas sosial.

Misalnya : Berita yang diangkat dari pendapat pejabat tentang nasib rakyat, tentang kepemimpinan politik perempuan. (Mallarangeng 1992 : 64).

Dimensi realitas digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu : dimensi politik, ekonomi, hukum, kebudayaan dan lain-lain.

2. Orientasi berita

Orientasi informasi adalah apa yang menjadi tujuan dari suatu berita atau penulisan/kecenderungan sebuah berita. Orientasi informasi dibagi dalam tiga kategori :

- a. Netral : penulisan berita ini untuk melaporkan suatu peristiwa, memperjelas persoalan atau memperluas perspektif dalam melihat satu atau beberapa persoalan.
- b. Mendukung : penulisan berita untuk menyetujui, mengajurkan atau mendukung pendapat, persoalan atau kecenderungan tertentu.
- c. Mengeritik : Jika penulisan berita ditujukan untuk menentang, tidak sepakat atau menolak pendapat tertentu atau kecenderungan tertentu yang terjadi. (Mallarangeng, 1992 : 67)

Orientasi informasi menurut Hiller Kriegbaun dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. *Argumentatif* yaitu informasi yang disajikan disaring sedemikian rupa baru dikemukakan untuk membela kepentingan tertentu.
2. *Informatif* yaitu memberikan informasi untuk sesuatu hal/masalah tertentu lebih bersifat interpretatif.

3. Aneka rupa yaitu informasi yang memberikan hiburan dan bukan memberikan kepada pembaca interpretasi tentang kejadian/berita. (Don M. Flournoy, 1989 :128)

Ketiga kategori tersebut merupakan kategori pengembangan kategorisasi yang dilakukan oleh Lasswell yaitu: (1) *favorable*, (2) *unfavorable* dan (3) netral. (Don M. Flournoy, 1989 : 128)

C. Gender dalam perspektif Politik

Istilah *gender* merupakan suatu konsep sosial bukan biologis berbeda dengan sex atau jenis kelamin dalam pengertian biologis. Secara biologis perbedaan jenis kelamin merupakan hal yang bersifat *given*, bersifat kodrati. Konsep gender merupakan perbedaan sejumlah karakter, perilaku yang melekat pada jenis pria atau wanita yang dikonstruksikan secara teologis, sosial, budaya, politik maupun ekonomis yang berlangsung relatif. Relativitas ini sangat tergantung antara lain pada :

1. Nilai-nilai, norma-norma yang dianut suatu masyarakat
2. Perkembangan zaman, perkembangan masyarakat (industri dan agraris)
3. Sistem kekerabatan yang dianut (*patrilinial, matrilineal, bilinial*)
4. Akses terhadap sumber informasi, sumber ekonomi dan sebagainya.

Dengan demikian perbedaan *gender* sangat tergantung kepada masyarakat pendukungnya untuk berubah atau bertahan karena perilaku konstruksi sosial itu pada hakekatnya adalah masyarakat itu sendiri. Aspek lain yang turut mempengaruhi adalah proses sosialisasi, pendidikan, pengalaman, adaptasi serta panutan-panutan yang dapat

dijadikan acuan perilaku baru bagi masyarakat yang menerimanya (Koentjoroningrat, 1974).

Menurut Randall (1982) diantara para ilmuwan politik terdapat dua kelompok pandangan mengenai definisi politik :

1. Mereka yang melihat politik sebagai suatu kegiatan (*activity*) yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam proses untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan, distribusi dan alokasi kebutuhan manusia.
2. Mereka yang melihat politik sebagai artikulasi hubungan di dalam struktur kekuasaan tertentu yang ada.

Kelompok pertama berpendapat bahwa politik ada diarena *publik*, dimana kebutuhan manusia yang langka dan terbatas itu diatur, didistribusikan dan dialokasikan. Miriam Budiarto, (1993:62) Termasuk dalam kelompok ini. Ia mengatakan politik sebagai rangkaian suatu kegiatan dalam suatu sistem politik (negara). Yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu dibutuhkan kebijakan umum (*public policy*) sedangkan untuk melaksanakan public policy diperlukan adanya kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai untuk membina kerjasama dan untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses tersebut.

Randell sendiri lebih sependapat pada pandangan kedua bahwa politik ada disemua kehidupan manusia tanpa dibatasi oleh dikotomi arena *publik* dan arena

domestik. Pandangan ini sejalan dengan Aristoteles (384-322 SM) yang merupakan orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatan tentang “manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik”. Menurut Aristoteles, hakekat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan interaksi satu sama lain akan melibatkan hubungan politik manakah manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, mencoba meraih kesejahteraan pribadinya. Melalui sumber yang tersedia dan manakala mereka berupaya untuk mempengaruhi orang lain agar menerima pandangan maka kegiatan politik. Jika pendapat Aristoteles diikuti maka sebenarnya setiap orang dalam suatu kerangka yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan untuk merumuskan tujuan kolektif negara.

Di dalam UUD 1945, secara *eksplisit* tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tercantum di dalam pasal 27 yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum Indonesia juga meratifikasi dua perjanjian yang ada hubungannya dengan HAM perempuan, yaitu hak politik perempuan (*convention of political right of women*) dan perjanjian mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women*) atau CEDAW. Akan tetapi dalam real politik masih banyak sekali terjadi diskriminasi politik terhadap perempuan. Perempuan adalah mayoritas penduduk Indonesia pada saat yang sama juga mayoritas pemilih. Akan tetapi dapat dilihat di setiap institusi politik formal perempuan selalu minoritas atau marginal dalam menempati posisi di lembaga politik formal. Baik lembaga *legislatif*, *eksekutif* maupun

yudikatif. Dampak dari ketidak terwakilan posisi perempuan di pusat-pusat pengambilan keputusan, isu-isu yang menjadi perhatian perempuan sering tidak mendapat perhatian didalam perhatian didalam perdebatan-perdebatan politik yang ada.

Lebih jauh lagi perempuan seringkali dijadikan obyek dari sistem politik itu sendiri dalam rangka mendapatkan posisi-posisi politik. Bahkan peran perempuan dalam wilayah publik/politik juga masih dibatasi. Meskipun telah terjadi perubahan akan tetapi masih banyak pikiran-pikiran di masyarakat yang memandang perempuan tidak patut meposisi diri sebagai penentu kebijakan atau pengambilan keputusan di sektor *publik* yang didalamnya terdapat kaum laki-laki.

Ketika dihadapkan pada pilihan untuk menentukan laki-laki atau perempuan yang pantas menjadi pemimpin organisasi atau komunitas masyarakat, maka pandangan yang muncul seringkali menafikan perempuan. Pandangan yang dianggap lebih toleran adalah : “selama masih ada laki-laki, maka laki-laki”.

D. Perempuan dan Media

Para peneliti media telah menghasilkan berbagai gambaran suram tentang potret wanita di media massa. Gambaran suram tersebut dapat dilihat dari disertasi Thamrin Amal Tomagola mengenai *Indonesia Women's Magazine as an Ideological*. Gambaran perempuan menurut Tomagola sejalan dengan rumusan 5 P yaitu (1) makhluk yang harus tampil memikat (*pigura*), (2) pengurus utama pekerjaan rumah tangga (*pilar*), (3) menjadi obyek segala jenis pemuasan laki-laki (*Peraduan*), (4) mustahil meninggalkan

dapur (pinggan), (5) selalu khawatir tidak diterima oleh lingkungan tertentu (pergaulan). (Tomagola dalam Subandy Idy dan Hanif Suranto 1998 : 157).

Gambaran perempuan di media massa juga dapat dilihat dari "*Analisis dengan perspektif gender*" atas Majalah Wanita di Indonesia" karya Ashadi Siregar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang dikaji dalam majalah wanita adalah : (1) lingkup domestik 29,05%, (2) sosial 40,54%, (3) budaya 23,65, (4) ekonomi 2,70%, (5) politik 4.06%.

Peristiwa yang dikaji lebih berdemensi sosial seperti kriminalitas, pekerja sosial dan lain-lain. Majalah wanita yang dikaji tidak menjadikan jurnalismenya sebagai alat kaum perempuan dalam menghadirkan diri dalam kancah struktur sosial. (Siregar, Ashadi dalam Subandy Idy dan Hanif Suranto 1998 : 130).

Media adalah cermin bagi realita yang ada di masyarakat. Namun tidak selamanya benar. Media memiliki hubungan dua arah dengan realita sosial. Disatu pihak media merupakan cermin bagi keadaan sekelilingnya, namun dilain pihak ia juga membentuk realita sosial itu sendiri lewat sikapnya yang selektif dalam memilih hal-hal yang ingin diungkapkannya, juga cara menyajikan hal-hal tersebut. Media memberi interpretasi bahkan membentuk realitas sendiri. Termasuk didalam interpretasi selektif ini yakni pengukuhan nilai, sikap serta pola-pola perilaku masyarakat dengan selalu mempertegas sudut pandang bahwa pria adalah pengambil kebijakan didalam masyarakat.

Media massa banyak perannya dalam pembentukan sikap dan perilaku yang

menentukan status perempuan dalam masyarakat. Media jarang sekali menampilkan perempuan secara signifikan baik dalam dunia pekerjaan maupun dalam kehidupan publik.

Secara umum media nyaris tidak menaruh perhatian pada isu-isu khas penting bagi perempuan, seperti kegiatan gerakan perempuan, kepemimpinan politik perempuan, sumbangsih sosial yang diberikan kepada masyarakat oleh perempuan. Dalam media massa perempuan tampil pasif, tidak mandiri, tergantung dan tidak berani mengambil keputusan. *Distorsi* semacam ini akhirnya mengabsahkan dan melestarikan ketimpangan yang ada. (Subandi, Idy dan Suranto, Hanif, 1998 : 143).

Perhatian media cenderung memberi ruang bagi hal-hal yang secara tradisional disebut sebagai “urusan wanita”. Berita-berita demikian misalnya menyangkut rumah tangga, mode, perawatan anak, profil tokoh panutan perempuan. Kebanyakan tokoh justru jadi sorotan karena melakukan kegiatan persis sekitar “urusan wanita” tersebut. (Subandi, Indy dan Suranto, Hanif, 1998 : 143).

Dunia media adalah dunia patriaki, yang berkecimpung didalam penggarapan media sebagian besar adalah lelaki menurut catatan Persatuan Wartawan Indonesia 4687 wartawan laki-laki dibanding 461 wartawan perempuan. (Subandi, Indy dan Suranto, Hanif, 1998 : 139). Oleh karena itu isu-isu mengenai perempuan lebih sering terkalahkan dan terabaikan prioritasnya. Hal ini dapat dilihat dari komposisi antara jurnalis perempuan dan laki-laki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LP3Y perbandingan jurnalis laki-laki dengan perempuan adalah : *Kompas* 184, perempuan 28

(15,2%), *Suara Pembaharuan* 97, perempuan 15 (15,4). *Republika* 129, perempuan 21 (16,2%). *Pos Kota*, 111, 8 (7,2%). *Pikiran Rakyat* 81, perempuan 12 (14,8%). *Kedaulatan Rakyat* 147, perempuan 14 (9,5%). *Suara Merdeka* 133, perempuan 12 (9,0%). *Jawa Pos* 127, perempuan 8 (6,3%). *Surabaya* 152, perempuan 9 (5,9%) (Siregar, Pasaribu, Prihastuti 1999 : 19).

Bahkan keberadaan perempuan dalam komposisi pengelolaan media massa tidak berarti banyak bahkan sering tidak mampu intervensi secara efektif dan konsisten kedalam media lazim (*mainstream*). Selain itu *patriaki* sendiri bisa saja dianut oleh siapa saja baik lelaki mapupun perempuan. Bisa saja jurnalis perempuan berada pada posisi puncak, namun kebijakan kebijakan yang dilakukannya ternyata belum menguntungkan posisi dan peran perempuan itu sendiri, bahkan cenderung lebih *maskulin*.

E. Perempuan dan Politik

Pada umumnya masyarakat menganggap dunia politik merupakan *domain publik* yang diidentikkan dengan laki-laki. Laki-laki merupakan faktor penentu politik yang menentukan karena dia adalah kepala rumah tangga dimana istri dan anak-anaknya menyalurkan aspirasi politik mereka kepadanya. (kompas, 22 Oktober 1999).

Sementara kaum perempuan dinilai tidak mungkin menjadi aktor politik karena minat dan kepentingan mereka terbatas pada domain privat atau rumah tangga. Perempuan hanya dijadikan alat politik pelengkap untuk mendapat suara.

Revolusi Perancis tahun 1791 melahirkan deklarasi yang memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Itulah dasar dari apa yang dalam Revolusi Perancis menjadi tuntutan *egalite* (kesamaan). Dalam bahasa yang lebih agamis rumusan itu menjadi di hadapan sang Pencipta tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan.

Hal ini berarti bentuk diskriminasi berdasarkan bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik, pendapat yang berbeda, asal-usul kebangsaan, kelahiran, kedudukan merupakan pelanggaran langsung terhadap martabat manusia (Franz Magnis-Suseno, Kuasa dan Moral).

Dalam praktiknya, politik tidak berpihak terhadap perempuan. Dibanyak negara perempuan belum mendapatkan posisi yang sama dengan laki-laki di panggung politik. Kaum perempuan sering mengalami ketidakadilan ganda, karena miskin dan karena ia perempuan. Dibeberapa tempat bahkan ketidakadilan itu masih dipertajam karena diskriminasi rasial seperti yang dialami kaum perempuan miskin kulit hitam.

Usaha untuk membongkar *patriaki* atau dominasi laki-laki atas perempuan memang dilakukan dibanyak negara. Memang kadangkala kesuksesan kaum perempuan seringkali dikaitkan dengan laki-laki, Sebut saja ketika Corazon "Cory" Conjuangco Aquino duduk sebagai Presiden Filipina, orang mengatakan, coba kalau dia bukan istri Benigno Aquino, mana mungkin wanita itu jadi presiden.

Contoh lain lagi yang selalu dikaitkan dengan kaum laki-laki adalah Benazir Bhutto. Orang keberatan mengakui kehebatan perempuan Pakistan itu, tetapi mudah

mengatakan, dia melambung karier politiknya gara-gara putri mendiang Perdana Menteri Pakistan Ali Bhutto. Coba kalau dia wanita biasa, didalam darahnya tidak mengalir darah politik Ali Bhutto mana mungkin dia mendapat simpati rakyat Pakistan dan menjadi perdana menteri.

Wanita lainnya yang dikatakan muncul di panggung politik gara-gara mendapat warisan entah dari suami atau ayahnya adalah dua wanita dari Banglades. Begum Khaleza Zia dan Sheik Hasina Wajed. Suami Begum Khaleza Zia, Presiden Jenderal Ziaur Rahman dibunuh dalam kudeta militer 10 Mei 1981. Sementara ayah Sheik Hasina Wajed, presiden pertama Banglades Sheik Mujibur Rahman ditembak mati beserta istri dan tiga anaknya dalam kudeta 15 Agustus 1975.

Di Indonesia sejarah menunjukkan bahwa perempuan sebagai pemimpin bukan merupakan suatu hal yang baru. Simak saja Ratu Sima di Kalingga, Tribuwana Tungga Dewi Jaya Wisnu Wardani di Majapahit. Kerajaan Aceh dalam kurun waktu 1641 – 1699 pernah beberapa kali diperintah oleh sultanah yaitu : (1) Sultanah Safi'atuddin, (2) Sultanah Nurul Alam, (3) Sultanah Naqiatuddin Syah, (4) Sultanah Inayah Zakiatudin Syah, (5) Sultanah Zainatuddin Syah.

Pengaruh gerakan perempuan juga telah terlihat pada akhir abad sembilan belas dan awal abad dua puluh. Hal ini dapat dilihat dari perjuangan emansipasi RA. Kartini, Dewi Sartika, Dewi Maria Walanda Maramis. Pada masa pergerakan nasional kita mengenal Cut Nyak Dien, Christina Marta Tiahohu. Pada masa revolusi dikenal Maria Ulfah, SK. Tri Murti.

Setelah melampaui perjuangan kemerdekaan, gerakan perempuan pasca 17 Agustus 1945 mulai tampil secara lebih jelas dalam percaturan politik dan terlibat dalam hubungan kekuasaan yang semakin nyata terlihat menjelang pemilu tahun 1955. Ketika itu pelbagai organisasi perempuan aktif mengorganisasikan diri di tengah dinamika politik saat itu.

Dharma wanita yang didirikan tahun 1974 merupakan organisasi dari istri para pegawai negeri sipil dan dengan begitu memperluas dukungan bagi wanita birokrasi, teknokrat maupun militer. Disekitar itu pula didirikan organisasi-organisasi perempuan seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dan lain-lain yang bekerja dalam spektrum anasir-anasir kekuasaan itu serta hadir seiring dengan perkembangan yang ada.

Posisi demikian tidak dengan sendirinya melipat gandakan peran politik perempuan. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga tidak banyak mengalami perubahan.

Meskipun kepemimpinan perempuan di Indonesia telah terbukti dan teruji kemampuannya, namun perempuan Indonesia tetap harus berjuang untuk mencapai kesetaraan dengan lelaki. Bahkan kepemimpinan politik perempuan muncul menjadi isu yang kontroversial. Isu *gender* pertama kali menjadi isu penting menjelang pemilu 1999. Isu ini terutama dimunculkan oleh partai yang berbasis Islam dengan menggunakan kutipan ayat-ayat kitab suci yang memojokkan perempuan. Isu tersebut merupakan *political fallacy* (kesalahan Politik) yang pertama mengenai persoalan

gender dalam politik (Hermawan Sulisty, Kompas, 28 Juni 2000).

Argumen dasar kepemimpinan dibangun atas sesuatu yang sudah *given*, bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara/pemimpin, sementara pihak lain dengan argumen tandingan muncul dengan menggunakan dasar ajaran agama yang sama membolehkan.

Indonesia baru pasca Orde Baru menyodorkan sejumlah tantangan bagi kepemimpinan politik perempuan. Tantangan paling berat adalah masih dominannya *konteks* dari pada kapasitas kepemimpinan. Disamping budaya patriaki. Kepemimpinan politik bias gender harus diatasi dengan melakukan melalui :

1. Pemahaman bahwa segala faktor dan dimensi yang bersifat *given* seperti *gender*, ras, etnik dan sebagainya tidak boleh dijadikan dasar dalam rumusan politik.
2. Mengubah penolakan dari *konteks* menjadi pada kapasitas diri pemimpin adalah *achievement*, pencapaian segala sesuatu diusahakan bukan begitu saja. (Hermawan Sulisty, Kompas, 28 Juni 2000).

Masalah kepemimpinan perempuan di Indonesia tidak berhenti dengan terpilihnya presiden, wakil presiden dan pimpinan politik nasional lainnya, tetapi bagaimana kita mengubah kandungan dalam wacana politik dari *konteks* menjadi teknis.

Oleh karena itu untuk mengembangkan peran politik perempuan, perlu telaah secara terbuka. Hal ini pastilah harus dijadikan sebagai salah satu pekerjaan rumah bagi masyarakat Indonesia, sekurang-kurangnya dalam lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

F. Kebijakan Redaksional

Pada hakekatnya penerbitan suatu surat kabar merupakan suatu usaha yang mencoba menjual jasa kepada masyarakat. Pemimpin redaksi bertugas untuk menghasilkan mutu surat kabar yang cukup tinggi, sehingga mudah dijual oleh bagian distribusi; bagian distribusi harus berhasil dalam memperluas pasaran surat kabar itu sehingga bagian iklan dapat menjual sebagian dari halaman surat kabar kepada produsen yang ingin menarik perhatian para pembaca melalui iklan. Jelas bahwa sukses usaha penerbitan surat kabar bergantung pada kerjasama antara tiga bidang utama tersebut.

Karena tugas pokok redaksi adalah mengelola berita, maka kebijakan redaksional tak dapat dilepaskan dari batasan tentang berita dan nilai berita, serta proses penjagaan (*gatekeeping*).

Nilai-nilai yang dikandung suatu peristiwa itulah membedakan peristiwa layak diberitakan atau tidak (Izard dalam Ecip, 1990). Nilai-nilai itu antara lain: Kedekatan khalayak dengan obyek berita (*proximity*), Kesegaran waktu (*timeliness*), Bernilai besar (*magnitude*), Menonjol (*prominence*), Kepentingan kemanusiaan (*Human interest*), Pertentangan antar orang atau antar institusi, Kemutakhiran (*currency*) (Mencher, 1987:65)

Gatekeeping adalah penjagaan gerbang atas bahan-bahan berita yang banyak berdatangan dari berbagai penjuru dikantor redaksi, karena terbatasnya ruang (A.Dahlan dalam Ecip; 1990). Disatu pihak berita yang datang berjumlah banyak,

dilain pihak ruang yang disediakan untuk memuatnya terbatas. Dengan mengambil contoh hasil penelitian Ecip (1995) pada surat kabar *Jawa pos*, diperoleh data bahwa naskah bahan berita yang tidak terpakai sebanyak 80 %.

Proses pembuatan berita tidak dapat mengabaikan unsur pemilihan peristiwa atau opini seseorang sebagai sumber informasi yang terpenting dan harus disimak oleh pembaca. Dalam perkembangannya semakin hari semakin banyak peristiwa yang terjadi dan tidak jarang muncul berbagai macam ide atau opini tanggapan terhadap berbagai peristiwa dalam masyarakat. Selain itu, cara penulisan peristiwa atau opini-opini tersebut tidak dapat diabaikan. Hal ini berkaitan erat dengan ideologi surat kabar yang bersangkutan.

Hubungan antara pemuatan berita dengan ideologi dikemukakan oleh Wilbur Schramm sebagai berikut : "*Gatekeepers* menyeleksi fakta-fakta tertentu sebagai berita dan membuang fakta-fakta lainnya, sebab *gatekeepers* itu membentuk persepsi mereka tentang dunia dan kenyataan menurut kerangka *referensi* kultur, sumber dari nilai-nilai itu dan ideologi yang mereka miliki. Melalui proses seleksi ini yang disebut sebagai *selective exposure* dan *selective perception*, para reporter dan editor menyeleksi dan mengartikan pesan. Mereka juga menyeleksi dan mengartikan pesan tersebut sedemikian rupa untuk menolak setiap perubahan dalam kerangka kultur dan ideologi mereka" (Schramm dalam Mallarangeng, 1992:16)

Dengan lebih jelas lagi, Rikard Bagun menerangkan bahwa tujuan dan kepentingan institusi surat kabar sebagai bagian dari kebijaksanaan ditentukan oleh

referensi nilai yang dianutnya. Perangkat nilai yang menjadi referensi itu tidak hanya menjadi dasar bagi visi dan posisi yang dibelanya terus menerus, tapi juga sebagai kriteria melakukan kritik. Bangunan nilai setiap media itu merupakan ukuran dan pengendali aktivitas pers pendukungnya. (Bagun, 1991:45).

G. Sumber Informasi

Shoemaker dan Reese mengatakan bahwa faktor ekstra media seperti sumber informasi/berita (hubungan wartawan dengan sumber, seleksi sumber, kelompok kepentingan khusus, kampanye *public relations* dan organisasi media lain), sumber-sumber penghasilan (pengiklan dan khalayak), lembaga sosial lain (bisnis dan pemerintah) lingkungan ekonomi (kompetisi, karakteristik pasar, keanggotaan kelembagaan) dan teknologi berpengaruh terhadap isi media.

Berita dalam media massa merupakan hasil olahan wartawan yang memperoleh data, fakta dan cerita dari sumber informasi. Disamping ada juga dalam beberapa peristiwa wartawan ada di tempat kejadian, menjadi saksi suatu kejadian. Sumber berita bisa memberi efek yang luar biasa terhadap isi media. Pengaruh ini bisa dilihat dari bagaimana sumber berita bisa saja menyembunyikan atau berbohong tentang kejadian yang diketahuinya dan bisa tidak dilihat. Dalam arti sumber berita memberikan konteks yang dalamnya terdapat evaluasi mengenai informasi lain atau dengan cara mengulur-ulur waktu sehingga wartawan tidak berkesempatan mencari informasi dari sumber lain yang bisa memberikan pandangan.

Wartawan yang akan menulis satu berita mengenai suatu isu tergantung pada sumber informasi resmi, Misalnya pejabat pemerintah, kepolisian atau lembaga lain yang berwenang memberikan keterangan, mau tidak mau mengutip pernyataan apapun yang dikatakan sumber informasi. Walau bukan tidak mungkin wartawan yang bersangkutan mengetahui dari investigasi atau sumber lain yang bisa dipercaya bahwa pernyataan yang dikemukakan sumber informasi resmi tersebut tidak benar. Dalam kasus wartawan tidak bisa bertemu dengan sumber informasi karena berbagai alasan, informasi pejabat berwenang dapat digantikan dengan siaran pers/*pers release* lembaga yang bersangkutan.

Birokrasi sebagai sumber informasi mempunyai posisi yang sentral karena disatu pihak ia berperan mewadai aspirasi untuk diteruskan ke lembaga negara, tetapi dilain pihak ia berperan sebagai alat pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. (Cosmas Batubata dalam Maswadi Rauf, 1993:133).

Aktivis politik sangat dominan sebagai sumber/komunikator politik, terutama menyangkut propaganda politik, pesan-pesan politik dibuat atau direkayasa sedemikian rupa untuk membentuk opini masyarakat. Contoh bentuk perekayasa adalah isu kebulatan tekad, isu gender, isu agama. (Syamsu Suryadi dalam Maswadi Rauf, 1993:73).

Karena dominannya pemerintah/birokrat maka muncul lembaga-lembaga masyarakat non pemerintah. Aktivistis lembaga tersebut merupakan sumber yang dapat memberi alternatif dari dominannya birokrat, seperti aktivis Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), Akademisi dan praktisi intelektual. Aktivis LSM lebih menyuarkan masyarakat pada tingkat *grass-roots*, Akdemisi lebih menyuarkan kalangan pendidikan, sedangkan praktisi intelektual mewakili kaum intelektual dalam masyarakat.

Sumber berita lebih banyak didominasi laki-laki. Perempuan sebagai sumber berita tidak lebih dari 15%. Perempuan lebih banyak menjadi obyek suatu berita, lebih dari 30%. Karena perempuan lebih banyak menjadi obyek berita, maka perempuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. (Siregas, Ashadi dalam Subandy,Indy dan Suranto, Hanif, 1998 : 131)

Sumber informasi jelas-jelas mempengaruhi isi media, seperti dikatakan Gans (1979), salah satunya karena wartawan hampir tidak pernah menjadi saksi langsung suatu kejadian. (Gans dalam Schomeker and Reeze, 1996:52). Dalam keadaan demikian sumber-sumber berita jelas amat diperlukan. Apalagi untuk menuliskan suatu topik atau isu tidak jarang dibutuhkan lebih dari dua sumber informasi agar berita yang tampil berimbang. Sumber-sumber informasi tersebut dapat memberikan informasi dari sudut pandang yang berbeda. Namun sayangnya tidak semua sumber-sumber informasi yang diperlukan dengan berbagai alasan dapat dihubungi. Hal ini menyebabkan apa yang kerap dikatakan dengan tidak proporsional, *inbalance*. Disamping merugikan salah satu pihak, pembaca juga kurang mendapatkan informasi yang memadai.

Edward S. Herman dan Noam Chomsky mengatakan bahwa bahan-bahan berita akan dapat menentukan kemantapan suatu media dan media massa sendiri merupakan

cerminan hubungan simbiosis dengan pusat kekuatan informasi oleh keperluan ekonomi.

The mass media are drawn into a symbiotic relationship with powerful sources of information by economic necessity and reciprocity of interest. The media need a steady, reliable flow of the raw material of news (Herman dan Chomsky, 1988:18)

H. Panduan Wawancara

Untuk mengetahui kebijakan redaksional harian umum *Kompas* dan harian umum *Rakyat Merdeka* maka diperlukan data-data dari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan mekanisme pemberitaan. Untuk memperoleh data tersebut maka dilakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan redaktur (pimpinan) pers yang bersangkutan. Wawancara tersebut dilakukan dengan *Interview guide* (sebagai panduan) yang ditetapkan sesuai dengan butir-butir item yang diperlukan, sebagai berikut :

1. Umum

Disini pertanyaan yang akan diajukan mengenai media secara umum, yaitu ; kapankah media ini berdiri dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini?. Apakah yang menjadi visi dan misi media tersebut?. Berapa jumlah tiras (oplag) dan bagaimanakah distribusinya?. Siapakah segmen pembaca utama media ini dan bagaimana penggolongan kelas pembaca?. Bagaimanakah struktur organisasi media ini ?

2. Khusus kebijakan redaksional

Disini pertanyaan yang akan diajukan secara lebih spesifik yaitu menyangkut kebijakan redaksional. Bagaimanakah kebijakan redaksional yang diterapkan dalam penerbitan/peliputan dan bagaimanakah obyektivitas diatur redaksi dan apa standarnya?. Siapa yang bertanggung jawab terhadap dimuat-tidaknya sebuah berita ?

3. Kebijakan yang berkaitan dengan gender

Dari seluruh jumlah tenaga kerja yang mendukung, berapakah jumlah tenaga kerja perempuan ? Dari seluruh jumlah jurnalis berapakah yang perempuan dan berapakah yang masuk jajaran redaksi dan dalam bidang apa saja?. Apakah ada pertimbangan khusus dalam penerimaan jurnalis perempuan dan bagaimanakah latar belakang pendidikan jurnalis perempuan ? Apakah ada perbedaan tunjangan dan fasilitas antara jurnalis perempuan dengan laki-laki? Pertimbangan-pertimbangan apa yang diterapkan dalam penugasan jurnalis perempuan untuk menggali nara sumber ?

4. Rubrik Wanita

Adakah rubrik khusus perempuan, dimana dan siapa penanggung jawabnya ?. Apakah dasar penentuan berita/tulisan dalam rubrik perempuan dan bagaimanakah kategori-kategori tentang rubrik/berita perempuan ? Bagaimanakah dengan berita politik dan secara khusus adakah kolom yang disediakan untuk pemberitaan masalah kepemimpinan politik perempuan ?

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Isaac dan Michael, metode ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat (Rahmat, 1991 : 22). Dalam metode ini data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (Surakhmad, 1994 : 140).

Pada dasarnya metode penelitian diskriptif merupakan cara untuk mendiskripsikan dan menginterpretasi kondisi atau hubungan yang ada, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau fenomena yang sedang berkembang. Penelitian dilakukan dengan menganalisa dan menginterpretasi data yang dikumpulkan.

Penelitian diskriptif bertujuan untuk : (1) mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada (2) mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku (3) membuat perbandingan atau evaluasi (4) menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Rakhmat, 1984 : 25).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang didefinisikan oleh Berelson sebagai “Teknik penelitian untuk melukiskan isi komunikasi yang nyata secara obyektif, sistematis dan kuantitatif” (Stempel III, 1983 : 8). Teknik analisis isi dipilih dengan tujuan untuk mengetahui keseluruhan kinerja yang tampak dalam informasi atau berita. Dengan teknik analisis isi akan diteliti isi komunikasi yang menjadi obyek penelitian yakni paragraf - paragraf dalam berita harian umum *Kompas* dan harian umum *Rakyat Merdeka* mengenai isu kepemimpinan politik perempuan. Isu dibatasi sebagai rangkaian berita yang mengandung kontroversi. Paragraf yang diteliti adalah sebagai keseluruhan isi suatu pokok pikiran. Paragraf-paragraf ini kemudian diukur berdasarkan pemilihan kategori dan satuan analisis.

Menurut Klaus Krippendorff teknik ini bersifat tidak menyolok (*unobtrusive*) (Krippendorff, 1991 : 28). Berbeda dengan teknik lain seperti wawancara atau kuisisioner dimana responden mengetahui dan menyadari bahwa ia sedang diteliti sehingga hal tersebut sering mengakibatkan bias. Kendala seperti ini tidak dialami oleh analisis isi. Situasi reaktif dari obyek penelitian dapat dihindari karena yang diteliti isi komunikasi tertulis. Hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan peneliti untuk menggunakan teknik analisis isi sebagai salah satu cara untuk menganalisis data yang diperoleh.

Ashadi Siregar mengatakan betapapun lengkap unit analisis dan kategori yang digunakan, kajian sebenarnya hanya dapat menjelaskan sosok media. Gambaran utuh, termasuk dunia diluar institusi pers yang diteliti memerlukan pengkajian tersendiri

(dalam Mallarangeng). Oleh karena itu, selain menggunakan teknik analisis isi dalam penelitian ini digunakan juga teknik wawancara yang dilakukan terhadap institusi media yang bersangkutan, teknik wawancara ditempuh untuk mendapatkan dan memperdalam data-data dari sumber-sumber yang mendukung penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh dua pelaku coding : Sarjana Fikom Universitas Padjajaran Bandung, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Kedua Pengkoding tersebut aktif di lembaga penelitian dan pengembangan masalah gender sehingga diasumsikan keduanya cukup memiliki pemahaman atas permasalahan yang diteliti.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*), dengan desain penelitian yang ditetapkan adalah *multicase analysis*. Pertimbangan, karena obyek yang diteliti pada dua media (lebih dari satu media), maka disebut berkasus banyak (*multicase analysis*).

C. Populasi dan Sampel

Obyek dalam penelitian ini adalah harian umum *Kompas* dan harian umum *Rakyat Merdeka*. Populasi dalam penelitian ini adalah pemberitaan pers selama Juni - November 1999, yang dimuat dua media nasional yaitu *Kompas* dan *Rakyat Merdeka*. Pemilihan kurun waktu tersebut dikarenakan pada bulan Juni ada event nasional yaitu

pemilihan umum dan dilanjutkan dengan sidan umum MPR bulan Nopember 1999. Dimana pada kurun waktu tersebut kepemimpinan politik perempuan menjadi isu nasional dalam rangka penentuan pemimpin politik nasional.

Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yakni memilih orang-orang tertentu karena dianggap berdasarkan penilaian tertentu mewakili statistik (Rahmat, 1995 : 81). Sampel *Purposive* disebut juga sampel pertimbangan, yakni bila kita mengambil sampel tertentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. (Rahmat, 1995 : 78). Berdasarkan teknik pengambilan sampel, ditarik sejumlah edisi penerbitan yang memuat permasalahan yang diteliti yakni mengenai kepemimpinan politik perempuan.

D. Unit analisis

Pada tingkat teks, unit analisis dalam penelitian ini adalah teks (teks) berita. Semua berita yang berkaitan dengan Perempuan sebagai pimpinan politik wanita, yang dimuat oleh kedua surat kabar, ditetapkan sebagai unit analisis. Yang diteliti dalam level teks ini adalah : (1) keberpihakan (2) frekwensi pemuatan (3) sebaran berita. Melalui satuan analisis berita yang dimuat harian *Kompas* dan *Rakyat Merdeka*. Isu mengenai kepemimpinan politik perempuan yang mengemuka setelah selesainya pemilihan umum dan sampai dengan sidang umum MPR.

Pada tingkat organisasi unit analisisnya adalah redaksi *Kompas* dan *Rakyat Merdeka*.

E. Variable Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat variable :

Variable A adalah **Sumber Berita** yang dikenakan pada setiap berita dan tulisan. Kategori ini akan membedakan isi berita atau tulisan berdasarkan sumbernya. Pengkategorian ini mengacu pada Rizal Mallarangeng yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan keperluan penelitian ini. Variabel sumber berita dibedakan menjadi :

1. Jenis Sumber Berita : Pengkategorian sumber berita ditentukan sesuai apa yang ada ditulis pada dua media yaitu *Kompas* dan *Rakyat Merdeka*, jika tidak disebutkan maka akan dikategorikan berdasarkan persepsi penulis. Variabel jenis sumber berita dibagi :

- a. **Birokrat** : adalah warga negara Indonesia yang secara formal bekerja pada negara (pegawai negeri), tetapi pegawai negeri yang mengajar di perguruan tinggi negeri tidak termasuk di sini.
Contohnya : Dirjen, Sekjen, dsb.
- b. **Intelektual** : Akademisi adalah pakar keilmuan, dosen dari kalangan perguruan tinggi Negeri atau swasta, atau bukan akademisi tidak bekerja atau mengajar pada lembaga perguruan tinggi tertentu. Peneliti dan pengamat politik termasuk intelektual. Contoh : Dawam Rahardjo, Facyr Ali. (mendasarkan keahliannya pada ilmu pengetahuan bukan pada kekuasaan politik atau administratif).

- c. **Aktivis LSM/Ormas** : Aktivis LSM adalah individu yang aktif dalam kegiatan LSM baik yang bergerak di bidang politik, sosial, budaya dan sebagainya meliputi

LSM yang didanai pemerintah seperti Komnas HAM, maupun LSM mandiri seperti YLBHI, dan lain-lain. Aktivistis Ormas adalah individu yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan (baik kepemudaan, keagamaan, maupun sosial) Misalnya : Ulama, Khayi.

- d. **Aktivistis Orsospol** : adalah individu yang aktif dalam organisasi sosial politik (PDI P, Golkar, PKB, PAN, dll).
- e. **Pelaku** : pemimpin politik dilembaga legislatif (anggota dan ketua DPR/MPR), Lembaga Eksekutif (Presiden, Wakil Presiden dan Para Menteri), lembaga Yudikatif (Hakim, Jaksa).
- f. **Sumber lain** : adalah pengamatan wartawan dan yang lain yang tidak masuk dalam kategori diatas.

2. Jenis Kelamin sumber berita : Pengkategorian didasarkan pada nama yang tercantum di media, juga berdasarkan persepsi penulis. Variabel jenis kelamin dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Pria
- b. Wanita

Variable B adalah kategori Orientasi Informasi/keberpihakan : kategori yang dikenakan pada berita dan tulisan dilihat dari unit analisa menurut kecenderungan isinya atau keberpihakan. Variabel ini dapat dibagi menjadi :

1. sifat keberpihakan

- a. **Paragraf Mendukung** : paragraf yang memuat sikap mendukung secara apriori terhadap pemimpin politik perempuan. Paragraf ini biasanya disertai dengan alasan atau analisis kritis.
- b. **Paragraf Netral** : paragraf yang memuat laporan tentang suatu peristiwa yang bisa dibuktikan secara empiris atau yang mengandung kutipan informatif dari sumber berita. Paragraf ini biasanya memuat penilaian logis, dialektis, menunjukkan hubungan sebab akibat, atau justru lepas dari konteks.
- c. **Paragraf menentang** : paragraf yang memuat sikap penentangan (penolakan) secara apriori terhadap pemimpin politik perempuan biasanya disertai alasan dan analisis kritis.

2. Alasan Berpihakan/ketidak berpihakan

- a. Agama : menggunakan dalih agama/kutipan dari ayat-ayat kitab suci
- b. Budaya /Tradisi : bahwa perempuan itu hanya mengurus urusan domestik, cukup mengurus keluarga dirumah, jadi pendorong karier suami.
- c. Intelektual : kemampuan, pendidikan
- d. Fisik : perempuan itu merupakan makhluk yang lemah, yang tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang besar.
- e. Lain-lain : peraturan/undang-undang, atau tidak memberikan alasan sama sekali.

Variable C kategori frekuensi pemuatan yaitu berapa banyak berita dan tulisan

mengenai pemimpin politik perempuan di harian umum *Kompas* dan *Rakyat Merdeka*. Pengkategorian ini merujuk pada Sumita Tobing (dalam Fournoy D. Michael 1989 : 25). Kategori ini adalah, jumlah berita atau tulisan mengenai pemimpin politik perempuan dalam tiap penerbitan.

Variable D adalah sebaran berita , yaitu penempatan berita dalam ruang-ruang surat kabar. Meliputi :

1. **Berita utama (headline) halaman satu** adalah berita yang paling aktual dari terbitan hari itu, dan biasanya judulnya ditulis dengan huruf paling besar dan dicetak tebal, dimuat di halaman satu.
2. **Berita biasa halaman satu** adalah berita-berita selain berita utama yang ditampilkan di halaman satu.
3. **Berita utama selain di halaman satu** adalah berita yang dianggap memiliki bobot aktualitas tinggi dan ditonjolkan di bagian teratas di halaman selain halaman satu.
4. **Berita biasa selain di halaman satu** adalah berita-berita di halaman selain halaman satu dan bukan berita utama.

Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan redaktur pelaksana ataupun staf litbang dari masing-masing media untuk mendapatkan keterangan redaksional dan segala kebijakan yang berhubungan dengan pemberitaan. Ditunjang dengan studi pustaka untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian.

Wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang mendukung.

F. Metode Pengumpulan data

Sesuai dengan metode (*case study*) dan desain yang dipilih (*multicase-analysis*), maka pengumpulan data secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. Pada tingkat teks, data dikumpulkan melalui pengamatan berstruktur dengan analisis ini (*content analysis*) pada satuan berita atau unit analisis.
2. Pada tingkat organisasi, data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder yang membahas mekanisme pemberitaan dan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan redaktur (pimpinan) pers yang bersangkutan. Wawancara dilakukan dengan interview yang ditetapkan sesuai dengan butir/item yang diperlukan.

G. Metode Analisis data.

Secara umum, data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data diolah dengan metode *deskriptif*. Rakhmat menyebutkan analisis *deskriptif* bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta, atau karakteristik populasi tertentu, termasuk membuat perbandingan atau evaluasi (Rakhmat, 1991:23)

Secara terperinci dapat disebutkan, data produk berita dianalisis melalui analisis isi tekstual. Analisis dilakukan dengan menghitung jumlah, jenis, sumber informasi, jenis kelamin sumber informasi, keberpihakan, alasan keberpihakan, alasan ketidak

berpikirkan dan penempatan produk berita.

Sedangkan data proses produksi berita dianalisis melalui analisis wacana dan sosio kultural. Dalam hal ini analisis yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan perspektif gender.

H. Validitas dan Reliabilitas Penelitian

Validitas instrumen yang dikaji adalah validitas konstruk (construct validity). Kontruk adalah kerangka dari suatu konsep (Singarimbun, 1995:125). Cara yang ditempuh adalah menyesuaikan instrumen penelitian dengan cara :

1. Menelusuri kepustakaan mengenai konsep-konsep pokok tentang produk berita, kualitas berita.
2. Hasil-hasil penelitian dengan pendekatan gender yang telah dilakukan penelitian terdahulu. Dari hasil tersebut kemudian dirumuskan kerangka konsep dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

Bentuk uji statistik yang digunakan dalam penelitian adalah bagaimana mengukur reliabilitas atau tingkat kesepakatan antar pelaku koding. Dalam penelitian ini tingkat kesepakatan pelaku koding diukur dengan menggunakan koefisiensi kontingensi Pearson (C) untuk data berskala nominal, yaitu data yang terdiri dari suatu rangkaian frekuensi yang tidak berurutan dengan rumus sebagai berikut :

$$C = \frac{\sqrt{X^2}}{N + X^2}$$

Dimana : C = Koefisien Kontingensi Pearson's

X^2 = Chi kuadrat

N = Jumlah total sample

Indeks Reliabilitas (IR) : $IR = (1 - C) \times 100\%$

Pedoman korelasi antar pelaku koding :

Kurang 20%	: rendah sekali	
20% - 40%	: rendah , tetapi ada	
40% - 70%	: sedang	
70% - 90%	: tinggi	
90% - 100%	: sangat tinggi	(Surakhmat, 1983 ; 302)

Berdasarkan pengolahan serta analisis data yang telah dilakukan terhadap berita isu tentang kepemimpinan politik perempuan di dua harian umum *Kompas* dan *Rakyat Merdeka* terhadap 51 berita yang terdiri dari 621 paragraf, maka dapat diambil kesimpulan uji reliabilitas diantara pelaku koding yang dilakukan dengan menggunakan uji statistik Pearsan (C) berada pada rentang Indeks Reliabilitas 97,4% - 98,5% menunjukkan tingkat korelasi yang cukup tinggi. Maka hasil pengkodean

peneliti terhadap isi pesan di kedua surat kabar berdasarkan kategori yang dikonstruksi adalah valid.

I. Rancangan Analisis

Untuk menganalisa data yang aja maka digunakan uji statistik dengan menggunakan

Chi-square :

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_f - E_f)^2}{E_f}$$

Untuk mengetahui ukuran asosiasi digunakan koefisien Phi

$$\phi = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}}$$

Setelah diketahui koefisien Phi, untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variable tersebut dengan interpretasi hasil menggunakan tabel Guilford dengan kategori sebagai berikut :

< 0-.20	: Hubungan rendah, lemah sekali
0.20 - < 0.40	: Hubungan lemah tetapi pasti
0.40 - < 0.70	: Hubungan cukup berarti
0.70 – 0.90	: Hubungan tinggi/kuat
> 0.90	: Hubungan sangat tinggi, kuat sekali, dapat diandalkan.

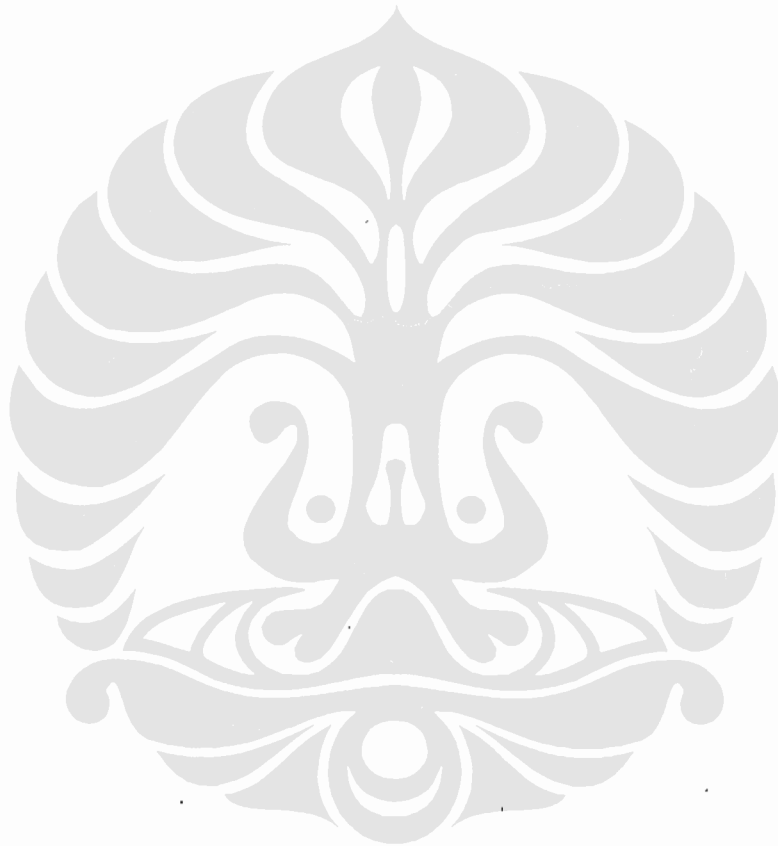
J. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Teoritik : Jenis kelamin berkorelasi positif dengan keberpihakan sumber berita terhadap kepemimpinan politik perempuan di media massa.
2. Hipotesis Statistik :
 - a. Sumber berita berkorelasi positif dengan keberpihakan terhadap kepemimpinan perempuan.
 - b. Sumber berita berkorelasi positif dengan alasan keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan.
 - c. Sumber berita berkorelasi positif dengan alasan ketidak berpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan.
 - d. Jenis kelamin sumber berita berkorelasi positif dengan keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan.
 - e. Jenis kelamin sumber berita berkorelasi positif dengan alasan keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan.
 - f. Jenis kelamin sumber berita berkorelasi positif dengan alasan ketidak berpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan.

K. Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian

Orientasi informasi sukar dipisahkan antara informasi yang berorientasi sosial dengan yang berorientasi psikologis. Orientasi informasi yang ada di media massa belum tentu sesuai dengan realitas sosial dalam masyarakat.

Proses produksi berita tidak dapat dihayati hanya dengan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan interview guide. Proses sebuah kegiatan dalam sebuah lembaga lebih tepat diamati melalui pengamatan terlibat (*observasi partisipatif*), sehingga setiap tahap dapat dicatat dan diamati secara mendalam.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik dan Kualitas Produk Berita

Berikut ini akan dideskripsikan tentang obyek yang diamati, seperti telah dibahas dalam bab II yaitu meliputi karakteristik produk dan orientasi informasi/keberpihakan terhadap isu/kontroversi kepemimpinan politik perempuan. yang dibahas dalam penelitian ini adalah berita. Obyek yang diamati adalah berita mengenai isu kepemimpinan politik perempuan. Sesuai dengan isu yang ada, maka dapat dikemukakan bahwa, dari seluruh sampel sebanyak 51 buah berita/artikel yang memuat isu kepemimpinan politik perempuan tersebut kemudian akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Untuk *harian umum Kompas*, ada 27 buah berita, masing-masing 3 buah berita biasa yang ditempatkan di halaman muka (5,9%) yaitu (1) Inkontitusional tolak perempuan jadi presiden (2) Upaya menjaga ketentraman (3) Ulama NU dukung presiden wanita. Enam buah berita utama yang tidak ditempatkan di halaman muka (11,8%), yaitu : (1) PWNU Jatim : cap jempol darah tidak perlu (2) Negara menghambat hak politik perempuan (3) Wanita PDI Perjuangan : kelompok “status quo” ganjal peran wanita (4) Debat sengit warnai penentuan UG MPR. (5) Mayoritas ulama NU setuju wanita jadi presiden (6) NU perlu perempuan kiai. 18 buah berita biasa bukan dihalaman satu (35,3%). Dari seluruh berita tersebut tidak ada yang

ditempatkan dihalaman muka dan menjadi berita utama. (judul berita secara lengkap lihat lampiran)

Sedangkan di harian umum *Rakyat Merdeka*, ada 24 buah berita, juga tidak ada yang menjadi berita utama. Sebaran berita masing masing 3 buah berita biasa di halaman 1 (5,9%), yaitu : (1) Mereka menolak presiden perempuan (2) Benazir minta Mega diijinkan jadi presiden (3) Gus Dur : Perempuan bisa wajib jadi presiden. Dua belas buah berita utama yang ditempatkan bukan di halaman 1 (23,4%), antara lain : (1) PPP juga menolak Capres perempuan (2) Mega diminta tak ngotot jadi presiden (3) Gerah melihat kondisi politik : Kiai se Jawa dan Bali menolak chaos. (4) Amerika tak akan obok-obok Mega (5) Ulama ingin ngemong dan ngomong pada Mega (6) Kualitas caleg perempuan masih samar (7) Akan bertemu dengan PDI Perjuangan : Hamzah Bawa fatwa penolakan capres wanita ke Wiranto (8) Jangan diam terus : sudah waktunya si mbak turun gunung (9) Para kiai dukung capres wanita (10) Capres perempuan gairahkan masyarakat madani (11) Khofifah : Gus Dur muncul untuk meredam konflik (12) Debra H. Yatim akui perempuan sulit menjadi oposisi. 9 buah berita biasa dihalaman bukan satu (17,7).

Jadi jumlah dan total sample sebanyak 51 berita, artikel biasa halaman 1 sebanyak 6 (11,8%), head line non satu 18 (35,2) dan artikel biasa non 1 sebanyak 27 (53,0%). (judul selengkapnya lihat lampiran) . Sebaran berita selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1. : Sebaran Berita

Media Sebaran Berita	HU Kompas		HU Rakyat Merdeka		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%
Headline/Laporan Utama – 1	-	-	-	-	-	-
Berita/Artikel Biasa – 1	3	5,9	3	5,9	6	11,8
Headline/Laporan Utama-Non1	6	11,8	12	23,4	18	35,2
Berita/Artikel Biasa – Non 1	18	35,3	9	17,7	27	53,0
Jumlah	27	53,0	24	47,0	51	100,0

Ditinjau dari sebaran berita maupun tulisan dalam kedua media massa nasional tersebut tampak bahwa isu kepemimpinan perempuan belum menjadi berita utama yang menghiasi media tersebut. Padahal waktu yang dipilih merupakan momentum yang tepat melalui Pemilu dan sidang umum MPR, sehingga dapat dibayangkan jika tidak ada momentum tersebut, maka berita mengenai kepemimpinan politik perempuan akan terabaikan.

Dilihat dari frekwensi pemuatan berita, dapat dikatakan bahwa isu kepemimpinan politik perempuan di media massa bergulir seiring dengan penetapan pemimpin politik nasional. Setelah penetapan pemimpin politik nasional berakhir maka isu kepemimpinan politik perempuanpun tidak terangkat lagi di media massa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah berita setiap bulannya untuk dua media tersebut. Bulan Juni 8, bulan Juli 27, bulan Agustus 9, bulan September 4, bulan November 3.

Sementara jumlah paragraf yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini seluruhnya adalah 621 paragraf, masing-masing 289 paragraf untuk harian umum *Kompas*, 322 paragraf untuk harian umum *Rakyat Merdeka*. Di sini terlihat bahwa *Kompas* hanya menurunkan berita yang kecil/singkat terhadap isu kepemimpinan politik perempuan. Dari jumlah artikel *Kompas* 27 artikel terdiri dari 289 paragraf, *Rakyat Merdeka* 24 artikel terdiri dari 289 paragraf.

B. Orientasi Informasi/keberpihakan

1. Sifat Keberpihakan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab III, orientasi informasi merupakan tujuan dari suatu informasi. Kecenderungan suatu berita/ jenis keberpihakan meliputi : (1) berpihak, (2) netral dan (3) menentang.

Untuk kecenderungan pemihakan isi pesan, harian umum *Kompas*, harian umum *Rakyat Merdeka*, tertinggi adalah kategori Netral, masing-masing 181 paragraf (29,1%) untuk harian umum *Kompas*, 225 paragraf (36,2%) untuk harian umum *Rakyat Merdeka*. Sikap netral terhadap kepemimpinan politik perempuan tersebut dapat dilihat dari paragraf yang ada yaitu :

Peran dan kepemimpinan wanita telah terbukti sangat besar dan dimana-mana dalam sejarah dunia. Namun dalam konteks masyarakat Indonesia, dengan segala dayanya, elite politik dan masyarakat pro-Status quo ternyata telah menggajal kehadiran kaum perempuan di gelanggang pemilihan presiden dengan isu gender, kualitas ilmu, kapasitas, kapabilitas dan isu-isu agama. (Kompas, 12 Juli 1999).

Sementara paragraf mendukung sebanyak 92 paragraf (14,8%) untuk harian umum *Kompas*, harian umum *Rakyat Merdeka* mendukung 88 paragraf (14,2%). Dukungan terhadap kepemimpinan politik perempuan itu dapat dilihat dari paragraf yang ada yaitu :

Presiden BJ. Habibie menegaskan, sekarang bukan pada tempatnya lagi memandang wanita dengan bias gender Dalam arti menganggap bahwa tempat wanita hanya dirumah, atau pendamping suami.

Pandangan demikian bertentangan dengan kodrat penciptaan manusia, yang membedakan manusia bukan jenis kelamimya, melainkan tingkat ketaqwaannya dan kemampuan pribadinya untuk berbuat bagi masyarakat dan bangsa. (Kompas 29 Juni 1999).

Dari dua media tersebut, harian umum *Rakyat Merdeka* ternyata memuat kategori Paragraf menentang tertinggi sebanyak 19 paragraf (3,1%). Harian umum *Kompas* memuat 16 paragraf menentang (2,6%). Paragraf menentang terhadap kepemimpinan politik perempuan tersebut dapat dilihat dari :

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Jakarta, kemarin menghasilkan pernyataan politik kontroversial, yakni menolak perempuan menjadi presiden.

Partai berlambang Ka"bah tersebut berpendapat, yang layak menjadi presiden keempat RI hanyalah seorang putra terbaik bangsa dan harus beragama Islam.

Pemimpin nasional haruslah seorang putra terbaik bangsa yang beragama Islam, sekali lagi kami tegaskan putra, tandas Ketua DPP Tosari Widjaya didampingi ketua Umum PPP Hamzah Haz dalam konferensi pers pernyataan politik Rapimnas II PPP. (Rakyat Merdeka, 16 Juni 1999).

Ditinjau dari kecenderungan sifat pemihakan isi pesan dari dua media massa tersebut, dapat disimpulkan bahwa berita maupun artikel yang memuat isu kepemimpinan perempuan di bidang politik hanyalah bersifat informatif atau netral saja. Dukungan media atas isu kepemimpinan politik perempuan masih terbagi, hal ini terlihat dalam pola pemihakan isi pesan yang cenderung mengambil jalan tengah, yaitu netral atau informatif. Dukungan terhadap kepemimpinan politik perempuan masih relatif kecil (29%). Dukungan tersebut cukup membanggakan karena jumlah menentang terhadap kepemimpinan politik perempuan hanya 5,6%.

Kecenderungan jenis keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2. Sifat Keberpihakan

Media Kategori	Kompas		R. Merdeka		Jumlah	
	F	%	f	%	f	%
1. Mendukung	92	14,8	88	14,2	180	29,0
2. Netral	181	29,1	225	36,2	406	65,4
3. Menentang	16	2,6	19	3,1	35	5,6
Jumlah	289	46,5	332	53,5	621	100.0

Terdapat asosiasi antara surat kabar dan jenis keberpihakan seperti yang ditunjukkan oleh koefisien Chi-Square yang signifikan pada level 0.5. Perhitungan dengan Chi-Square diperoleh nilai 2,147, C table 5,99 berarti tidak ada hubungan keberpihakan antara *Kompas* dan *Rakyat Merdeka*.

2. Alasan Keberpihakan

Seperti dilihat dari hasil analisis dari sifat keberpihakan dukungan terhadap kepemimpinan politik perempuan masih terbagi-bagi sesuai dengan orientasi informasi meliputi berpihak, netral dan menentang. Dukungan terhadap kepemimpinan politik perempuan terbagi lagi dengan berbagai alasan yaitu : agama, budaya/tradisi, intelektual, fisik dan lain-lain. Dukungan terbanyak disebabkan karena intelektual/kemampuan perempuan untuk menjadi pemimpin tidak diragukan lagi. Selain itu dukungan terbanyak kedua adalah dari sisi agama.

Alasan terbesar dalam keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan adalah intelektual/kemampuan yaitu 38 (21,1%), untuk harian umum *Kompas*, *Rakyat Merdeka* 24 (13,3%). Alasan kemampuan/intelektual keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan dapat dilihat dari paragraf berikut ini :

Di Yogyakarta, Ketua Umum PKB Matori Abdul Djalil dan Ketua PP Muhammadiyah Prof.Dr. Syafii Maarif sama-sama berpendapat bahwa tidak ada masalah jika kepemimpinan nasional dipegang oleh perempuan. Bahkan Menteri Agama Malik Fajar mengingatkan , tata tertib dan undang-undang sama sekali tidak memepersoalkan gender.

Prof.Dr. Syafii Maarif yang ditemui wartawan hari minggu menyatakan "kami tidak memepersoalkan masalah gender. Yang kita permasalahan adalah kualitas, kapabilitas dan visi ke depan. Tidak ada masalah kepemimpinan wanita dipersoalkan. (Kompas 19 Juli 1999).

Alasan keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan terendah untuk harian umum *Kompas* adalah alasan Budaya 4 (2,2%), untuk harian umum *Rakyat*

Merdeka 10 (5,6%). Alasan budaya yang dipergunkan untuk menentang terhadap kepemimpinan politik perempuan dapat dilihat dari paragraf berikut :

Nursyahbani menambahkan dari sudut budaya dan secara historis sebenarnya tidak pernah ada penolakan bagi pemimpin wanita. "Zaman dulu di bumi Nusantara ini juga ada wanita yang menjadi raja.

Gunarijah kartasasmita yakin budaya Indonesia menerima kepemimpinan wanita. Menurutnya, tradisi usang yang menolak perempuan tampil menjadi pemimpin sudah banyak berubah menjelang melenium ketiga ini. (Rakyat Merdeka, 5 September 1999).

Alasan keberpihakan terendah untuk harian umum *Rakyat Merdeka* adalah alasan fisik 9 (5%), *Kompas* 8 (4,4%). Alasan fisik yang menentang terhadap kepemimpinan politik perempuan dapat dilihat dari paragraf sebagai berikut :

Said menyebutkan, darah pertama yang membela nama Islam adalah darah Ssumayah, Ibu dari pejuang Islam Amir bin Yasir. Jadi kekuatan dan peran wanita tak perlu diragukan (Kompas, 30 Agustus 1999)

Kemampuan fisik perempuan sebenarnya tidak perlu diragukan, karena pada waktu Indonesia berjuang melawan penjajah kita mengenal Tjut Nyak Dien, Christina Martha Tiahohu.

Sementara alasan keberpihakan adalah lain-lain untuk harian umum *Rakyat Merdeka* sebesar 25 (13,9), *Kompas* 10 (5,6%). Alasan lain-lain misalnya menurut peraturan/hukum atau tidak memberikan alasan sama sekali. Alasan lain-lain yang digunakan untuk menentang kepemimpinan politik perempuan dapat dilihat dari

paragraf yang dimuat media yaitu :

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1975 telah mencanangkan dasa warsa perempuan untuk pembangunan, keselarasan perempuan dan laki-laki serta perdamaian (development, equality and peace). Jadi bagi APPI, keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan terus berkepanjangan dan era reformasi inilah saatnya seluruh masyarakat Indonesia, baik perempuan maupun lelaki, saling menghargai dan mendukung, serta memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memimpin bangsa ini. Apalagi pada UU No.7/1984 secara tegas telah diratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Mereka yang menyatakan perempuan tidak dapat menjadi pemimpin bangsa Indonesia telah bersikap inskontitusional. Persamaan hak antara perempuan dan laki-laki sebagai warga negara dihadapan hukum dan pemerintah dilindungi UUD 1945 pasal 27. (Kompas, 28 Juni 2000).

Alasan keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3. Alasan Keberpihakan

Media Alasan Keberpihakan	Kompas		Rakyat Merdeka		Jumlah	
	F	%	f	%	f	%
1. Agama	32	17,8	20	11,1	52	28,9
2. Budaya/Tradisi	4	2,2	10	5,6	14	7,8
3. Intelektual	38	21,1	24	13,3	62	34,4
4. Fisik	8	4,4	9	5,0	17	9,4
5. Lain-lain	10	5,6	25	13,9	35	19,4
J u m l a h	92	51,1	88	48,9	170	100.0

Alasan menolak kepemimpinan perempuan juga dari alasan budaya. Alasan budaya *Kompas* (5,7%), *Rakyat Merdeka* (2,9%). Menentang kepemimpinan politik perempuan dengan alasan budaya dapat dilihat dari paragraf sebagai berikut :

Keputusan Munas ditetapkan tugas masing-masing laki-laki dan perempuan. Tugas perempuan antara lain meneruskan generasi, merawat anak, rumah tangga dan sebagainya. Sedang laki-laki bertugas membuat rumah, mencari uang untuk hidup dan sebagainya. (Rakyat Merdeka, 27 Juni 1999).

Disini jelas penekanan terhadap peran perempuan yang hanya berkisar urusan domestik (sekitar dapur dan rumah tangga). Semua urusan publik dipegang oleh laki-laki.

Untuk harian umum *Kompas* menolak alasan intelektual/kemampuan 6 (17,1%), *Rakyat Merdeka* 3 (2,9%). Menentang kepemimpinan politik perempuan dengan alasan intelektual dapat dilihat dari paragraf berikut :

.....Ketika disesak wartawan, apakah Achmad meragukan kemampuan perempuan. Dengan tegas menyatakan, saya tidak menilai. Ibarat Sphinx yang terdapat di Mesir, tidak pernah tersengar suaranya sehingga tak tahu isinya. Kemampuan perempuan jadi pemimpin belum teruji karena tidak pernah terlihat kiprahnya dan terdengar suaranya (Kompas, 11 Juli 1999.)

Sementara untuk harian umum *Rakyat Merdeka* alasan fisik tidak ada dan *Kompas* (2,5%). Menolak kepemimpinan politik perempuan dengan alasan fisik dapat dilihat dari paragraf berikut ini :

Khalifah/Imamah, kata Nadhif, tidak hanya berfungsi sebagai sebagai kepala negara tetapi sekaligus penyelenggara syariat islam. Presiden/Lembaga Kepresidenan apa mungkin bertugas seperti itu. Mengurus negara saja sudah

rumit. Dilihat dari kemampuan secara fisik hal itu tidak dapat dilakukan perempuan (Kompas, 30 Agustus 1999)

Sementara harian umum *Kompas* alasan lain-lain tidak ada, *Rakyat Merdeka* 1 (2,9%).

Menolak kepemimpinan politik perempuan berdasarkan alasan diluar empat alasan yang ada yaitu agama, budaya/tradisi, intelektual dan fisik, dapat dilihat dari paragraf berikut ini :

.....Masalah perempuan sebagai orang nomor dua terlihat di Muhtamar NU. Di situ dipertentangkan bahwa perempuan tidak boleh masuk di jalur kepemimpinan pengurus. Perempuan cukup di fatayat saja (Rakyat Merdeka, 27 Nopember 1999)

Alasan ketidak berpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 4 : Alasan Ketidak Berpihakan

Media Alasan Ketidak Berpihakan	Kompas		Rakyat Merdeka		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%
1. Agama	6	17,1	14	40,0	20	57,1
2. Budaya /Tradisi	2	5,7	1	2,9	3	8,6
3. Intelektual	6	17,1	3	8,6	9	25,7
4. Fisik	2	5,7	-	-	2	5,7
5. Lain-lain	-	-	1	2,9	1	2,9
J u m l a h	16	45,7	19	54,3	35	100.0

Terdapat asosiasi antara surat kabar dan alasan ketidak berpihakan seperti yang ditunjukkan oleh koefisien Chi-Square yang signifikan pada level 0,5. Perhitungan test dengan Chi-Square diperoleh hasil 7,330, C tabel 9,49 berarti tidak ada hubungan alasan ketidak berpihakan antara *Kompas* dan *Rakyat Merdeka*. Sementara tingkat C signifikan adalah 0,119 maka tidak ada hubungan yang signifikan alasan ketidak keberpihakan antara *Kompas* dan *Rakyat Merdeka*.

C. Sumber Berita

1. Jenis Sumber Berita

Sumber berita meliputi berokrat yang memiliki posisi sentral karena kedudukannya sebagai wadah aspirasi masyarakat. Intelektual merupakan sumber informasi yang mewakili kalangan akademisi dan intelektual. Aktivis ormas/LSM merupakan sumber informasi yang mewakili kalangan *grass-roots*. Aktivis partai politik merupakan sumber informasi/komunikator politik terutama yang menyangkut propaganda politik. Pelaku adalah pemimpin politik nasional baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sumber lain disini merupakan sumber yang tidak terdapat dalam kelompok tersebut dan sumber lain-lain didominasi oleh wartawan.

Sumber berita berpengaruh terhadap isi, bahkan dapat menentukan kemantapan suatu berita. Meskipun telah dikemukakan pada Bab II, bahwa birokrat memiliki posisi sentral dalam komunikasi politik namun disini sumber berita birokrat justru paling kecil Bahkan harian umum *Rakyat Merdeka* tidak ada sumber berita birokrat, hal ini terkait

dengan posisi *Rakyat Merdeka* sebagai koran oposisi, berfungsi sebagai pengkritik sementara birokrat adalah salah satu yang harus dikritik. Sumber Birokrat sebanyak 6 paragraf (1,0%) untuk harian umum *Kompas*. Sumber birokrat antara lain Dr. Murdah Mulia Kepala Balai Penelitian Agama Departemen Agama.

Hasil koding menunjukkan bahwa kecenderungan sumber berita di *harian umum Kompas* tertinggi adalah Aktivis Ormas/LSM sebanyak 118 paragraf (19,0%) Untuk kategori yang sama di harian umum *Rakyat Merdeka*, tertinggi juga Aktivis Ormas/LSM sebanyak 100 paragraf (16,1%). Sumber LSM dan Ormas antara lain ; (1) Ilyas Ruchiyat, ulama NU, (2) H. Sjalus Maffudz, ulama (3) Nursyahbani Katja Sungkana, LBH APIK (4) Debra Yatim, kwalisi perempuan. (5) Achmad Tirto Sudiro Ketua ICMI dan sebagainya.

Yang sangat disayangkan, intelektual tidak bersuara nyaring dalam isu kepemimpinan politik perempuan. Sumber intelektual *Kompas* 23 (3,7%), sedangkan *Rakyat Merdeka* 52 (8,4%). Sumber intelektual antara lain : (1) Cornelis Laya, pakar politik Universitas Gajah Mada, (2) AS. Hikam, peneliti LIPI, (3) Hermawan Sulistyio, pengamat politik, (4) Ismail Suny, pakar politik, (5) Prof. Amin Suma, Dekan IAIN Jakarta dan sebagainya.

Kategori sumber berita yang cukup berperan adalah aktivis partai politik. Sumber aktivis parpol *Kompas* 34 (5,5%), *Rakyat Merdeka* 55 (8,(%). Sumber aktivis partai politik antara lain; (1) Tosary Wijaya,PPP (2) Hamzah Haz, PPP (3) Sri Adiyanti Sutarjo, PDIP, (4) Megawati, PDIP (5) Amien Rais, PAN, (6) Alwi Shihab,

PKB, (7) Gunarijah Kartasasmita, Golkar dan sebagainya.

Pelaku adalah pemimpin politik baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. *Kompas* sumber berita pelaku sebanyak 28 (4,5%), *Rakyat Merdeka* 30 (4,8%). Sumber pelaku antara lain : (1) B.J. Habibie, Presiden (2) Malik Fajar, Menteri Agama.

Kategori lain yang cukup tinggi adalah Sumber Lain, masing-masing 80 paragraf (12,9%) di harian umum *Kompas* dan 95 paragraf (15,3%) di harian umu *Rakyat Merdeka*. Beberapa sumber berita yang dimasukkan dalam kategori ini antara lain para wartawan, atau sumber lain yang tidak disebutkan namanya.

Sumber berita kepemimpinan politik perempuan *Kompas* dan *Rakyat Merdeka* dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5. Sumber Berita

Media Sumber Berita	Kompas		R. Merdeka		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%
1. Birokrat	6	1,0	-	-	6	1,0
2. Intelektual	23	3,7	52	8,4	75	12,1
3. Aktivis Ormas/LSM	118	19,0	100	16,1	218	35,1
4. Aktivis Parpol	34	5,5	55	8,9	89	14,3
5. Pelaku	28	4,5	30	4,8	58	9,3
6. Sumber Lain	80	12,9	95	15,3	175	28,2
Jumlah	289	46,5	332	53,5	621	100,0

Terdapat asosiasi antara surat kabar dengan sumber berita seperti yang ditunjukkan oleh koefisien Chi-Square yang signifikan pada level 0,5. Perhitungan test dengan Chi-Square diperoleh hasil 11,655, C tabel 3,84 berarti ada hubungan sumber

berita antara *Kompas* dan *Rakyat Merdeka*. Sementara tingkat C signifikan adalah 0 maka ada hubungan yang signifikan sumber berita *Kompas* dan *Rakyat Merdeka*.

2. Jenis Kelamin Sumber Berita

Seperti telah telah dikemukakan dalam Bab III , perempuan belum banyak mengambil peran di media massa. Perempuan lebih banyak menjadi obyek suatu berita dari pada sumber berita. Karena kecenderungan sebagai obyek berita tersebut maka sering terjadi bias gender di media massa.

Jenis kelamin sumber berita didominasi oleh laki-laki, sumber berita perempuan untuk *kompas* 47 (7,6%). untuk harian *Rakyat Merdeka* 92 (14,8%). Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa sumber berita perempuan kurang sari 25%. Sumber berita perempuan cukup bervariasi hanya berikrat yang tidak ada. Sumber berita perempuan antara lain; (1) Debra Yatim aktivis LSM, (2) Ratna Sarumpait aktivis LSM, (3) Rita Serena Kalibonso, aktivis LSM, (4) Sinta Nuriah, aktivis LSM, (5) Khofifah, aktivis PKB (6) Gunarijah Kartasmita aktivis Partai Golkar, (7) Sri Adiyanti Sutarjo, Aktivis PDIP, (8) Megawati, aktivis PDIP, Nursyahbani Katjasungkana, aktivis LSM.

Sumber berita laki-laki antara lain : (1) Musdah Mulia Dirjen Agama/birokrat. (2) Hermawan Sulisty, pengamat politik, (3) AS. Hikam, Peneliti (4) Ismail Sunny, Pakar Poltik (5) Prof. Amin Sunua. Dekan IAIN. (6) Gus Dur, aktivis Ormas (7) Hasyim Muzadi, Ulama (8) Tosary Wijaya, aktivis PPP (9) Matori Abdul Djilil, aktivis PKB (10) Amien Rais, ketua PAN, (11) Hamzah Haz, Ketua PPP. (12) Pelaku pimpinan

politik B.J. Habibie, Presiden, (13) Malik Fajar, Menteri Agama. Sumber lain adalah wartawan yang didominasi laki-laki. Bahkan sumber berita lain-lain yang didominasi oleh wartawan, perempuan masih sangat sedikit hanya 1%. Ini menandakan bahwa dunia media adalah dunia patriaki karena yang berkecimpung didalamnya didominasi laki-laki.

Disini terlihat bahwa perempuan memang masih belum memegang peranan penting dalam kehidupan publik. Kecenderungan jenis kelamin sumber berita dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 6 : Jenis Kelamin Sumber Berita

Media Jenis Kelamin sumber	Kompas		Rakyat Merdeka		Jumlah	
	F	%	f	%	f	%
1. Perempuan	47	7,6	92	14,8	139	22,4
2. Laki-laki	242	39,0	240	38,6	482	77,6
J U M L A H	289	46,5	332	53,5	621	100.0

Terdapat asosiasi antara surat kabar dengan jenis kelamin sumber berita seperti yang ditunjukkan oleh koefisien Chi-Square yang signifikan pada level 0,5. Perhitungan test dengan Chi-Square diperoleh hasil 2,147, C table 5,99 berarti ada hubungan jenis kelamin sumber berita *Kompas* dan *Rakyat Merdeka*. Sementara tingkat C signifikan adalah 0.01, maka ada hubungan yang signifikan jenis kelamin sumber berita *Kompas* dan *Rakyat Merdeka*.

D. Uji variabel

Untuk uji variabel disajikan tabulasi silang antar variabel yang diuji. Sementara untuk mengetahui hubungan antar variable akan digunakan analisis Chi-Square. Untuk mengetahui ukuran asosiasi digunakan koefisien Phi.

1. Variabel Sumber Berita dan Jenis Kelamin

Berikut disajikan gambaran tabulasi silang antara sumber berita dengan jenis kelamin sumber berita. Di sini secara jelas terlihat dari seluruh sumber berita yang ada, lebih banyak didominasi laki-laki.

Tabel 7 : Tabulasi Silang antara Sumber Berita dengan Jenis Kelamin

Jenis kelamin Sumber Berita	Perempuan		Laki-laki		Jumlah	
	F	%	F	%	f	%
Birokrat	-	-	6	1,0	6	1,0
Intelektual	8	1,3	67	10,8	75	12,1
Aktivis Ormas/LSM	69	11,1	149	23,9	218	35,0
Aktivis Parpol	11	1,8	78	12,6	89	14,4
Pelaku	45	7,2	13	2,1	58	9,3
Sumber lain	6	1,0	169	27,2	175	28,2
Jumlah	139	22,4	482	77,6	621	100

Terdapat asosiasi antara sumber berita dengan jenis kelamin sumber berita seperti yang ditunjukkan oleh koefisien Chi-Square yang signifikan pada level 0,5.

Perhitungan Chi-Square diperoleh hasil 165,5, C table 11,07 berarti ada hubungan antara sumber berita dengan jenis kelamin sumber. Sementara C signifikan 0, maka ada hubungan yang signifikan antara sumber berita dengan jenis kelamin sumber. Koefisien Phi sebesar 0,51, maka tingkat hubungan antara sumber berita dan jenis kelamin sumber cukup berarti.

2. Variabel Sumber Berita dengan Jenis Keberpihakan

Sumber berita berpengaruh terhadap terhadap jenis keberpihakan/kecenderungan suatu berita. Tabel sumber berita dan jenis keberpihakan dapat dilihat berikut ini :

Tabel 8: Tabulasi Silang antara Sumber Berita dengan Jenis Keberpihakan

Keberpihakan Sumber	Mendukung		Netral		Menentang		Jumlah	
	f	%	F	%	f	%	f	%
Birokrat	4	0,6	2	0,3	-	-	6	1,0
Intelektual	23	3,7	48	7,7	4	0,6	75	12,0
Aktivis Ormas/LSM	78	12,6	129	20,7	11	1,7	218	35,1
Aktivis Parpol	20	3,2	63	10,1	6	1,0	89	14,3
Pelaku	18	2,9	40	6,4	-	-	58	9,3
Sumber lain	37	6,0	124	20,1	14	2,2	175	28,3
Jumlah	180	29,0	406	65,4	35	5,6	621	100

Keberpihakan sumber berita terhadap kepemimpinan politik perempuan hanya mencapai 29%. Orientasi informasi sumber berita cenderung netral yaitu mencapai

Perhitungan Chi-Square diperoleh hasil 165,5, C table 11,07 berarti ada hubungan antara sumber berita dengan jenis kelamin sumber. Sementara C signifikan 0, maka ada hubungan yang signifikan antara sumber berita dengan jenis kelamin sumber. Koefisien Phi sebesar 0,51, maka tingkat hubungan antara sumber berita dan jenis kelamin sumber cukup berarti.

2. Variabel Sumber Berita dengan Jenis Keberpihakan

Sumber berita berpengaruh terhadap terhadap jenis keberpihakan/kecenderungan suatu berita. Tabel sumber berita dan jenis keberpihakan dapat dilihat berikut ini :

Tabel 8: Tabulasi Silang antara Sumber Berita dengan Jenis Keberpihakan

Keberpihakan Sumber	Mendukung		Netral		Menentang		Jumlah	
	f	%	F	%	f	%	f	%
Birokrat	4	0,6	2	0,3	-	-	6	1,0
Intelektual	23	3,7	48	7,7	4	0,6	75	12,0
Aktivis Ormas/LSM	78	12,6	129	20,7	11	1,7	218	35,1
Aktivis Parpol	20	3,2	63	10,1	6	1,0	89	14,3
Pelaku	18	2,9	40	6,4	-	-	58	9,3
Sumber lain	37	6,0	124	20,1	14	2,2	175	28,3
Jumlah	180	29,0	406	65,4	35	5,6	621	100

Keberpihakan sumber berita terhadap kepemimpinan politik perempuan hanya mencapai 29%. Orientasi informasi sumber berita cenderung netral yaitu mencapai

65,4%. Namun gambaran tersebut masih cukup menggembirakan karena sumber berita yang menentang terhadap kepemimpinan politik perempuan hanya 5,6%.

Terdapat asosiasi antara sumber berita dengan jenis keberpihakan seperti yang telah ditunjukkan oleh koefisien Chi-Square yang signifikan pada level 0,5. Perhitungan test dengan menggunakan Chi-Square hasilnya 20,830, C tabel 18,31. berarti ada hubungan antara sumber berita dengan keberpihakan. Sementara C signifikan 0.022 maka ada hubungan yang signifikan antara sumber berita dengan keberpihakan. Koefisien Phi sebesar 0,183, maka tingkat hubungan variable sumber berita dan keberpihakan tersebut lemah sekali.

3. Variabel Sumber Berita dan Alasan Keberpihakan

Sumber berita mempengaruhi alasan keberpihakan. Alasan keberpihakan paling tinggi adalah intelektual 34,4%, berarti perempuan dipandang bisa menjadi pemimpin asal memiliki kemampuan. Alasan kedua adalah agama 28,9%, disini dari sisi agama menunjukkan bahwa agama tidak melarang perempuan menjadi pemimpin. Alasan terendah adalah budaya 14 (7,8%), yang berarti budaya tidak mempersoalkan pemimpin politik perempuan. Alasan yang cukup besar adalah lain-lain yaitu sebanyak 35 (19,4%).

Alasan keberpihakan cukup beragam ini bisa dilihat alasan yang dipakai selain agama dan intelektual adalah budaya/tradisi 14 (7,8%), fisik 17 (9,4%) dan lain-lain 35 (19,4%) yang cukup dominan, alasan lain-lain adalah diluar empat alasan yang ada

yang biasanya berpegang pada peraturan atau undang-undang yang tidak menentang terhadap kepemimpinan politik perempuan, termasuk dalam UUD 1945. Atau sumber berita tidak memberikan alasan sama sekali.

Tabel antara sumber beita dengan alasan keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan dapat dilihat berikut ini :

Tabel 9. Tabulasi silang antara sumber berita dengan alasan keberpihakan

Alasan Keber- Pihakan Sumber berita	Agama		Budaya/ Tradisi		Intelek- tual		Fisik		Lain-lain		Total	
	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%	f	%
Birokrat	4	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2,2
Intelektual	4	2,2	1	0,6	12	6,7	1	0,5	5	2,8	23	12,2
Aktivis Ormas/LSM	29	16,1	7	3,9	25	13,8	6	3,3	11	6,1	78	43,3
Aktivis Parpol	4	2,2	1	0,6	5	2,8	3	1,6	7	3,8	20	11,1
Pelaku	2	1,1	2	1,1	11	6,1	1	0,5	2	1,1	18	10,0
Sumber lain	9	5,0	3	1,6	9	5,0	6	3,3	10	5,6	37	20,5
Jumlah	52	28,9	14	7,8	62	34,4	17	9,4	35	19,4	180	100

Terdapat asosiasi antara sumber berita dengan alasan keberpihakan yang ditunjukkan oleh koefisien Chi-Square yang signifikan pada level 0,5. Perhitungan statistik dengan menggunakan Chi-Square hasilnya 33,110, C tabel 31,41. berarti ada hubungan antara sumber berita dengan alasan keberpihakan. Sementara tingkat C signifikan adalah 0,033, maka ada hubungan yang signifikan antara sumber berita dengan alasan keberpihakan. Koefisien Phi sebesar 0,429, berarti tingkat hubungan

antara sumber berita dengan alasan keberpihakan lemah tapi pasti.

4. Variabel Sumber Berita dan Alasan Ketidak Berpihakan

Sumber berita berpengaruh terhadap alasan ketidak berpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan. Alasan terbesar ketidak berpihakan adalah agama 57,1%. Berarti agama selain dijadikan alasan untuk mendukung kepemimpinan politik perempuan sebaliknya alasan agama pula yang dijadikan alasan untuk menentang kepemimpinan politik perempuan. Alasan kedua adalah intelektual/kemampuan (25,7%), budaya/tradisi (8,6%), fisik 5,7, lain-lain (2,9) untuk sumber menentang lain-lain tidak memberikan alasan.

Tabel sumber berita dan ketidak berpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan dapat dilihat berikut ini :

Tabel 10 Tabulasi silang sumber berita dengan alasan ketidak keberpihakan

Alasan ketdk. Berpihakan Sumber berita	Agama		Budaya/ Tradisi		Intelektu al		Fisik		Lain-lain		Total	
	f	%	F	%	f	%	f	%	F	%	f	%
Birokrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelektual	3	8,6	-	-	1	2,9	-	-	-	-	4	11,5
Aktivis Ormas/LSM	6	17,1	1	2,9	4	11,4	-	-	-	-	11	31,4
Aktivis Parpol	6	17,1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17,1
Pelaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumber lain	5	14,2	2	5,7	4	11,4	2	5,7	1	2,9	14	40,0
Jumlah	20	57,1	3	8,6	9	25,7	2	5,7	1	2,9	35	100

Terdapat asosiasi antara sumber berita dengan alasan ketidak berpihakan yang ditunjukkan oleh koefisien Chi-Square yang signifikan pada level 0.5. Perhitungan statistik dengan menggunakan Chi-Square hasilnya 11,257, C table 21,03. berarti tidak ada hubungan antara sumber berita dengan alasan ketidak keberpihakan. Sementara tingkat C signifikan adalah 0,507, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara sumber berita dengan alasan ketidak keberpihakan.

5. Variabel Jenis Kelamin Sumber dengan Jenis Keberpihakan

Jenis kelamin sumber berita lebih didominasi laki-laki. Jenis kelamin perempuan hanya 139 (22,4%). Namun dari jenis kelamin sumber berita perempuan tersebut sebanyak 68 (48,9%). Berarti hampir separoh dari sumber berita perempuan mendukung kepemimpinan politik perempuan. Sementara sumber berita laki-laki sebanyak 482, mendukung sebanyak 112 (23,3%). Sumber berita laki-laki kurang dari 25% yang mendukung terhadap kepemimpinan politik perempuan. Sumber berita laki-laki lebih banyak mengambil sikap netral sebanyak (70,5%). Untuk prosentase menentang kepemimpinan politik perempuan laki-laki (6,2%), yang berarti lebih besar dalam jumlah maupun prosentase dibandingkan dengan sumber berita perempuan yaitu sebesar (3,2%). Jumlah tersebut masih cukup mengembirakan karena jumlah yang menentang terhadap kepemimpinan politik perempuan tidak lebih dari 7%.

Tabel jenis kelamin sumber dengan keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan dapat dilihat berikut ini :

Tabel 11. Tabulasi Silang Jenis Kelamin Sumber dengan Jenis Keberpihakan

Jenis Kelamin Sumber Keberpihakan	Perempuan		Laki-laki		Total
	F	%	f	%	f
Mendukung	68	48,9	112	23,3	180
Netral	66	47,5	340	70,5	406
Menentang	5	3,6	30	6,2	35
Jumlah	139	100	482	100	621

Terdapat asosiasi antara jenis kelamin sumber berita dengan jenis keberpihakan seperti yang ditunjukkan oleh koefisien Chi-Square yang signifikan pada level 0,5. Perhitungan statistik dengan menggunakan Chi-Square hasilnya 34,648, C tabel 5,99. berarti ada hubungan antara jenis kelamin sumber berita dengan keberpihakan. Sementara tingkat C signifikan adalah 0, maka ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin sumber berita dengan jenis keberpihakan. Koefisien Phi sebesar 0,429 berarti tingkat hubungan antara jenis kelamin sumber dengan keberpihakan cukup berarti.

6. Variabel Jenis Kelamin Sumber dengan Alasan Keberpihakan

Alasan keberpihakan terhadap kepemimpinan perempuan yang paling dominan sumber berita perempuan adalah intelektual/kemampuan (45,5%). Berarti perempuan tidak diragukan kemampuannya. Sementara sumber berita laki-laki alasan keberpihakan

lebih didominasi dengan alasan agama 41,9%. Alasan cukup besar lainnya adalah lain-lain (23,5%), lain-lain lebih banyak dikarenakan karena adanya peraturan atau undang-undang.

Tabel jenis kelamin sumber dengan alasan keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan dapat dilihat berikut ini :

Tabel 12. tabulasi silang Jenis kelamin sumber berita dengan alasan berpihakan.

Alasan Keberpihakan Jenis Kelamin Sumber	Perempuan		Laki-laki		Total F
	F	%	F	%	
Agama	5	7,4	47	41,9	52
Budaya/ Tradisi	8	11,8	6	5,4	14
Intelektual	31	45,5	31	27,7	62
Fisik	8	11,8	9	8,0	17
Lain-lain	16	23,5	19	17,0	35
Jumlah	68	100	112	100	180

Terdapat asosiasi antara jenis kelamin sumber dengan alasan keberpihakan yang ditunjukkan oleh koefisien Chi-Square yang signifikan pada level 0,5. Perhitungan statistik dengan menggunakan Chi-Square hasilnya 25,280 > C tabel 5,99 berarti ada hubungan antara jenis kelamin sumber berita dengan alasan keberpihakan. Sementara tingkat C signifikan adalah 0, maka ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin sumber berita dengan alasan keberpihakan. Koefisien Phi 0,375 berarti tingkat hubungan antara jenis kelamin sumber dengan keberpihakan lemah tetapi pasti.

7. Variabel Jenis Kelamin Sumber dengan Alasan Ketidak Berpihakan

Alasan yang dipakai oleh laki-laki untuk menentang kepemimpinan politik perempuan adalah agama yaitu sebesar (63,3%), alasan kedua adalah intelektual (20%). Sementara alasan yang digunakan sumber berita perempuan dalam menentang kepemimpinan politik perempuan adalah kemampuan atau intelektual (60%), sementara agama menjadi alasan kedua yaitu (20%).

Tabel jenis kelamin sumber dengan alasan ketidak berpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan dapat dilihat berikut ini :

Tabel 13. Tabulasi silang jenis kelamin sumber berita dengan alasan ketidak berpihakan.

Alasan ketdk. Keberpihakan Jenis Kelamin Sumber	Perempuan		Laki-laki		Total
	f	%	F	%	F
Agama	1	20,0	19	63,3	20
Budaya/ Tradisi	1	20,0	2	6,7	3
Intelektual	3	60,0	6	20,0	9
Fisik	-	-	2	6,7	2
Lain-lain	-	-	1	3,3	1
Jumlah	5	100	30	100	35

Terdapat asosiasi antara jenis kelamin sumber dengan alasan ketidak berpihakan seperti yang ditunjukkan oleh koefisien Chi-Square yang signifikan pada level 0,5. Perhitungan statistik dengan Chi-Square hasilnya 5,464 < C tabel 9,49 berarti tidak ada

hubungan antara jenis kelamin sumber berita dengan alasan ketidak keberpihakan. Sementara tingkat C signifikan adalah 0,243, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin sumber berita dengan alasan ketidak keberpihakan.

F. Proses Produksi Berita

1. Harian Umum *Kompas*

a. Umum

Kompas pertama kali terbit tanggal 28 Juni 1965 atas desakan Bung Karno. Desakan terhadap partai katolik ini muncul karena pada waktu itu hampir setiap partai politik memiliki koran sendiri untuk menyuarakan perjuangannya. Partai Katolik kemudian mendesak PK. Ojong dan Jakob Oetama untuk menerbitkannya. Meskipun awalnya *Kompas* mengemban misi partai Katolik, namun dalam perkembangannya *Kompas* menjadi nasionalis (Hill David, T : 36).

Awalnya *Kompas* hanya terdiri dari 4 halaman, kemudian menjadi 16 halaman sejak Juli 1986, *Kompas* dapat menambah halamannya menjadi 24 halaman. Seiring dengan perkembangan zaman dan melalui berbagai fase perjuangan, ditangan pendiri dan pengelolanya, *Kompas* bergerak dari tiras 7000, sempat dibredel dua minggu tahun 1978- sampai sekarang merajai tiras dengan rata-rata 500.000.

Rata-rata 500 ribu. Sebanyak 90 persen mendapatkan *Kompas* dengan berlangganan dan sisanya 10 persen eceran. Jika *Kompas* mengalami keterlambatan dalam percetakan jumlah 10 persen tersebut akan turun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 persen pasar pembaca *Kompas* ada dikawasan Jabotabek dengan tingkat delivery tinggi. Sisanya 20 persen luar jabotabek, baik untuk daerah-daerah maupun luar negeri dan biasanya akan sampai serta dibaca sore atau malam hari.

Segmen *Kompas* golongan menengah keatas, dengan SES A-B-C untuk tingkat pendidikan 52 persen pendidikan sarjana muda, sarjana dan pasca sarja, 16 persen mahasiswa dan 25 persen SLTA. Dilihat dari pekerjaan utama 55 persen pembaca *Kompas* adalah pegawai swasta dan pegawai negeri.

Visi *Kompas* berpartisipasi dalam membangun masyarakat Indonesia Baru, yaitu masyarakat dengan kemanusiaan yang trasendental, persatuan dalam perbedaan, menghormati individu dan masyarakat yang adil dan makmur.

Misi *Kompas* adalah menjadi nomor satu dalam semua aspek usaha, diantara usaha-usaha lain yang sejenis dan dalam kelas yang sama. Hal tersebut dicapai dengan melakukan etika usaha bersih dan melaksanakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain.

Nilai-nilai dasar yang dikembangkan di *Kompas* adalah menghormati individu (manusia adalah aset utama), profesionalisme dalam semua aspek usaha, kerjasama dan sinergi, integritas dan kejujuran.

b. Struktur Organisasi Redaksi *Kompas*

Individu sebagai *media workers* terlibat dalam *Routinitas* dan *conatraint* pada proses produksi berita. Dalam pekerjaan itu, individu-individu menjalankan

peran tetapi sesuai dengan spesialisasi-spesialisasi yang dituntut. Setiap peran punya kepentingan masing-masing dan kepentingan-kepentingan tersebut tentu saja berbeda. Karena sangat beragamnya peran dan kepentingan itu maka konflik mudah terjadi. Agar proses produksi berita dapat berjalan dengan lancar, maka perlu adanya penyalarsan untuk mengatur peran dan kepentingan tersebut. Salah satu caranya untuk menyuarakan adalah dengan menatanya dalam organisasi. Penataan stuktur organisasi *Komnas* sebagai berikut :

Struktur organisasi Kompas terdiri atas Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi, Wakil pimpinan Redaksi, Redaktur Pelaksana, Pemimpin Perusahaan, Bagian Humas, Sekretaris Redaksi, Litbang dan Kepala Biro serta wartawan. Dengan struktur semacam ini maka kegiatan Kompas dapat dibagi menjadi dua yaitu: yang bersifat policy dimiliki oleh jajaran pimpinan/manajemen dan yang bersifat operasional ditangani oleh Redaktur pelaksana dan reporter.

Dengan mendelegasikan tugas-tugasnya kepada Redaktur pelaksana maka pemimpin umum dapat memusatkan perhatian pada kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis seperti menulis tajuk rencana. Setruktur organisasi secara lengkap lihat lampiran (Bapak Taufik M).

c. Mekanisme Pemberitaan Kompas

Media massa mengumpulkan, membentuk dan menyebarkan informasi melalui rutinitas media. Rutinitas organisasi mempengaruhi isi media, diantaranya dengan adanya proses *gatekeeping* meliputi pemilihan dan pembentukan

informasi. Pekerjaan jurnalistik yang mengandalkan banyak orang meniscayakan mekanisme kerja yang rapi. Secara ringkas mekanisme kerja pemberitaan *Kompas* diatur sebagai berikut :

Setiap rubrik dikepalai oleh kepala rubrik yang membawahi sekitar lima reporter, dengan diawasi oleh redaktur/wartawan senior

Rapat rutin harian berlangsung dua kali, yaitu pukul 09.00, diikuti oleh semua kepala rubrik, berisi brainstorming tentang materi/isu yang akan diangkat dan penugasan. Pada prinsipnya penugasan bersifat rutin dan dilakukan oleh masing-masing rubrik.

Koordinator antar rubrik dilakukan melalui mekanisme rapat. Proses berita berjalan melalui enam langkah : Reporter lapangan memburu berita – editor menerima hasil- kepala rubrik memeriksa – hasil koordinasi melalui rapatsore pukul 17.00 – penyunting memeriksa – menjadi naskah akhir yang siap cetak.

Lalu sore pukul 17.00 diikuti semua kepala rubrik mendiskusikan hasil liputan yang didapat dan penetapan berita yang akan dijadikan headline. Pada peristiwa-khusus nasional dan internasional seperti sidang umum, pemilu dilakukan rapat tambahan pukul 22.00 diikuti editor dan reporter berisi pembagian tugas untuk esok hari.

Disamping itu redaktur pelaksana sewaktu-waktu masih memeriksa naskah akhir. Misalnya berita yang berbau SARA seperti terjadi pembantaian di Aceh, yang benar terjadi pembunuhan di Aceh. Ada pembakaran gereja dan masjid, yang benar adalah ada pengrusakan tempat ibadah. (Bapak. Taufik Miharja)

Di sini terlihat bahwa organisasi mempengaruhi isi media dengan adanya *gatekeeper* karena pekerjaan *gatekeeper* menyangkut pengambilan keputusan yang kompleks/rumit dengan banyak tingkatan/bagian. Maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan *gatekeeper* dilakukan oleh organisasi bukan lagi oleh perorangan, karena organisasi punya tujuan tertentu yang didalamnya ada peranan dan struktur serta kendali yang dijalankan.

d. Kebijakan Redaksional

Dari perspektif organisasi, redaksi sebagai pembuat berita dipengaruhi oleh bagian-bagian lain dalam organisasi. Bahkan pengaruh organisasi terhadap wartawan bisa mengubah kemampuannya menjelaskan masalah-masalah secara obyektif. Prinsip-prinsip yang diterapkan *Kompas* dalam kebijakan redaksional adalah sebagai berikut :

Prinsip Kompas dibaca oleh banyak dan karena itu harus memperhatikan kepentingan banyak orang di Indonesia. Mengingat berita bernilai adalah berita yang memiliki bobot jurnalistik dan itu adalah nilai-nilai berita (news values), maka Kompas mementingkan news value sebanyak mungkin dalam setiap item beritanya. Kebijakan pemberitaan ini berlaku pada semua berita atau peliputan; Dengan demikian pendapat orang sebagai individu diperbolehkan, sedangkan lembaga diatas mengatasi segala beda pendapat tersebut.

Kompas bersifat umum, sebagai jembatan masyarakat dengan pemerintah dan kelompok masyarakat sendiri. Kompas mengakomodasi ketiga pihak itu semuanya dan audience Kompas luas. Menurut pengalaman Kompas, berita iptek dan olahraga paling meningkatkan tiras, sebaliknya berita politik tidak menaikkan tiras. (Bapak. Budiman Tanuredja)

Secara umum standar obyektivitas adalah nilai-nilai berita yaitu (1) *Froximity*, (2) *Timeliness*, (3) *magnitude*, (4) *Prominence*, (5) *Human interest*, (6) *conflict*, (7) *Currency* (Mencher 1987 : 65). Obyektivitas yang diterapkan Kompas adalah :

Secara umum standar obyektivitas yang diterapkan Kompas adalah nilai berita (new values), yang amat lazim dikenal dalam jurnalistik. Jika menarik, faktual, kehangatan dan kelengkapan serta tidak boleh menyakiti (insulting)

Organisasi memiliki batasan-batasan yang jelas yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang utama dalam organisasi media adalah memperoleh keuntungan. Tujuan lain dibuat untuk menghasilkan produk yang berkualitas, melayani publik dan profesionalisme.

Karena adanya orientasi profit maka tujuan ekonomi bisa menjadi alasan untuk menjalankan langkah-langkah baik dalam iklan maupun dalam pemberitaan yang diarahkan untuk mendapatkan perhatian *audience* dan pemasang iklan.

Batasan yang diterapkan *Kompas* terutama dalam bidang iklan dan sirkulasi adalah sebagai berikut :

Pertama, sejak berdiri tahun 1965, Kompas menolak menerima iklan rokok dan minuman keras. Sebaliknya Kompas menerima iklan yang netral dan tak berbau pornografi dan tidak menyerang orang/pihak lain.

Kedua, dengan prinsip porsi distribusi sama dengan porsi berita, untuk menjangkau pembaca didaerah-daerah/pasar strategis, mulai 1997 Kompas memberlakukan cetak jarak jauh di Semarang untuk sirkulasi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Ujung Pandang wilayah sirkulasi Sulawesi Selatan, Surabaya wilayah sirkulasi Jawa Timur.

Ketiga, dengan modal jumlah pembaca Kompas porsi 90 persen hidup dari langganan. Kompas mematok harga jual yang layak/lazim menurut harga pasar. Ini terutama mengingat daya beli masyarakat masih rendah. Oleh karena itu persaingan koran atau penerbit baru tidak berpengaruh terhadap tiras Kompas. (Bapak Taufik Mihadja)

e. Pemilihan data, fakta, sumber berita dalam pemberitaan

Salah satu pengaruh isi media adalah internal media yaitu pekerja media. Untuk menjaga obyektivitas maka *Kompas* memberlakukan ketentuan dalam manajemen pemberitaan adalah sebagai berikut :

Dari segi manajemen pemberitaan, Kompas memberlakukan ketentuan tiap desk ada sekitar 5 orang, terdiri dari editor, sejumlah reporter lapangan dan wartawan senior. Jadi ada tim yang lengkap.

Berita Kompas juga mengandalkan kedalaman isi, yang diwarnai oleh fakta dan data-data pendukung yang diambil dari Pusat Informasi Kompas (Bapak Taufik Mihadja).

Sumber informasi jelas-jelas mempengaruhi isi media, apalagi untuk menulis suatu topik atau isu tertentu, tidak jarang dibutuhkan lebih dari dua sumber informasi agar berita yang tampil berimbang. Sumber-sumber informasi tersebut dapat memberikan informasi dari sudut pandang yang berbeda. Sumber yang tidak lengkap dapat menyebabkan suatu berita tidak proporsional, *inbalance*. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak, sementara pembaca kurang mendapatkan informasi yang memadai. Bagaimana *Kompas* menampilkan sumber berita dapat disimak dari wawancara penulis dengan Bapak Taufik Mihadja sebagai berikut :

Sumber sedapat mungkin berimbang (cover both sides), opini ditampilkan dari pihak yang kompeten dan memperhatikan kebutuhan pasar pembaca serta mengandalkan pemberitaan lengkap menyeluruh menggunakan data-data pendukung. Untuk isi yang menyakitkan, meskipun itu besar, policy Kompas akan proporsional dan cenderung mengutamakan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Sumber yang berimbang dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan maupun opini pakar-pakar yang berkompeten. Penentuan sumber berita tidak pernah berdasarkan jenis kelamin. Yang memiliki persyaratan yang telah ditetapkan oleh redaksi itulah yang dijadikan sumber berita.

f. Masalah Kepemimpinan Politik Perempuan

Jumlah keseluruhan karyawan pendukung sebanyak 698. Karyawan tetap 637, karyawan kontrak 61. Dari jumlah tersebut karyawan laki-laki 554 dan perempuan 143 (20,4). Jumlah jurnalis 184 perempuan 28 (15,2%) Jumlah jurnalis perempuan yang masuk jajaran pimpinan redaksi sebanyak 2 orang. (sumber Bag. SDM Kompas.). Jumlah komposisi karyawan dan jurnalis menunjukkan bahwa dunia media memang dunia patriaki karena perempuan yang berkecimpung dalam media hanya 20%. Kompas menyebutkan diri sebagai koran keluarga, namun tidak sensitif gender, lebih berorientasi ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis dengan Bapak Taufik Mihardja sebagai berikut :

Kompas memosisikan diri sebagai koran keluarga yang berarti dibaca seluruh anggota keluarga. Sebagai koran keluarga Kompas pernah menerbitkan suplemen Yang Muda untuk remaja dan Swara untuk pemberdayaan wanita. Suplemen tersebut mempunyai tujuan untuk mengekalkan langganan. Karena suplemen tersebut dipandang tidak menguntungkan karena hanya memberikan tambahan beban kepada pengecer namun tidak menguntungkan secara ekonomis karena tidak dapat dijual terpisah oleh pengecer.

Dengan alasan ekonomi tersebut maka Swara dan Muda kemudian tidak diterbitkan. Meskipun kedua suplemen tersebut kemudian tidak terbit lagi, Kompas masih tetap berusaha memberi perhatian terhadap masalah perempuan dengan berusaha memunculkan Swara dan Muda dalam bentuk lain yaitu tetap

memunculkan topik-topik perempuan dan muda pada hari-hari tertentu, dengan tema khusus.

Kompas seharusnya lebih sensitif gender mengingat perbandingan antara pembaca antara pria dan perempuan adalah 3 dibanding 1 (76 persen pria, 24 persen perempuan). Yang berarti jumlah pembaca perempuan kurang lebih 125.000.. Suatu jumlah yang cukup besar bahkan bisa melebihi oplag sebuah surat kabar. Jumlah tersebut terus akan bertambah seiring dengan peningkatan pendidikan dan pemberdayaan perempuan. (Sumber Pusat Informasi Kompas/PIK)

Salah satu penghasilan media adalah khalayak/pembaca. Apa yang disajikan media sebagai berita secara langsung maupun tidak langsung yang memberi keuntungan/mendukung bisnis. Khalayak inilah yang langsung/tidak langsung berpengaruh terhadap isi media. Hubungan berita terhadap bisnis ini juga berlaku untuk *Kompas* hal ini terlihat dari pemilihan dan prioritas pemberitaan.

Kompas menganggap berita politik kurang menarik dan tidak dapat meningkatkan oplag. Berita yang dapat meningkatkan oplag adalah berita mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi serta olah raga. Hal tersebut juga yang mendasari desk politik dimasukkan dalam desk nasional tidak berdiri sendiri lagi.

Meskipun desk politik dibawah desk nasional bukan berarti *Kompas* tidak memperhatikan masalah-masalah politik. Rubrik politik tetap ada dihalaman enam. Namun *Kompas* tidak pernah

melihat berita politik dari sisi gender. Berita yang layak menjadi sebuah berita tetap disesuaikan dengan kebijakan redaksi .

2. Harian Umum *Rakyat Merdeka*

a. Umum

Rakyat Merdeka pertama kali terbit tanggal 22 April 1999 dan dikelola oleh eks karyawan *Merdeka*. Hal ini terlihat pada maklumat tersebut adalah :
“Kami seluruh eks karyawan merdeka, dengan ini menyatakan mendirikan *Rakyat Merdeka* yang dikelola dengan semangat dan jiwa merdeka. Seluruh pembaca, mitra usaha dan relasi yang selama ini menjalin hubungan baik dengan kami, dimohon untuk tetap melanjutkan hubungan baik dengan *Rakyat Merdeka*.”

Karena adanya perbedaan pandangan antara pemilik Harian *Rakyat Merdeka* dengan segenap karyawan *Merdeka* sepakat untuk keluar dan membentuk koran baru yang dinamakan *Rakyat Merdeka*. Saat ini baik *Rakyat Merdeka* maupun *Merdeka* masing-masing memiliki SIUPP sendiri. *Rakyat Merdeka* sekarang bernaung di bawah bendera Jawa Pos Group.

Rakyat Merdeka terbit sebagai penyambung aspirasi rakyat. Terlebih lagi *Rakyat Merdeka* terbit pasca Orde Baru sehingga memungkinkannya lebih transparan dalam pemberitaan.

Dengan latar belakang tersebut maka *Rakyat Merdeka* awalnya memilih motto Reformasi Total Untuk Rakyat, namun motto tersebut kemudian diubah menjadi Apinya Demokrasi Indonesia. Motto yang diambil adalah simbol dari isi

pemberitaan yang ditampilkan. Dimana setiap pemberitaan harian berusaha mengangkat apa yang sebenarnya sedang dirasakan oleh rakyat, dan *Rakyat Merdeka* sebagai sebuah institusi berusaha untuk menyuarakan ke permukaan.

Karena dikelola oleh eks karyawan Merdeka, maka dalam format penyajian atau isi bidang redaksional harian umum Rakyat Merdeka kita temukan adanya sedikit persamaan dengan format terdahulu. Namun Rakyat Merdeka selalu berusaha tampil sesuai perkembangan zaman. *Rakyat Merdeka* Memosisikan diri sebagai koran oposisi, dengan konsep tersebut maka *Rakyat Merdeka* akan menyuarakan aspirasi rakyat banyak.

Jumlah tiras 120.000, jumlah tersebut 80 persen sampai kekonsumen melalui eceran, sedangkan pelanggan hanya 20 persen. Konsentrasi distribusi 90 persen di Jabotabe, selebihnya Lampung dan Bandung. Pembaca *Rakyat Merdeka* sebagian besar adalah golongan bawah dan sedikit golongan menengah, untuk golongan atas dapat dikatakan tidak ada.

Rakyat Merdeka didukung oleh 116 karyawan 24 perempuan (20,6%) *Rakyat Merdeka* didukung oleh 90 orang reporter, dari jumlah tersebut 14 orang reporter perempuan dan dari jumlah tersebut 2 masuk jajaran pimpinan redaksi. (Bapak Argo Bagian Litbang). Jumlah tersebut menunjukkan dunia media adalah dunia patriaki, karena yang berkecimpung didalamnya lebih banyak laki-laki.

b. Struktur Organisasi harian umum Redaksi *Rakyat Merdeka*

Individu sebagai *media workers* terlibat dalam *Routinitas* dan *constraint* pada proses produksi berita. Dalam pekerjaan itu, individu-individu menjalankan peran tetapi sesuai dengan spesialisasi-spesialisasi yang dituntut. Setiap peran punya kepentingan masing-masing dan kepentingan-kepentingan tersebut tentu saja berbeda. Karena sangat beragamnya peran dan kepentingan itu maka konflik mudah terjadi. Agar proses produksi berita dapat berjalan dengan lancar, maka perlu adanya penyalarsan untuk mengatur peran dan kepentingan tersebut. Salah satu caranya untuk menyuarakan adalah dengan menatanya dalam organisasi. Penataan stuktur organisasi *Rakyat Merdeka* sebagai berikut :

Struktur organisasi harian umum Rakyat Merdeka terdiri atas Pimpinan Umum, Dewan Redaksi, Pimpinan Redaksi, Wakil pimpinan Redaksi, Redaktur Pelaksana, Asisten Redaktur Pelaksana, Sekretaris Redaksi, Koordinator liputan, Redaktur halaman, wartawan. Dengan struktur semacam ini maka kegiatan Rakyat Merdeka dapat dibagi menjadi dua yaitu: yang bersifat policy dimiliki oleh jajaran pimpinan/manajemen dan yang bersifat operasional ditangani oleh redaktur halaman dan reporter.

Dengan mendelegasikan tugas-tugasnya kepada Redaktur halaman maka redaktur pelaksana pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Sedangkan Pimpinan umum hanya menentukan kebijakan yang sifatnya makro. Struktur secara lengkap lihat lampiran. (Bpk. Zainuddin HM.)

c. Mekanisme Kerja Pemberitaan harian umum *Rakyat Merdeka*

Di sini terlihat bahwa organisasi mempengaruhi isi media dengan adanya *gatekeeper* karena pekerjaan *gatekeeper* menyangkut pengambilan keputusan yang kompleks/rumit dengan banyak tingkatan/bagian. Maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan *gatekeeper* dilakukan oleh organisasi bukan lagi oleh perorangan, karena organisasi punya tujuan tertentu yang didalamnya ada peranan dan struktur serta kendali yang dijalankan.

Pekerjaan jurnalistik yang mengandalkan banyak orang meniscayakan mekanisme kerja yang rapi. Secara ringkas mekanisme kerja pemberitaan *Rakyat Merdeka* diatur sebagai berikut :

Setiap rubrik dikepalai oleh Redaktur halaman yang membawahi asisten redaktur pelaksana dan 2-3 reporter, reporter diawasi oleh asisten redaktur halaman.

Agenda dan penugasan untuk reporer dilakukan oleh koordinator peliputan. Pada prinsipnya penugasan bersifat rutin dan dilakukan sesuai agenda yang ada. Mekanisme dalam penugasan dilakukan dengan rapat kecil antara reporter dan koordinator peliputan.

Proses pembuatan berita adalah sebagai berikut : Reporter lapangan memburu berita dengan dikoordinator oleh asisten redaktur halaman – Redaktur halaman menerima, menyunting dan memeriksa hasil, Rapat penentuan untuk pracetak dan penentuan head line dilakukan dengan mekanisme rapat pada pukul 17.00.

Rapat rutin harian berlangsung satu kali, yaitu pukul 17.00, untuk menentukan berita yang akan diturunkan sekaligus persiapan

penugasan untuk hari berikutnya dan jika ada pengembangan ide-ide. Rapat ini juga merupakan rapat Koordinasi antar rubrik. Bila dirasa ada yang tidak sesuai dengan kebijakan organisasi redaktur pelaksana dapat merubah suatu berita. (Bapak. Nurhilah)

Di sini terlihat bahwa organisasi mempengaruhi isi media dengan adanya *gatekeeper* karena pekerjaan *gatekeeper* menyangkut pengambilan keputusan yang kompleks/rumit dengan banyak tingkatan/bagian. Maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan *gatekeeper* dilakukan oleh organisasi bukan lagi oleh perorangan, karena organisasi punya tujuan tertentu yang didalamnya ada peranan dan struktur serta kendali yang dijalankan.

d. Kebijakan Redaksional harian umum *Rakyat Merdeka*

Dari perspektif organisasi, redaksi sebagai pembuat berita dipengaruhi oleh bagian-bagian lain dalam organisasi. Bahkan pengaruh organisasi terhadap wartawan bisa mengubah kemampuannya menjelaskan masalah-masalah secara obyektif. Prinsip-prinsip yang diterapkan *Rakyat Merdeka* dalam kebijakan redaksional adalah sebagai berikut :

Prinsip harian umum Rakyat Merdeka adalah oposisi karena itu harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Mengingat posisi harian. umum Rakyat Merdeka adalah koran oposisi dengan misi utama sebagai pengkritik utama semua kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat maka berita bernilai adalah masalah yang mendapatkan perhatian besar dari

masyarakat. Kebijakan pemberitaan ini berlaku pada semua berita atau peliputan; Dengan demikian pendapat orang sebagai individu diperbolehkan, sedangkan lembaga diatas mengatasi segala beda pendapat tersebut.

Secara umum standar obyektivitas adalah nilai berita (new values), yang amat lazim dikenal dalam jurnalistik. Jika menarik, faktual, kehangatan dan kelengkapan - meskipun Rakyat Merdeka sering disebut sebagai harian yang bombas(tis) namun Rakyat Merdeka masih tetap memperhatikan news value dengan mengarahkan semua pemberitaan pada obyektivitas pemberitaan. Kalau pilihan kalimat/ bahasa yang dipergunakan sering vulgar, hal itu berkaitan dengan strategi pemasaran, karena segmen pembacanya Rakyat Merdeka adalah kalangan bawah yang membeli dengan cara eceran. Jadi yang diutamakan bagaimana mengemas berita semenarik mungkin sehingga begitu orang melirik koran tersebut, orang tertarik untuk membeli.

Organisasi memiliki batasan-batasan yang jelas yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang utama dalam organisasi media adalah memperoleh keuntungan. Tujuan lain dibuat untuk menghasilkan produk yang berkualitas, melayani publik dan profesionalisme.

Karena adanya orientasi profit maka tujuan ekonomi bisa menjadi alasan untuk menjalankan langkah-langkah baik dalam iklan maupun dalam pemberitaan yang diarahkan untuk mendapatkan perhatian *audience* dan pemasang iklan. Batasan yang diterapkan *Rakyat Merdeka* terutama dalam bidang pemberitaan berkaitan dengan bidang pemasaran yaitu sebagai berikut :

kebijakan redaksional tidak bisa terlepas dengan dengan kebijakan pemasaran/distribusi. Untuk menjangkau pembaca /pasar strategis, Rakyat Merdeka hanya mengandalkan eceran. Karena itu dengan modal jumlah pembaca Rakyat Merdeka porsi 80 persen eceran maka berita Rakyat Merdeka dibaca oleh kelas bawar. Dengan segemn tersebut maka berita dibuat tidak terlalu berat dan menarik. Selain ini diupayakan untuk tidak terlambat dapat pencetakan/distribusi karena pengaruhnya akan besar terhadap pemasukan (Bpk. Zainuddin)

e. Pemilihan data, fakta, sumber berit dalam pemberitaan

Salah satu pengaruh isi media adalah internal media yaitu pekerja media. Untuk menjaga obyektivitas maka *Rakyat Merdeka* memberlakukan ketentuan dalam manajemen pemberitaan adalah sebagai berikut :

Dari segi manajemen pemberitaan, Rakyat Merdeka memberlakukan ketentuan tiap halaman ada redaktur halaman, wakil redaktur halaman dan sejumlah reporter lapangan, jadi berupa suatu tim.

Dari segi kandungan berita, fakta/isi sedapat mungkin obyektif dalam arti menulis apa adanya. Opini ditampilkan dari pihak yang kompeten dan memperhatikan kebutuhan pasar pembaca. Policy Rakyat Merdeka sebagai koran oposisi cenderung mengutamakan kepentingan rakyat banyak terutama rakyat kecil yang tertindas.(Zainuddin HM.)

Sumber informasi jelas-jelas mempengaruhi isi media, apalagi untuk menulis suatu topik atau isu tertentu, tidak jarang dibutuhkan lebih dari dua sumber informasi agar berita yang tampil berimbang. Sumber-sumber informasi tersebut dapat memberikan informasi dari sudut pandang yang berbeda. Sumber yang tidak lengkap dapat menyebabkan suatu berita tidak proporsional, *inbalance*. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak, sementara pembaca kurang mendapatkan informasi yang memadai. Bagaimana *Rakyat Merdeka* menampilkan sumber berita dapat disimak dari wawancara penulis dengan Bapak Nurhila sebagai berikut :

Siapa yang berkompentan dengan berita yang akan diterbitkan dialah yang layak menjadi sumber berita. Penentuan sumber berita tidak berdasarkan pada jenis kelamin tetapi pada kebijakan yang ditetapkan redaksi. (Bpk. Nurhila).

f. Masalah Kepemimpinan Politik Perempuan

Jumlah keseluruhan karyawan pendukung sebanyak 114, dari jumlah tersebut karyawan dan perempuan 24 (20,6). Jumlah jurnalis 90 perempuan 14. Jumlah jurnalis perempuan yang masuk jajaran pimpinan redaksi sebanyak 2 orang. (Bapak. Argo Bag.Litbang). Jumlah komposisi karyawan dan jurnalis menunjukkan bahwa dunia media memang dunia patriaki karena perempuan yang berkecimpung dalam media hanya 20%. Meskipun telah diuraikan pada Bab terdahulu bahwa *Rakyat Merdeka* ada'ah pendukung Megawati, namun *Rakyat Merdeka* tetap merupakan harian yang tidak sensitif gender, tetapi lebih

berorientasi ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis dengan Bapak Zainuddin HM. sebagai berikut :

Rakyat Merdeka tidak ada rubrik khusus mengenai perempuan, karena Rakyat Merdeka menganggap rubrik-rubrik perempuan seperti kecantikan, mode, interior dan sebagainya, telah menjadi porsi majalah atau tabloid wanita. Rakyat Merdeka sebagai koran laki-laki malah menambahkan halaman hiburan yang disebut "Bibir Mer" yang menjadikan wanita sebagai obyek untuk menarik pembaca terutama kaum laki-laki.

Rakyat Merdeka seharusnya lebih sensitif gender mengingat jumlah pembaca perempuan sebenarnya merupakan sasaran pembaca yang cukup potensial. Jumlah pembaca perempuan terus akan bertambah seiring dengan peningkatan pendidikan dan pemberdayaan perempuan.

Salah satu penghasilan media adalah khalayak/pembaca. Apa yang disajikan media sebagai berita secara langsung maupun tidak langsung yang memberi keuntungan/mendukung bisnis. Khalayak inilah yang langsung/tidak langsung berpengaruh terhadap isi media. Hubungan berita terhadap bisnis ini juga berlaku untuk *Rakyat Merdeka* hal ini terlihat dari pemilihan dan prioritas pemberitaan.

Berita Rakyat Merdeka lebih didominasi masalah politik, kurang lebih 60%. Namun berita tentang politik lebih banyak terkait dengan posisi Rakyat Merdeka sebagai koran oposisi, yaitu sebagai pengkritik kebijakan yang berkaitan dengan publik.

Rakyat Merdeka tidak pernah melihat berita politik dari sudut gender. Berita politik yang layak menjadi sebuah berita tentu saja yang sesuai dengan kebijakan redaksional.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin, sumber berita berkorelasi dengan keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan. Kebijakan redaksional juga mempengaruhi produk berita. Dari hasil dua media yang diteliti *Kompas* lebih menekankan obyektivitas, sementara *Rakyat Merdeka* lebih menekankan pada judul berita yang menarik dan sensasional.

1. Interpretasi pada Jumlah dan Sebaran Berita.

Jumlah berita sebanyak 51 buah, yaitu untuk *Kompas* 27 dan *Rakyat Merdeka* 24, merupakan suatu jumlah yang sangat kecil mengingat jumlah berita tersebut merupakan berita selama 6 bulan. Pada waktu tersebut kepemimpinan politik perempuan sedang mendapat moment yang sangat bagus yaitu dengan adanya Pemilihan Umum dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bisa dibayangkan bagaimana berita tentang kepemimpinan politik wanita jika tidak ada moment tersebut.

Dari jumlah 51 berita tersebut, tidak ada satupun berita yang menjadi berita utama halaman satu. Padahal berita utama berfungsi untuk menarik perhatian perhatian pembaca, sekaligus untuk membedakannya dengan rubrik-rubrik lain (Mallarangeng

1992 : 15). Berita utama juga dapat dikatakan sebagai cermin pemihakan media.

2. Interpretasi pada jenis keberpihakan/Orientasi Informasi

Orientasi informasi menunjukkan kecenderungan netral (65,4%). Keberpihakan ini berkorelasi dengan sumber berita yang memang lebih banyak didominasi laki-laki. Sumber berita perempuan 139 (22,4%). Namun orientasi informasi ini merupakan apa yang dinamakan dengan realitas psikologis karena dikatakan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat dan bersifat subyektif. Belum tentu realitas yang ada dimedia tersebut sesuai dengan realita sosial atau kenyataan yang ada dalam masyarakat.

3. Interpretasi Sumber Berita

Sumber berita jelas mempengaruhi isi media, oleh karena itu sumber berita jelas amat diperlukan. Komposisi sumber berita baik dari jenis sumber maupun jenis kelamin sumber tidak berimbang. Sumber berita lebih didominasi oleh aktivis organisasi kemasyarakatan/aktivis lembaga swadaya masyarakat yang lebih menyuarakan masyarakat pada tingkat *grass roots*, tapi masyarakat *grass roots* tidak bisa diinterpretasikan secara sama, karena banyak sekali kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Sumber berita terbesar kedua adalah lain-lain, sumber ini lebih banyak didominasi oleh wartawan. Wartawan tentu saja juga tidak lepas dari apa yang menurut

Schoemaker dan Reese dinamakan dengan pekerja media itu sendiri, pengaruh suasana dan iklim kerja dan tentu saja pengaruh kebijakan organisasi.

4. Interpretasi Kebijakan Redaksional

Meskipun proses produksi kedua media tersebut relatif sama, namun produk akhir yang dihasilkan berbeda, karena kebijakan yang diteapkan kedua media tersebut juga berbeda. *Kompas* lebih menekankan pada obyektivitas karena memang 80% pembacanya adalah pelanggan yang tidak menginginkan *Kompas* menjadi koran yang bombas(tis). *Rakyat Merdeka* lebih mengutamakan judul yang menarik, memberi sensasi.

Prinsip *headline* adalah singkat, menarik, memberi sensasi, menggiring dan penting (Mallarangeng 1992 : 16). Sesuai dengan prinsip *headline* tersebut maka akhirnya *Rakyat Merdeka* kurang memperhatikan segi etika.

B. Kesimpulan

Dari uraian pada bab – bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa isu mengenai kepemimpinan politik perempuan tidak mendapatkan porsi yang bagus di dua media tersebut. Hal tersebut tergambar dari jumlah berita yang menjadi unit analisis adalah 51. Jumlah 51 itu tersebut adalah selama 6 bulan dan pada saat tersebut kepemimpinan politik perempuan mendapat momentum pada pemilu dan menjelang sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan agenda menentukan

pemimpin politik nasional.

Orientasi informasi dalam pemberitaanpun dapat disimpulkan bahwa dari kecenderungan pemihakan isi pesan yang memuat isu mengenai kepemimpinan politik perempuan hanyalah bersifat informatif/netral (65,4%). Ini menandakan bahwa pola pemihakan isi pesan cenderung mengambil jalan tengah, yaitu netral/informatif. Dilihat dari analisis yang ada dapat disimpulkan dukungan terhadap kepemimpinan politik perempuan masih sangat sedikit (29,0%). Namun masih cukup mengembirakan karena prosentase menentang terhadap kepemimpinan politik perempuan sangat kecil yaitu (5,6%)

Sumber berita dalam isu kepemimpinan politik wanita tidak berimbang tetapi lebih didominasi oleh aktivis ormas/LSM (35,1) dan sumber lain terutama wartawan (28,2). Pelaku (pimpinan politik baik itu di legislatif, eksekutif maupun yudikatif) hanya 9,3%. Intelektual 3,7% dan Birokrat 1%.

Berdasarkan jenis kelamin sumber berita tersebut lebih didominasi laki-laki lebih dari 77,6%, sebanyak 482. Sementara jumlah sumber perempuan 139 (22,4%). Ini menandakan bahwa perempuan belum banyak mengambil peran di media massa. Perempuan lebih banyak dijadikan obyek berita di media massa.

Dari analisa yang dilakukan sumber berita berpengaruh terhadap keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan. Karena sumber berita berpengaruh terhadap keberpihakan seharusnya komposisi sumber berita seimbang.

Sumber berita berpengaruh terhadap alasan keberpihakan. Alasan keberpihakan

terbanyak adalah intelektual 34,4%, berarti perempuan dapat menjadi pemimpin asalakan memiliki kemampuan. Sementara alasan mendukung dengan mempergunakan alasan agama sebanyak 28,9%. Dukungan terbanyak diberikan oleh aktivis Ormas/LSM sebanyak 43,3%.

Alasan terbanyak yang digunakan dalam menentang kepemimpinan politik perempuan adalah agama 57,1%. Sementara intelektual/kemampuan sebanyak 25,7%. Sumber berita terbanyak yang menentang kepemimpinan politik wanita adalah sumber lain 40%, kedua 31,4% adalah aktivis orams/LSM.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap jenis kelamin sumber juga berpengaruh kepada keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan. Meskipun sumber berita perempuan hanya 22,4% (139) namun hampir separuh sumber berita perempuan mendukung kepemimpinan politik 48,9% (68). Sementara sumber berita laki-laki hanya 23,3 % (112), sementara netral 340 (70). Jadi di sini jelas terlihat bahwa kepemimpinan politik perempuan lebih banyak didukung oleh kaum perempuan.

Alasan terbanyak mendukung kepemimpinan politik perempuan sumber berita perempuan adalah intelektual/kemampuan yaitu sebanyak 45,5%. Sementara sumber berita laki-laki alasan terbanyak mendukung kepemimpinan politik perempuan adalah agama 41,9%.

Alasan ketidak berpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan terbanyak sumber berita perempuan adalah intelektual/kemampuan (60%). Sementara alasan

ketidak berpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan sumber berita laki-laki adalah agama 63,3%.

Hasil penelitian menunjukkan, meskipun proses memproduksi berita yang dilakukan redaksi kedua media relatif sama, namun produk akhir yang dihasilkan berupa berita relatif berbeda. *Kompas* adalah pasar yang bersifat nasional isu yang diangkat mengandung unsur obyektifitas dan kelengkapan berita.

Rakyat Merdeka lebih ditonjolkan aspek menarik dan sensasional sehingga orang tertarik untuk membeli. Hal ini terkait dengan strategi pemasaran yang diterapkan *Rakyat Merdeka*, dimana *Rakyat Merdeka* 80% tirasnya adalah eceran. Karena eceran maka untuk membeli orang harus melihat dari judul yang menarik.

Kedua media yang diteliti juga tidak memperhatikan isu mengenai perempuan, hal ini dikarenakan kedua media tersebut lebih banyak pertimbangan ekonomis. *Kompas* menganggap bahwa berita politik tidak menarik pembaca/menaikkan oplag. Suplemen yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuanpun dihentikan dengan alasan tidak menguntungkan.

Rakyat Merdeka lebih tidak sensitif gender karena selain tidak pernah ada sama sekali rubrik khusus mengenai perempuan. Bahkan perempuan di *Rakyat Merdeka* dijadikan obyek hiburan yang sensasional guna meningkatkan oplag dengan melalui rubrik "Bibir Mer".

Dunia media memang benar dunia patriaki, ini juga terlihat di kedua media. Perbandingan jurnalis di kedua media tersebut. *Kompas* 184, perempuan 28 (15,2%).

Rakyat Merdeka 90 Jurnalis 14 (15,5%). Sementara jumlah redaktur yang ada di *Kompas* sebanyak 16 orang, 2 perempuan (12,5%). *Rakyat Merdeka* jumlah redaktur ada 20 orang, 2 perempuan (10%).

C. Implikasi Studi

1. Implikasi Akademis

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan politik perempuan belum mendapat perhatian dimedia massa. Berita yang ada dimedia massapun cenderung mengambil sikap netral dan informatif. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kecenderungan isi media massa tentang kepemimpinan politik perempuan di Indonesia. Apakah ada kecenderungan penggambaran negatif atau positif, kemudian dikorelasikan dengan pendapat khalayak (studi agenda setting). Sehingga dapat tergambar dengan jelas realitas psikologis dengan realitas sosial.

2. Secara Praktis

Tugas media massa adalah menyampaikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui apa yang terjadi di masyarakat dan sekitarnya. Dengan informasi tersebut media dapat mengambil peran dalam mendidik masyarakat dalam menerima pemimpin politik perempuan. Oleh karena itu mediapun harus menjadikan masalah kepemimpinan politik perempuan sebagai agenda media dalam upaya melakukan peran pendidikan bagi masyarakat dengan

pemberdayaan perempuan terutama dalam bidang politik. Karena bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia berjenis kelamin perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Albarran, Alan B (1996). *Media Economics : Understanding Markets, Industries and Concepts*. First Edition. Ames, Iowa States University Press
- Ashadi Siregar, Rondang Pasribu, Ismay Prihastuti (1999), *Media dan Gender : Perspektif gender atas industri surat kabar di Indonesia*, LP3Y, Yogyakarta.
- Berlo, David K. (1960). *The Process of Communication*, USA : Holt, Rinehart and Winston.
- DeFleur, Melvin L. dan Everette E. Dennis. (1985). *Understanding Mass Communication*. USA : Houghton Mifflin Company.
- Ecip, Sutiono (1995), *Studi Proksionitas dalam Relevansinya dengan Proses Keredaksian Surat Kabar Indonei*, Jakarta : Jurnal 7 dan 8 Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia dan Gramedia.
- Effendy, Onong U (1992), *Dinamika Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Flourney, Don Michael (1989). *Analisis Isi Surat Kabar-Surat Kabar Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hiebert, Ungurait, Bohn. (1991). *Mass Media VI*. USA : Longman. New York.
- Hill, David T. (1995) : *The Press in The New Order Indonesia* : Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Ibrahim, Idi Subandy dan Suranto, Hanif (1998) ; *Wanita dan Media : Kontruksi Idiologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*, Bandung : Remaja Rosda Karya
- Koentjaraningrat (1974), *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia.
- Kripendorff, Klaus. (1991). *Analisis isi Pengantar Teori Dan Metodologi*, Jakarta : Rajawali Pers.

- Little John, Stephen W (1989 dan 1995), **Theories of Human Communication**, California : Belmont Wodsworts Publishing Company.
- Mallarangeng, Rizal. (1992). **Pers Orde Baru Tinjauan Isi Harian Kompas dan Suara Karya**, Yogyakarta : Rajawali Pers.
- Maswadi, Rauf dan Nasrun, Mappa. (1993), **Indonesia dan Komunikasi Politik**, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mencher, Melvin (1987) : **News Reporting and Writing**, Win C. Brown Publishers Dubuque, Iowa.
- Miriam Budiarto, **Dasa-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta, PT. Gramedia, 1993.
- Munir, Rozy (1999) : **Pemimpin Perempuan Mengapa Tidak ?**, Panitia Muktamar XXX NU, Jakarta
- Rakhmat, Jalaluddin. (1986). **Psikologi Komunikasi**. Bandung : Remaja karya, CV.
- (1989). **Metoda Penelitian Komunikasi**, Bandung : Rosda Karya.
- Randall, Vicky (1982), **Women and Politics**, New York : St. Martin Press.
- Rogers, Everett M. (1988) dalam artikel berjudul "Mass Media dan Komunikasi Antar Pribadi" yang dimuat dalam buku **Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan**, editor Eduard Depari dan Colin Mac Andrews. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Schoemaker dan Stephen D. Reese (1996), **Mediating The Message : Theoris of Influences on Mass Media Content**.
- Stempel III, Guido H. (1983). **Analisis Isi**, disunting oleh Jalaluddin Rakhmat, IKASI, Bandung.
- Surakhmat, Winarno. (1994). **Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik**, Bandung : Tarsito.
- Susanto, Astrid S. (1974). **Komunikasi dalam Teori dan Praktek**. Bandung, Binacipta.

Wahyudi, JB. (1992), **Teknologi Informasi dan Produksi Citra Bergerak**, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Lain-lain

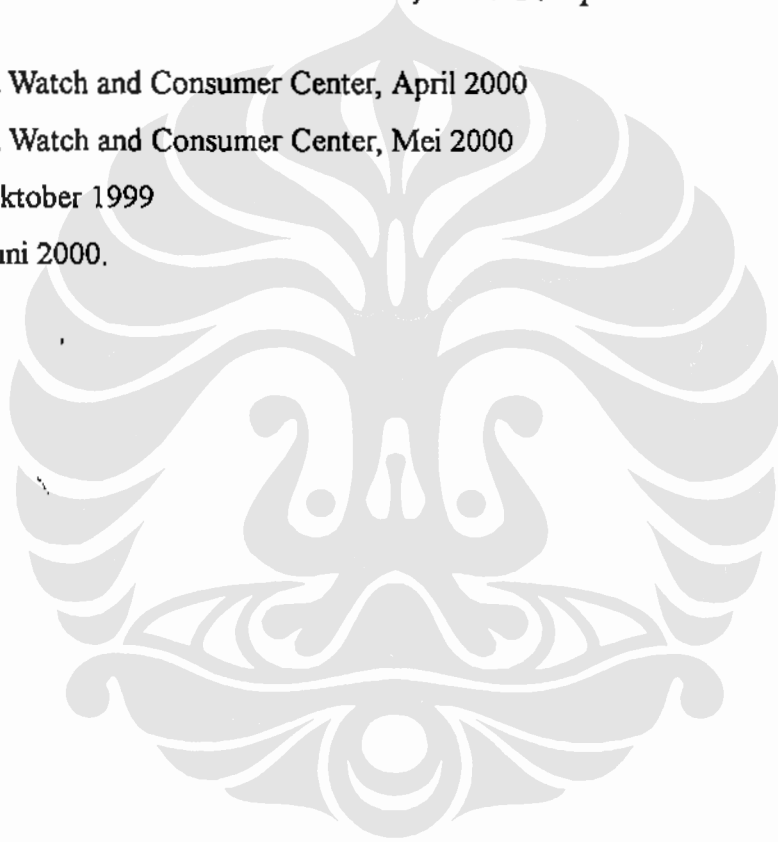
Hidayat, Dedy N (1997), **Ekonomi Media : Aplikasi Analisis Ekonomi dalam Industri Media**. Draf Materi Penunjang Kuliah, Program Pascasarjana Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Sem. Genap 1997.

Journal ; Media Watch and Consumer Center, April 2000

Journal ; Media Watch and Consumer Center, Mei 2000

Kompas, 22 Oktober 1999

Kompas, 28 Juni 2000.



Judul Berita

Adapun judul berita maupun tulisan yang memuat pesan tentang perempuan sebagai pemimpin politik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Tanggal Pemuat	Halaman	Judul Berita
HARIAN UMUM KOMPAS			
1.	28 Juni 99	1	Inkonstitusional, Tolak Perempuan Jadi Presiden
2	29 Juni 99	6	Kelompok Cipayung Tolak "Gender" sebagai Isu Politik
3	29 Juni 99	6	Habibie tentang Wanita : Tak Pada Tempatnya, Berpandangan "Bias Gender"
4	1 Juli 99	7	PWNU Jatim : Cap Jempol Darah Tidak Perlu
5	1 Juli 99	1	Upaya Menjaga Ketentraman
6	2 Juli 99	25	Negara Menghambat Hak Politik Perempuan
7	2 Juli 99	7	Ragukan Komitmen Megawati, Mahasiswa Melakukan Demonstrasi
8	3 Juli 99	8	Revolusi Politik Wanita Kuwait
9	7 Juli 99	6	Amien Rais Tentang Pemilihan Presiden : Gender Tak Harus Dipersoalkan
10	11 Juli 88	12	ICMI Setuju Putri Terbaik Jadi Presiden
11	12 Juli 99	6	Wanita PDI Perjuangan : Kelompok "Status Quo" Ganjal Peran Wanita
12	13 Juli 99	6	Sebagian Mahasiswa Sulsel Tolak Megawati Jadi Capres
13	13 Juli 99	6	PP Aisyiyah : Islam Tidak Pernah Hambat Perempuan
14	16 Juli 99	6	Pandangan Islam Tentang Perempuan Belum Dipahami Secara Utuh
15	17 Juli 99	1	Ulama NU Dukung Presiden Wanita
16	17 Juli 99	1	Rakernas PDI Perjuangan : Megawati Masih Diam
17	19 Juli 99	6	Sid Aqiel : Serahkan Saja pada Gur Dur

18	20 Juli 99	6	70 dari 100 Ulama NU Terima Perempuan Jadi Pemimpin
19	24 Juli 99	19	MUI tak Mungkin Bebas dari Dinamika Politik
20	29 Juli 99	6	Partai Belum Tunjukkan Kepedulian pada Perempuan
21	19 Agst.99	6	Debat Sengit Warnai Penentuan UG MPR
22	26 Agst99	6	Partai se-Sumatera Selatan Dukung Megawati : Muncul Seruan Dari Benazir Bhutto
23	26Agst.99	6	Muspim PBNU tak Rekomendasikan Dukungan Pada Mega
24	26Agst.99	4	Pemerintah Saat ini tak Miliki Kepekaan Gender
25	30 Agst99	6	Mayoritas Ulama NU Setuju Wanita Jadi Presiden
26	4 Nov 99	8	Perempuan Indonesia Masih Didiskriminasi
27	11 Nov 99	6	NU Perlu Perempuan Kiai

No	Tanggal	Halaman	HARIAN UMUM RAKYAT MERDEKA
1.	16 Juni 99	12	PPP Juga Menolak Capres Perempuan
2.	16 Juni 99	12	ICMI (Juga) Bisa Dukung Megawati
3.	19 Juni 99	12	Muncul Lagi Tokoh Yang Membela Mega, FORBI : Mega Yang Berhak
4.	25 Juni 99	12	Mega Diminta Tak Ngotot Jadi Presiden
5.	27 Juni 99	10	Gerah Melihat Kondisi Politik, Kiai se-Jawa dan Bali Menolak Chaos
6.	3 Juli 99	12	Tidak Kirim Agen CIA : Amerika Tak Akan Obok-Obok Megawati
7.	3 Juli 99	12	Ulama Ingin Ngemong dan Ngomong Pada Megawati
8.	5 Juli 99	1	Mereka Menolak Presiden Wanita
9	7 Juli 99	12	"Khadijah" ke Komnas Dukung Presiden Wanita
10	16 Juli 99	12	Soal Fatwa Capres Wanita MUI Nunggu Pemerintah
11	17 Juli 99	12	Gus Dur : Perempuan Bisa Wajib Jadi Presiden

12	17 Juli 99	12	Nolak atau Dukung Capres Wanita Sama-Sama Sah
13	30 Juli 99	12	Kualitas Caleg Perempuan Masih Samar
14	7 juli 99	12	Akan Bertemu dengan PDI Perjuangan : Hamzah Bawa Fatwa Penolakan Capres Wanita ke Wiranto
15	24 Juli 99	12	Jangan Diam Terus : Sudah Waktunya Si Mbak Turun Gunung
16	20 Agst99	12	Para Kiai Dukung Capres Wanita
17	26 Agst99	1	Benazir Minta Mega Dijinkan Jadi Presiden
18.	26 Agst99	12	Tujuh Partai Islam Ikrar Setia Ke Mega
19.	27 Agst99	12	Kowani Berharap Pada Megawati
20.	5 Sept 99	10	Capres Perempuan Gairahkan Masyarakat Madani
21.	6 Sept 99	12	PDI = Percaya Diri Indonesia
22.	21 Sept 99	12	Mega : Aneh Kok Gamang Menghadapi PDI-P
23	11 Sept 99	4	Khofifah : Gur Dur Muncul Untuk Meredam Konflik
24	27 Nop.99	4	Debra H. Yatim Akui Perempuan Sulit jadi Oposisi : Hapus Saja Istilah Ibu Negara

Reliabilitas antar Pelaku Koding Harian Umum *Kompas*, dapat dilihat berikut ini :

Tabel 14: Korelasi Pelaku Koding untuk kecenderungan sumber berita

Kategori	Pengkoding	Fo	Fe	Fo-Fe	(Fo-Fe) ²	$\frac{(Fo-Fe)^2}{Fe}$
	I	6	6	0	0	0
1. Birokrat	II	6	6	0	0	0
	III	6	6	0	0	0
	I	23	23,3	-0,3	0,09	0
3. Intelektual	II	24	23,3	0,7	0,49	0
	III	23	23,3	-0,3	0,09	0
	I	115	116,3	1,3	1,69	0,01
4. Aktivistis Ormas/LSM	II	116	116,3	-0,3	0,09	0
	III	118	116,3	1,7	2,89	0,02
	I	34	33,7	0,3	0,09	0
5. Aktivistis Parpol	II	33	33,7	-0,7	0,49	0,01
	III	34	33,7	0,3	0,09	0
	I	29	29	0	0	0
6. Pelaku	II	29	29	0	0	0
	III	29	29	0	0	0
	I	82	80,7	1,3	1,69	0,02
7. Sumber Lain	II	81	80,7	0,3	0,09	0
	III	79	80,7	-1,7	2,89	0,04

$$\diamond C = \frac{x^2}{\sqrt{N + x^2}} = \sqrt{0.035} = 0.019$$

$$\diamond IR = (1-C) \times 100\% = (1-0.019) \times 100\% = 0.981 \times 100\% = 98,1$$

Tabel 15: Korelasi Pelaku Koding untuk kecenderungan Keberpihakan

Kategori	Pengkodean	Fo	Fe	Fo-Fe	(Fo-Fe) ²	$\frac{(Fo-Fe)^2}{Fe}$
1. Mendukung	I	92	90	2	4	0.04
	II	88	90	-2	4	0.04
	III	90	90	0	0	0
2. Netral	I	181	183	2	4	0.02
	II	185	183	-2	4	0.02
	III	183	183	0	0	0
3. Menentang	I	16	0	0	0	0
	II	16	0	0	0	0
	III	16	0	0	0	0

$$\diamond C = \frac{x^2}{\sqrt{N+x^2}} = \sqrt{0.045} = 0.020$$

$$\diamond IR = (1-C) \times 100\% = (1-0.20) \times 100\% = 0.98 \times 100\% = 98\%$$

Tabel 15 : Korelasi Pelaku Koding untuk kecenderungan alasan keberpihakan

Kategori	Pengkoding	Fo	Fe	Fo-Fe	(Fo-Fe) ²	$\frac{(Fo-Fe)^2}{Fe}$
Agama	I	41	40,3	0,7	0,49	0,17
	II	40	40,3	0,3	0,09	0,22
	III	40	40,3	0,3	0,09	0,22
Budaya	I	5	5	0	0	0
	II	5	5	0	0	0
	III	5	5	0	0	0
Intelektual	I	37	36	1	1	0,02
	II	35	36	1	1	0,02
	III	36	36	0	0	0
Fisik	I	4	5	1	1	0,5
	II	5	5	0	0	0
	III	6	5	1	1	0,5
Lain-lain	I	5	6	1	1	0,16
	II	7	6	1	1	0,16
	III	6	6	0	0	0

$$\diamond C = \frac{x^2}{\sqrt{N+x^2}} = \sqrt{0.1039} = 0.098$$

$$\diamond IR = (1-C) \times 100\% = (1-0.09) \times 100\% = 0.902 \times 100\% = 90\%$$

Reliabilitas antar Pelaku Koding Harian Umum Rakyat Merdeka dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 17 : Korelasi Pelaku Koding untuk sumber berita

Kategori	Pengkoding	Fo	Fe	Fo-Fe	(Fo-Fe) ²	$\frac{(Fo-Fe)^2}{Fe}$
	I	-	-	-	-	-
1. Birokrat	II	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-
	I	51	51	0	0	0
2. Intelektual	II	51	51	0	0	0
	III	51	51	0	0	0
	I	98	98,7	-0,7	0.49	0.005
4. Aktivistis Ormas/LSM	II	99	98,7	0,3	0.9	0.009
	III	99	98,7	0,3	0.9	0.009
	I	54	54	0	0	0
5. Aktivistis Parpol	II	54	54	0	0	0
	III	54	54	0	0	0
	I	31	31	0	0	0
6. Pelaku	II	31	31	0	0	0
	III	31	31	0	0	0
	I	98	97,3	0,7	0.49	0.005
7. Sumber Lain	II	97	97,3	-0,3	0.9	0.009
	III	97	97,3	-0,3	0.9	0.009

$$\diamond C = \frac{x^2}{\sqrt{N + x^2}} = \sqrt{0.138} = 0.012$$

$$\diamond IR = (1-C) \times 100\% = (1-0.012) \times 100\% = 0.988 \times 100\% = 98,8\%$$

Tabel 18 : Korelasi Pelaku Koding untuk Keberpihakan

Kategori	Pengkoding	Fo	Fe	Fo-Fe	(Fo-Fe) ²	$\frac{(Fo-Fe)^2}{Fe}$
1. Mendukung	I	89	88	1	1	0.01
	II	87	88	-1	1	0.01
	III	88	88	0	0	0
2. Netral	I	223	224,7	-1,7	2.86	0.01
	II	226	224,7	1,3	1.69	0.01
	III	225	224,7	0.3	0.09	0
3. Menentang	I	20	19.3	0.7	0.49	0.03
	II	19	19.3	-0.3	0.09	0
	III	19	19.3	-0.3	0.09	0

$$\diamond C = \frac{x^2}{\sqrt{N + x^2}} = \sqrt{0.021} = 0.016$$

$$\diamond IR = (1-C) \times 100\% = (1-0.016) \times 100\% = 0.984 \times 100\% = 98,4\%$$

Tabel 19 : Korelasi Pelaku Koding untuk kecenderungan alasan keberpihakan

Kategori	Pengkoding	Fo	Fe	Fo-Fe	(Fo-Fe) ²	$\frac{(Fo-Fe)^2}{Fe}$
	I	29	29,3	0,3	0,09	0,30
Agama	II	29	29,3	0,3	0,30	0,30
	III	30	29,3	0,7	0,16	0,16
	I	10	9,6	0,4	0,16	0,16
Budaya	II	9	9,6	0,6	0,37	0,37
	III	10	9,6	0,4	0,16	0,16
	I	31	31	0	0	0
Intelektual	II	31	31	0	0	0
	III	31	31	0	0	0
	I	10	10	0	0	0
Fisik	II	10	10	0	0	0
	III	10	10	0	0	0
	I	7	8	1	1	0,12
Lain-lain	II	8	8	0	0	0
	III	9	8	1	1	0,12

$$\ast C = \frac{x^2}{\sqrt{N+x^2}} = \sqrt{0.065} = 0.0806$$

$$\ast IR = (1-C) \times 100\% = (1-0.0806) \times 100\% = 0.914 \times 100\% = 91\%$$

CODING BOOK

Kolom	Variabel	Nomor Variabel	Kategori	Kode
1	Nomor Artikel	1-51	-	-
2	Nomor Paragraf	1-621	-	-
3	Sumber Berita	1-621	Birokrat	1
			Intelektual	2
			Aktivis Ormas/LSM	3
			Aktivis Parpol	4
			Pelaku	5
			Sumber Lain	6
4	Jenis Kelamin Sumber	1-621	Perempuan	1
			Laki-Laki	2
5	Sifat Keberpihakan	1-621	Mendukung	1
			Netral	2
			Menentang	3
6	Alasan Keberpihakan	1-621	Agama	1
			Budaya/tradisi	2
			Intelektualitas/kemampuan	3
			Fisik	4
			Lain-Lain	5
7	Alasan Ketidak-berpihakan	1-621	Agama	1
			Budaya/tradisi	2
			Intelektualitas/kemampuan	3
			Fisik	4
			Lain-Lain	5

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var00008
1	1	1	3	1	1	5	.	1
2	.	2	6	2	2	.	.	1
3	.	3	3	1	1	5	.	1
4	.	4	3	1	1	5	.	1
5	.	5	3	1	1	5	.	1
6	.	6	6	2	2	.	.	1
7	.	7	3	1	1	3	.	1
8	.	8	3	1	1	3	.	1
9	.	9	3	1	1	4	.	1
10	.	10	2	1	1	3	.	1
11	.	11	2	1	1	4	.	1
12	.	12	2	1	1	3	.	1
13	.	13	2	1	1	3	.	1
14	.	14	2	1	1	5	.	1
15	.	15	3	2	2	.	.	1
16	.	16	3	2	1	1	.	1
17	.	17	3	2	1	5	.	1
18	.	18	3	2	1	3	.	1
19	.	19	3	2	2	.	.	1
20	.	20	3	2	2	.	.	1
21	2	21	3	2	1	3	.	1
22	.	22	3	2	2	.	.	1
23	.	23	3	2	1	5	.	1
24	.	24	3	2	2	.	.	1
25	3	25	5	2	1	4	.	1
26	.	26	5	2	1	3	.	1
27	.	27	5	2	1	3	.	1
28	.	28	5	2	1	3	.	1
29	.	29	5	2	1	3	.	1
30	.	30	5	2	1	3	.	1
31	4	31	3	2	2	.	.	1
32	.	32	3	2	2	.	.	1
33	.	33	3	2	2	.	.	1
34	.	34	3	2	2	.	.	1
35	.	35	3	2	2	.	.	1
36	.	36	3	2	1	1	.	1
37	.	37	3	2	1	1	.	1
38	Victor Menyag...	38	3	2	1	1	.	1
39	g, Orientasi P...	39	6	2	2	.	.	1
	emberitaan M...							
	FISIPLU, 2000							

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var00008
40	.	40	4	2	1	4	.	1
41	.	41	4	2	1	4	.	1
42	.	42	6	2	2	.	.	1
43	.	43	6	2	2	.	.	1
44	.	44	6	2	2	.	.	1
45	5	45	3	2	2	.	.	1
46	.	46	3	2	2	.	.	1
47	.	47	3	2	2	.	.	1
48	.	48	3	2	2	.	.	1
49	.	49	3	2	2	.	.	1
50	.	50	3	2	2	.	.	1
51	.	51	3	2	2	.	.	1
52	.	52	3	2	2	.	.	1
53	.	53	3	2	2	.	.	1
54	.	54	3	2	2	.	.	1
55	.	55	3	2	2	.	.	1
56	.	56	3	2	1	1	.	1
57	.	57	3	2	3	.	1	1
58	.	58	3	2	2	.	.	1
59	.	59	3	2	2	.	.	1
60	.	60	3	2	2	.	.	1
61	.	61	6	2	2	.	.	1
62	.	62	4	2	2	.	.	1
63	.	63	4	2	2	.	.	1
64	6	64	3	1	3	.	3	1
65	.	65	3	1	1	3	.	1
66	.	66	6	2	2	.	.	1
67	.	67	6	2	2	.	.	1
68	.	68	6	2	1	3	.	1
69	.	69	6	2	1	3	.	1
70	.	70	3	1	1	3	.	1
71	.	71	3	1	1	3	.	1
72	.	72	3	1	1	3	.	1
73	7	73	6	2	3	.	3	1
74	.	74	6	2	3	.	3	1
75	.	75	6	2	2	.	.	1
76	.	76	6	2	3	.	3	1
77	Victor Menayang, Orientasi Pemberitaan Media FISIPU, 2000	77	6	2	3	.	3	1
78	.	78	4	2	2	.	.	1

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var00008
79	.	79	4	2	2	.	.	1
80	.	80	4	2	2	.	.	1
81	.	81	4	2	2	.	.	1
82	.	82	4	2	2	.	.	1
83	8	83	6	2	1	3	.	1
84	.	84	5	2	1	3	.	1
85	.	85	6	2	2	.	.	1
86	.	86	6	2	2	.	.	1
87	.	87	6	2	1	2	.	1
88	.	88	6	2	1	2	.	1
89	.	89	6	2	3	.	2	1
90	.	90	6	2	3	.	1	1
91	.	91	6	2	2	.	.	1
92	.	92	6	2	2	.	.	1
93	.	93	6	2	2	.	.	1
94	.	94	6	2	1	2	.	1
95	.	95	6	2	1	3	.	1
96	9	96	4	2	1	3	.	1
97	.	97	4	2	2	.	.	1
98	.	98	4	2	2	.	.	1
99	.	99	4	2	2	.	.	1
100	.	100	2	2	2	.	.	1
101	.	101	4	2	2	.	.	1
102	.	102	2	2	2	.	.	1
103	.	103	2	2	2	.	.	1
104	.	104	2	2	2	.	.	1
105	.	105	2	2	2	.	.	1
106	.	106	2	2	2	.	.	1
107	.	107	2	2	2	.	.	1
108	.	108	3	2	2	.	.	1
109	.	109	4	2	2	.	.	1
110	10	110	3	2	1	3	.	1
111	.	111	3	2	2	.	.	1
112	.	112	3	2	2	.	.	1
113	.	113	3	2	1	3	.	1
114	.	114	3	2	2	.	.	1
115	.	115	3	2	2	.	.	1
116	.	Victor Menaya, Orentasi Pemberitaan Media ... FISIP 21, 2000	1
117	.	117	3	2	2	.	.	1

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var00008
118	,	118	3	2	2	,	,	1
119	,	119	3	2	2	,	,	1
120	,	120	3	2	2	,	,	1
121	11	121	4	1	1	3	,	1
122	,	122	4	1	1	3	,	1
123	,	123	6	2	1	4	,	1
124	,	124	6	2	2	,	,	1
125	,	125	6	2	1	4	,	1
126	,	126	4	1	1	3	,	1
127	,	127	4	1	1	1	,	1
128	,	128	6	2	2	,	,	1
129	12	129	6	2	3	,	4	1
130	,	130	6	2	3	,	4	1
131	,	131	6	2	2	,	,	1
132	,	132	6	2	2	,	,	1
133	,	133	6	2	2	,	,	1
134	,	134	6	2	3	,	1	1
135	,	135	6	2	2	,	,	1
136	,	136	6	2	2	,	,	1
137	,	137	3	2	2	,	,	1
138	13	138	3	1	1	3	,	1
139	,	139	6	2	2	,	,	1
140	,	140	3	1	2	,	,	1
141	,	141	3	1	1	1	,	1
142	,	142	3	1	2	,	,	1
143	,	143	3	1	2	,	,	1
144	14	144	3	2	1	1	,	1
145	,	145	3	2	2	,	,	1
146	,	146	6	2	2	,	,	1
147	,	147	3	2	1	1	,	1
148	,	148	3	2	2	,	,	1
149	15	149	6	2	1	1	,	1
150	,	150	6	2	1	5	,	1
151	,	151	4	2	1	5	,	1
152	,	152	6	2	2	,	,	1
153	,	153	3	2	1	1	,	1
154	,	154	3	2	1	1	,	1
155	Victor Menayang, Orientasi Pemberitaan Media FISIPU, 2000	155	3	2	1	1	,	1
156	,	156	3	2	1	1	,	1

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var00008
157	.	157	3	2	2	.	.	1
158	.	158	3	1	2	.	.	1
159	.	159	3	1	1	1	.	1
160	.	160	3	2	1	1	.	1
161	16	161	6	2	2	.	.	1
162	.	162	4	2	2	.	.	1
163	.	163	4	2	2	.	.	1
164	.	164	4	2	2	.	.	1
165	.	165	4	2	2	.	.	1
166	.	166	6	2	2	.	.	1
167	.	167	6	2	2	.	.	1
168	.	168	4	2	1	5	.	1
169	.	169	4	2	2	.	.	1
170	.	170	4	2	2	.	.	1
171	.	171	4	2	1	1	.	1
172	.	172	6	2	2	.	.	1
173	.	173	3	2	1	3	.	1
174	.	174	3	2	2	.	.	1
175	.	175	4	2	2	.	.	1
176	.	176	4	2	1	1	.	1
177	.	177	4	2	2	.	.	1
178	.	178	5	2	2	.	.	1
179	.	179	5	2	2	.	.	1
180	.	180	3	2	2	.	.	1
181	.	181	3	2	2	.	.	1
182	.	182	3	2	2	.	.	1
183	.	183	3	2	3	.	3	1
184	17	184	3	2	2	.	.	1
185	.	185	3	2	2	.	.	1
186	.	186	3	2	2	.	.	1
187	.	187	3	2	2	.	.	1
188	.	188	3	2	2	.	.	1
189	.	189	3	2	2	.	.	1
190	.	190	3	2	2	.	.	1
191	.	191	3	2	2	.	.	1
192	.	192	3	2	1	1	.	1
193	.	193	3	2	2	.	.	1
194	.	Victor Menayong, Orientasi Pemberitaan Media ... FISIPU, 2000	3	2	2	.	.	1
195	.	195	3	2	2	.	.	1

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var00008
196	18	196	3	2	1	1	.	1
197	.	197	3	2	1	1	.	1
198	.	198	3	2	1	1	.	1
199	.	199	3	2	1	1	.	1
200	.	200	3	2	1	1	.	1
201	19	201	5	2	2	.	.	1
202	.	202	5	2	2	.	.	1
203	.	203	5	2	2	.	.	1
204	.	204	5	2	2	.	.	1
205	.	205	3	2	2	.	.	1
206	.	206	3	2	2	.	.	1
207	.	207	3	2	2	.	.	1
208	.	208	3	2	2	.	.	1
209	.	209	3	2	2	.	.	1
210	.	210	3	2	2	.	.	1
211	.	211	3	2	2	.	.	1
212	20	212	2	2	2	.	.	1
213	.	213	6	2	2	.	.	1
214	.	214	6	2	2	.	.	1
215	.	215	2	2	2	.	.	1
216	.	216	3	1	1	3	.	1
217	21	217	6	2	2	.	.	1
218	.	218	6	2	2	.	.	1
219	.	219	6	2	2	.	.	1
220	.	220	6	2	2	.	.	1
221	.	221	6	2	2	.	.	1
222	.	222	6	2	2	.	.	1
223	.	223	6	2	2	.	.	1
224	.	224	6	2	2	.	.	1
225	.	225	6	2	2	.	.	1
226	.	226	6	2	2	.	.	1
227	.	227	6	2	2	.	.	1
228	22	228	6	2	1	3	.	1
229	.	229	5	1	1	3	.	1
230	.	230	5	1	1	1	.	1
231	.	231	5	1	1	3	.	1
232	.	232	6	2	2	.	.	1
233	Victor Menayang, Orientasi Pemberitaan Media FISIPUI, 2000	233	6	2	2	.	.	1
234	.	234	6	2	2	.	.	1

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var00008
235	,	235	6	2	2	,	,	1
236	,	236	4	2	1	3	,	1
237	,	237	4	2	2	,	,	1
238	,	238	4	2	2	,	,	1
239	,	239	6	2	2	,	,	1
240	,	240	6	2	2	,	,	1
241	,	241	6	2	2	,	,	1
242	,	242	6	2	2	,	,	1
243	23	243	3	2	3	,	1	1
244	,	244	3	2	3	,	1	1
245	,	245	3	2	2	,	,	1
246	,	246	3	2	2	,	,	1
247	,	247	3	2	1	1	,	1
248	,	248	3	2	2	,	,	1
249	,	249	3	2	2	,	,	1
250	24	250	2	1	1	3	,	1
251	,	251	2	1	2	,	,	1
252	,	252	6	2	2	,	,	1
253	,	253	2	1	1	3	,	1
254	25	254	6	2	1	3	,	1
255	,	255	6	2	2	,	,	1
256	,	256	6	2	1	4	,	1
257	,	257	6	2	3	,	2	1
258	,	258	3	2	2	,	,	1
259	,	259	3	2	2	,	,	1
260	,	260	3	2	1	1	,	1
261	,	261	3	2	2	,	,	1
262	,	262	3	2	3	,	1	1
263	,	263	2	2	2	,	,	1
264	,	264	2	2	2	,	,	1
265	,	265	2	2	2	,	,	1
266	,	266	2	2	1	1	,	1
267	26	267	5	1	1	3	,	1
268	,	268	5	1	2	,	,	1
269	,	269	5	1	1	1	,	1
270	,	270	5	1	2	,	,	1
271	,	271	5	1	2	,	,	1
272	Victor Menayanti, Orientasi Pemberitaan Media FISIPU 2000	272	5	1	2	,	,	1
273	,	273	5	1	2	,	,	1

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var00008
274	.	274	5	1	2	.	.	1
275	.	275	5	1	2	.	.	1
276	.	276	6	2	2	.	.	1
277	.	277	5	1	2	.	.	1
278	.	278	5	1	2	.	.	1
279	.	279	5	1	2	.	.	1
280	.	280	6	2	2	.	.	1
281	27	281	1	2	1	1	.	1
282	.	282	6	2	2	.	.	1
283	.	283	1	2	2	.	.	1
284	.	284	1	2	1	1	.	1
285	.	285	1	2	1	1	.	1
286	.	286	1	2	2	.	.	1
287	.	287	1	2	1	1	.	1
288	.	288	2	2	1	2	.	1
289	.	289	2	2	2	.	.	1
290	28	290	6	2	3	.	5	2
291	.	291	6	2	3	.	1	2
292	.	292	4	2	3	.	1	2
293	.	293	6	2	2	.	.	2
294	.	294	4	2	2	.	.	2
295	.	295	4	2	3	.	1	2
296	.	296	4	2	2	.	.	2
297	.	297	4	2	2	.	.	2
298	.	298	4	2	2	.	.	2
299	.	299	6	2	2	.	.	2
300	.	300	4	2	2	.	.	2
301	.	301	6	2	2	.	.	2
302	.	302	6	2	2	.	.	2
303	.	303	4	2	2	.	.	2
304	29	304	6	2	1	1	.	2
305	.	305	6	2	2	.	.	2
306	.	306	6	2	1	4	.	2
307	.	307	3	2	2	.	.	2
308	.	308	6	2	2	.	.	2
309	30	309	6	2	2	.	.	2
310	.	310	6	2	2	.	.	2
311	Victor Menayang, Orientasi Pemberitaan Media FISIPUI, 2000	311	6	2	2	3	.	2
312	.	312	6	2	2	.	.	2

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var00008
313	.	313	3	2	1	2	.	2
314	.	314	3	2	1	1	.	2
315	.	315	3	2	2	.	.	2
316	.	316	3	2	2	.	.	2
317	.	317	2	2	1	1	.	2
318	31	318	2	2	3	.	1	2
319	.	319	2	2	3	.	1	2
320	.	320	6	2	2	.	.	2
321	.	321	2	2	2	.	.	2
322	.	322	2	2	3	.	1	2
323	.	323	2	2	2	.	.	2
324	.	324	2	2	2	.	.	2
325	.	325	2	2	2	.	.	2
326	.	326	2	2	2	.	.	2
327	.	327	2	2	2	.	.	2
328	.	328	2	2	2	.	.	2
329	.	329	2	2	1	1	.	2
330	.	330	2	2	1	1	.	2
331	.	331	2	2	2	.	.	2
332	32	332	6	2	2	.	.	2
333	.	333	3	2	2	.	.	2
334	.	334	3	2	2	.	.	2
335	.	335	3	2	2	.	.	2
336	.	336	3	2	2	.	.	2
337	.	337	3	2	2	.	.	2
338	.	338	3	2	1	1	.	2
339	.	339	3	2	1	1	.	2
340	.	340	3	2	2	.	.	2
341	.	341	3	2	2	.	.	2
342	.	342	3	2	2	.	.	2
343	.	343	3	2	2	.	.	2
344	.	344	3	2	2	.	.	2
345	.	345	3	2	2	.	.	2
346	33	346	2	2	1	5	.	2
347	.	347	2	2	1	5	.	2
348	.	348	2	2	1	5	.	2
349	.	349	2	2	2	.	.	2
350	Victor Menyara	350	2	2	2	.	.	2
351		351	2	2	2	.	.	2

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var00008
352	.	352	2	2	2	.	.	2
353	.	353	2	2	2	.	.	2
354	.	354	2	2	1	5	.	2
355	.	355	2	2	2	.	.	2
356	34	356	6	2	2	.	.	2
357	.	357	6	2	2	.	.	2
358	.	358	6	2	2	.	.	2
359	.	359	3	2	2	.	.	2
360	.	360	3	2	2	.	.	2
361	.	361	3	2	2	.	.	2
362	.	362	3	2	2	.	.	2
363	.	363	3	2	2	.	.	2
364	.	364	3	2	1	1	.	2
365	.	365	3	2	2	.	.	2
366	.	366	3	2	2	.	.	2
367	.	367	3	2	2	.	.	2
368	.	368	3	2	2	.	.	2
369	.	369	3	2	2	.	.	2
370	.	370	3	2	2	.	.	2
371	.	371	3	2	2	.	.	2
372	.	372	3	2	2	.	.	2
373	.	373	3	2	2	.	.	2
374	.	374	3	2	2	.	.	2
375	.	375	3	2	2	.	.	2
376	35	376	6	2	3	.	1	2
377	.	377	6	2	2	.	.	2
378	.	378	6	2	2	.	.	2
379	.	379	6	2	2	.	.	2
380	.	380	6	2	2	.	.	2
381	.	381	3	2	2	.	.	2
382	.	382	3	2	3	.	1	2
383	.	383	6	2	2	.	.	2
384	.	384	6	2	3	.	1	2
385	.	385	4	2	3	.	1	2
386	.	386	4	2	2	.	.	2
387	.	387	4	2	2	.	.	2
388	.	388	4	2	2	.	.	2
389	.	389	4	2	2	.	.	2
390	36	390	5	2	2	.	.	2

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var00008
391	,	391	6	2	2	,	,	2
392	,	392	6	2	1	3	,	2
393	,	393	6	2	2	,	,	2
394	,	394	6	2	2	,	,	2
395	,	395	3	1	1	3	,	2
396	,	396	3	1	1	5	,	2
397	37	397	6	2	2	,	,	2
398	,	398	3	2	2	,	,	2
399	,	399	6	2	2	,	,	2
400	,	400	3	2	2	,	,	2
401	,	401	3	2	2	,	,	2
402	,	402	3	2	2	,	,	2
403	,	403	3	2	2	,	,	2
404	,	404	3	2	2	,	,	2
405	38	405	3	2	1	1	,	2
406	,	406	3	2	1	4	,	2
407	,	407	6	2	2	,	,	2
408	,	408	3	2	2	,	,	2
409	,	409	3	2	1	3	,	2
410	,	410	3	2	1	1	,	2
411	,	411	3	2	1	3	,	2
412	,	412	3	2	1	1	,	2
413	,	413	6	2	2	,	,	2
414	39	414	6	2	1	4	,	2
415	,	415	6	2	1	1	,	2
416	,	416	6	2	2	,	,	2
417	,	417	6	2	2	,	,	2
418	,	418	4	2	2	,	,	2
419	,	419	4	2	2	,	,	2
420	40	420	6	2	2	,	,	2
421	,	421	6	2	2	,	,	2
422	,	422	2	2	1	3	,	2
423	,	423	2	2	2	,	,	2
424	,	424	2	2	2	,	,	2
425	,	425	3	1	1	3	,	2
426	,	426	3	1	1	3	,	2
427	,	427	3	1	1	3	,	2
428	Victor Menayang, Orientasi Pemberitaan Media FISIPU, 2000	428	3	3	3	,	,	2
429	,	429	2	2	2	,	,	2

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var00008
430		430	2	2	1	3		2
431		431	2	2	3		3	2
432		432	2	2	2			2
433		433	2	2	2			2
434		434	2	2	2			2
435		435	2	2	2			2
436		436	2	2	2			2
437		437	2	2	2			2
438		438	2	2	1	3		2
439	41	439	6	2	2			2
440		440	6	2	2			2
441		441	4	2	3		1	2
442		442	6	2	2			2
443		443	4	2	2			2
444		444	4	2	2			2
445		445	4	2	2			2
446		446	4	2	2			2
447		447	4	2	3		1	2
448		448	4	2	3		1	2
449		449	4	2	2			2
450		450	4	2	2			2
451	42	451	2	2	2			2
452		452	2	2	2			2
453		453	2	2	2			2
454		454	2	2	2			2
455		455	2	2	2			2
456		456	2	2	1	3		2
457		457	2	2	1	3		2
458		458	2	2	1	3		2
459		459	2	2	2			2
460		460	2	2	2			2
461		461	2	2	2			2
462		462	2	2	2			2
463		463	2	2	2			2
464		464	2	2	2			2
465	43	465	6	2	2			2
466		466	6	2	1	1		2
467	Victor Menayung, Orientasi Pemberitaan Media FISIPUI, 2000				1			2
468		468	3	2	1	1		2

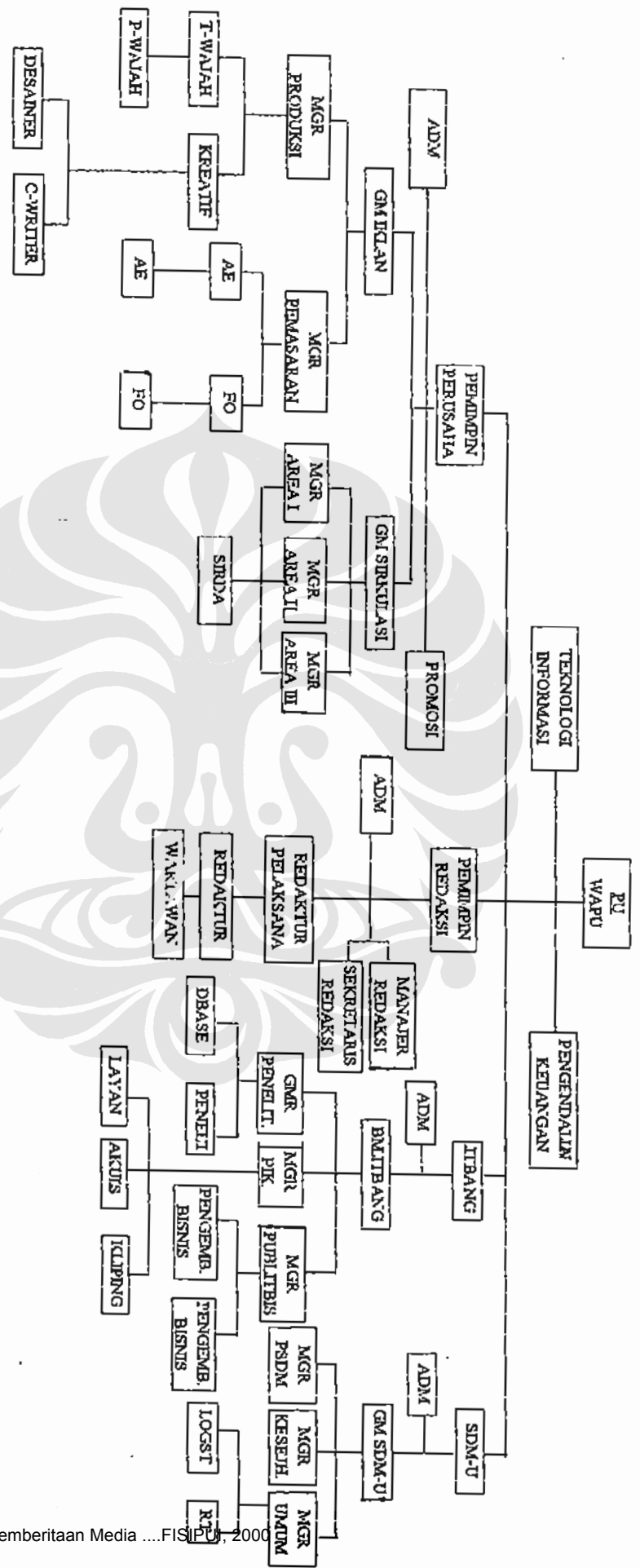
	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var00008
469	,	469	6	2	1	1	,	2
470	,	470	6	2	2	,	,	2
471	,	471	6	2	2	,	,	2
472	,	472	6	2	1	1	,	2
473	,	473	6	2	1	3	,	2
474	,	474	6	2	1	3	,	2
475	,	475	6	2	2	,	,	2
476	,	476	6	2	1	1	,	2
477	44	477	6	1	1	5	,	2
478	,	478	6	1	1	5	,	2
479	,	479	6	1	1	4	,	2
480	,	480	6	1	1	5	,	2
481	,	481	6	1	1	5	,	2
482	,	482	6	2	2	,	,	2
483	45	483	6	2	1	5	,	2
484	,	484	4	2	1	5	,	2
485	,	485	6	2	1	5	,	2
486	,	486	6	2	1	5	,	2
487	,	487	6	2	2	,	,	2
488	,	488	4	2	1	5	,	2
489	,	489	4	2	2	,	,	2
490	,	490	4	2	1	5	,	2
491	,	491	4	2	2	,	,	2
492	,	492	4	2	2	,	,	2
493	,	493	4	2	1	5	,	2
494	,	494	4	2	1	5	,	2
495	,	495	4	2	1	1	,	2
496	,	496	4	2	2	,	,	2
497	,	497	4	2	2	,	,	2
498	,	498	4	2	2	,	,	2
499	46	499	6	2	2	,	,	2
500	,	500	6	2	1	5	,	2
501	,	501	3	1	2	,	,	2
502	,	502	3	1	2	,	,	2
503	,	503	3	1	2	,	,	2
504	,	504	3	1	2	,	,	2
505	,	505	3	1	1	5	,	2
506	Victor Menaya, Orientasi Pemberitaan Media FISIPUJ 2000						,	2
507	,	507	3	1	2	,	,	2

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var00008
508	.	508	3	1	1	4	.	2
509	47	509	6	2	2	.	.	2
510	.	510	3	1	1	3	.	2
511	.	511	5	1	1	5	.	2
512	.	512	5	1	2	.	.	2
513	.	513	5	1	1	5	.	2
514	.	514	3	1	1	2	.	2
515	.	515	3	1	1	2	.	2
516	.	516	3	1	1	5	.	2
517	.	517	3	1	1	4	.	2
518	.	518	3	1	1	2	.	2
519	.	519	3	1	1	5	.	2
520	.	520	5	1	1	2	.	2
521	.	521	5	1	1	2	.	2
522	48	522	6	2	2	.	.	2
523	.	523	6	2	2	.	.	2
524	.	524	4	1	2	.	.	2
525	.	525	6	2	2	.	.	2
526	.	526	4	1	2	.	.	2
527	.	527	4	1	2	.	.	2
528	.	528	4	1	2	.	.	2
529	.	529	4	1	1	4	.	2
530	.	530	4	1	2	.	.	2
531	49	531	4	2	2	.	.	2
532	.	532	4	2	2	.	.	2
533	.	533	4	2	2	.	.	2
534	.	534	4	2	2	.	.	2
535	.	535	4	2	1	2	.	2
536	.	536	4	2	2	.	.	2
537	.	537	4	2	2	.	.	2
538	.	538	4	2	2	.	.	2
539	.	539	4	2	2	.	.	2
540	.	540	4	2	2	.	.	2
541	.	541	4	2	2	.	.	2
542	.	542	4	2	2	.	.	2
543	.	543	6	2	1	1	.	2
544	50	544	6	1	2	.	.	2
545	Victor Menaya, Orientasi Pemberitaan Media FISIPUI22000						.	2
546	.	546	5	1	2	.	.	2

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var00008
547	.	547	5	1	2	.	.	2
548	.	548	6	2	2	.	.	2
549	.	549	5	1	2	.	.	2
550	.	550	6	2	2	.	.	2
551	.	551	4	1	2	.	.	2
552	.	552	6	2	2	.	.	2
553	.	553	5	1	2	.	.	2
554	.	554	6	2	2	.	.	2
555	.	555	5	1	2	.	.	2
556	.	556	6	2	2	.	.	2
557	.	557	5	1	2	.	.	2
558	.	558	5	1	2	.	.	2
559	.	559	6	2	2	.	.	2
560	.	560	5	1	2	.	.	2
561	.	561	6	2	2	.	.	2
562	.	562	5	1	2	.	.	2
563	.	563	6	2	2	.	.	2
564	.	564	5	1	2	.	.	2
565	.	565	5	1	2	.	.	2
566	.	566	6	2	1	5	.	2
567	.	567	5	1	2	.	.	2
568	.	568	5	1	2	.	.	2
569	.	569	6	2	2	.	.	2
570	.	570	5	1	2	.	.	2
571	.	571	5	1	2	.	.	2
572	.	572	5	1	2	.	.	2
573	.	573	6	2	2	.	.	2
574	.	574	5	1	2	.	.	2
575	.	575	6	2	2	.	.	2
576	.	576	5	1	2	.	.	2
577	.	577	5	1	2	.	.	2
578	.	578	5	1	2	.	.	2
579	.	579	6	2	2	.	.	2
580	.	580	5	1	2	.	.	2
581	.	581	6	2	2	.	.	2
582	.	582	5	1	2	.	.	2
583	.	583	5	1	2	.	.	2
584	.	584	5	1	2	.	.	2
585	.	585	5	1	1	3	.	2

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var00008
586	,	586	5	1	1	3	,	2
587	51	587	6	2	2	,	,	2
588	,	588	6	2	2	,	,	2
589	,	589	3	1	1	2	,	2
590	,	590	3	1	2	,	,	2
591	,	591	3	1	1	3	,	2
592	,	592	6	2	2	,	,	2
593	,	593	3	1	2	,	,	2
594	,	594	3	1	3	,	1	2
595	,	595	3	1	1	2	,	2
596	,	596	3	1	3	,	3	2
597	,	597	3	1	1	5	,	2
598	,	598	3	1	3	,	3	2
599	,	599	3	1	1	2	,	2
600	,	600	3	1	2	,	,	2
601	,	601	3	1	3	,	2	2
602	,	602	3	1	1	4	,	2
603	,	603	3	1	1	3	,	2
604	,	604	6	2	2	,	,	2
605	,	605	3	1	2	,	,	2
606	,	606	3	1	2	,	,	2
607	,	607	3	1	2	,	,	2
608	,	608	3	1	2	,	,	2
609	,	609	3	1	2	,	,	2
610	,	610	6	2	2	,	,	2
611	,	611	3	1	2	,	,	2
612	,	612	6	2	2	,	,	2
613	,	613	3	1	2	,	,	2
614	,	614	3	1	2	,	,	2
615	,	615	6	2	2	,	,	2
616	,	616	3	1	2	,	,	2
617	,	617	3	1	1	3	,	2
618	,	618	3	1	1	3	,	2
619	,	619	3	1	1	4	,	2
620	,	620	3	1	2	,	,	2
621	,	621	3	1	2	,	,	2

STRUKTUR ORGANISASI
PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA



STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN REDAKSI HARIAN UMUM RAKYAT MERDEKA



Inkonstitusional, Tolak Perempuan Jadi Presiden

137

Jakarta, Kompas

• Mereka yang menyatakan, perempuan tidak dapat menjadi presiden Indonesia telah bersikap inkonstitusional. Selain itu, mereka yang mendiskriminasi hak politik perempuan untuk menjadi presiden, pemimpin negara, dan pemerintahan, tidak memahami makna demokrasi dan keadilan.

• Demikian pernyataan terbuka anggota masyarakat peduli hak politik yang disampaikan antara lain oleh Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Prof Dr Saparinah Sadli, Direktur Eksekutif

Mitra Perempuan Rita Serena Kolibonso, dan aktivis Ratna Sarumpaet dalam, jumpa pers, di Jakarta, Jumat (25/6).

• Menurut Saparinah, pernyataan terbuka yang disampaikan bukan untuk mendukung partai politik tertentu, tetapi untuk menanggapi pernyataan-pernyataan berbagai pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, golongan dan pakar yang mendiskreditkan hak politik perempuan untuk menjadi presiden Indonesia.

• Dikatakan Saparinah, mereka

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-4)

Inkonstitusional — — (Sambungan dari halaman 1)

yang menyatakan, perempuan tidak dapat menjadi Presiden Indonesia telah bersikap inkonstitusional. Persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki sebagai warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan dilindungi oleh UUD 1945 pasal 27.

Dalam pernyataan bersama masyarakat peduli hak politik tersebut, dinyatakan, mereka yang mendiskriminasi hak politik perempuan untuk menjadi presiden, pemimpin negara dan pemerintahan, tidak memahami makna demokrasi dan keadilan.

Pemandatanganan surat pernyataan terbuka 22 Juni 1999 itu antara lain Saparinah Sadli, Nuriyah Rahman Wahid, Myra Diarsi, Om Komariah Madjid MA, TO Ikhromi, Mayling Oey, Erna Witoelar, Ratna Sarumpaet, Ita F Nadia, Kusparmono Irsan, Karlina, Leksiono-Supelli, Chusnul Mar'iyah, Arief Budiman, Todung Mulya Lubis, Dewi Fortuna Anwar, Khofifah Indar Parawansa, Alois Nugroho, Apang Herlina Marie Pangestu, Asmara Nababan, Toeti Heraty, Marzuki Darusman, dan Emil Salim.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kata mereka, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Politik Perempuan 1953 menjadi Undang-Undang (UU) No 68/1958 dan meratifikasi Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979 menjadi UU No 7/1984.

Dinyatakan, kedua konvensi tersebut mengakui dan melindungi hak-hak politik perem-

puan khususnya hak-hak perempuan untuk memilih dan dipilih serta memegang jabatan dalam pemerintahan dengan kedudukan yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi. "Dalam era reformasi, seharusnya kita sudah meninggalkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang menjadi karakteristik era masa lalu," demikian pernyataan tersebut.

Sikap APPI

Asosiasi Pemerhati Perempuan Indonesia (APPI) juga menyesalkan pernyataan elite politik, pejabat atau golongan yang menyebutkan perempuan tidak dibenarkan menjadi pemimpin negara. Pendapat itu merupakan pelecehan, penghinaan, dan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Demikian diungkapkan Koordinator APPI Dr Hesti R Wijaya di Surabaya, Sabtu lalu. Menurut pandangan Hesti, selama ini berkembang persepsi di kalangan masyarakat Indonesia, perempuan sebagai manusia kelas dua dibandingkan kaum lelaki.

Berangkat dari kenyataan ini, kata dosen Universitas Brawijaya Malang ini, sebenarnya tidak semua orang yang berpendidikan tinggi otomatis mampu menjadi pemimpin bangsa. Sementara, seorang pemimpin organisasi masyarakat (ormas) atau parpol justru memiliki kemampuan memimpin dari pengalamannya. "Sangat keliru, jika pendidikan formal sebagai faktor penentu kemampuan kepemimpinan seseorang," katanya.

Seperti dalam persoalan Megawati Soekarnoputri, yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan,

secara tidak langsung diakui atau tidak putri Presiden RI pertama itu telah lama berkecimpung dalam dunia politik dan juga telah menjalani berbagai penganiayaan politik, tekanan serta berbagai macam penindasan hak asasinya.

Sepak terjangnya di dunia politik, kata Hesti, membuat Megawati menjadi matang dan dewasa dalam berpolitik. Kematangan dan kedewasaan Megawati pula mengakibatkan dirinya dipandang sebagai lawan politik oleh kelompok *status quo* selama Orde Baru.

Padahal, katanya, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak 1975 telah mencanangkan dasarwarsa perempuan untuk pembangunan, keselarasan perempuan dan laki-laki serta perdamaian (*development, equality and peace*). Jadi bagi APPI, keadaan seperti ini tidak bisa dibenarkan terus berkepanjangan dan era reformasi inilah saatnya seluruh masyarakat Indonesia, baik perempuan maupun lelaki, saling menghargai dan mendukung, serta memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memimpin bangsa ini.

Apalagi, pada Undang-Undang No 7/1984 secara tegas telah diratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. "Sayangnya belum banyak langkah konkret demi terwujudnya cita-cita dari UU itu sendiri," katanya.

Sikap Ansor

Pejabat Ketua Umum GP Ansor Syaifulloh Yusuf mengatakan, sesuai kewajaran dan kenormalan demokrasi, partai pemenang pemilu seharusnya diberi kesempatan pertama membentuk pemerintahan. Dalam

masa belajar demokrasi, mestinya bangsa Indonesia tidak menyinggung dari kewajaran dan kenormalan demokrasi.

"Kalau soal pemimpin wanita, Munas Alim Ulama NU di Mataram 'kan sudah menegakkan, wanita boleh ikut berpolitik. Secara tidak langsung, itu 'kan isyarat bahwa wanita boleh menjadi pemimpin politik," tegas Syaifulloh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

Dukungan riil sekitar 25 juta rakyat terhadap Megawati, kata Syaifulloh, tidak boleh dinafikan oleh anggota MPR yang akan bersidang. "Dilihat dari segi apa pun, 'kan lucu jika MPR tidak menyuarakan suara yang paling nyaring disuarakan rakyat," ujarnya.

Untuk bisa membentuk pemerintahan, kata Syaifulloh, PDI Perjuangan memang harus berkoalisi dengan partai lain. "Tetapi, penghitungan belum selesai, orang sudah ribut, dengan isu yang sama sekali tidak demokratis. Gender-lah, itulah. Nanti, kalau sudah jelas berapa kursinya, baru bisa diketahui siapa partner koalisi PDI Mega," ujar calon legislatif PDI Perjuangan asal DKI Jakarta ini.

Menyinggung soal pertemuan Gus Dur dan Amien, Syaifulloh kedua tokoh tersebut punya kepentingan lebih besar dibanding hanya soal calon presiden. Dan, sebagai demokrat Gus Dur dan Amien tentu tidak akan kendor dari pakem demokrasi.

"Saya bisa mengerti adanya pertemuan itu. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. 'Kan Gus Dur bilang, peta politik yang riil baru bisa dilihat setelah berakhirnya penghitungan suara oleh KPU," tegasnya.

(Serbi/eta/aha)

Pandangan Islam tentang Perempuan Belum Dipahami Secara Utuh

Jakarta, Kompas

1 Munculnya polemik tentang pandangan Islam terhadap kepemimpinan perempuan akhir-akhir ini menunjukkan belum dipahaminya pandangan Islam tentang perempuan secara utuh dan menyeluruh.

2 Demikian Ketua Panitia Muktamar XXX Nahdlatul Ulama (NU) Dr Said Aqiel Syadj dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/7). Menyahuti kondisi itu, Panitia Muktamar XXX NU mengadakan seminar "Fiqhunnisa': Tafsir Wacana Gender dalam Konstektualisasi Pemikiran Islam Klasik". Ke-

giatan ini dilaksanakan di Baturaden Purwokerto Jateng, tanggal 16 - 17 Juli 1999.

3 Tampil sebagai pembicara dalam seminar yang akan diikuti sekitar 250 peserta, adalah Ketua Umum Pengurus Besar NU (PB NU) Abdurrahman Wahid, KH Masduqi Mahfudz, Sinta Nuriyah Rahman, Masdar F Mas'udi, KH Husen Muhammad, Mohammad Sobary, Musda Mulia, Mansour Faqih, Khofifah Indar Parawansa, dan Chusnul Maryah. Topik yang dibahas adalah "Gender dalam Perspektif Teologis, Gender dalam Perspektif Budaya, dan Gender da-

lam Perspektif Politik".

4 Said Aqiel, yang juga Khatib Aam Syuriah PB NU, menolak anggapan bahwa seminar ini dilaksanakan untuk melancarkan jalan bagi Megawati Soekarnoputri menjadi calon presiden. "Ini bukan pembelaan terhadap siapa pun, tetapi kita bicara secara obyektif pandangan Islam tentang perempuan," katanya didampingi Sekretaris Panitia Muktamar XXX NU Arifin Djunaedi.

5 Dikatakan, seminar itu untuk mempertemukan berbagai pandangan tentang perempuan yang ada di kalangan NU. (ely)

ICMI Setuju Putri Terbaik Jadi Presiden

Bandung, Kompas

Pada dasarnya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) tidak menutup peluang bagi perempuan untuk tampil menjadi presiden RI ke-4, sepanjang figur tersebut sudah teruji sebagai putri terbaik bangsa Indonesia. Namun pejabat Ketua Umum ICMI Achmad Tirtosudiro menyayangkan bahwa Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)—sebagai calon presiden yang diunggulkan berdasarkan raihan suara Pemilu 1999—belum pernah teruji tampil di muka umum memaparkan visi, misi, programnya.

Achmad mengemukakan itu kepada pers di Hotel Grand Aquila Bandung, Sabtu (10/7), di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Rakor dua hari itu kemungkinan besar juga membahas agenda kepemimpinan nasional pasca Sidang Umum MPR 1999.

"Soal calon presiden, pada dasarnya ICMI selalu sependapat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di kalangan MUI, ada tiga pendapat. Pertama, setuju jika perempuan menjadi presiden. Kedua, tidak setuju. Dan ketiga, setuju tetapi dengan sejumlah syarat," katanya.

Ketika ditanya syarat yang dimaksud, Achmad mengatakan,

1. "Putri terbaik bangsa ini. Dalam arti, memiliki komitmen moral, serta kemampuan kepemimpinannya tidak diragukan."

2. "Apakah figur yang memenuhi syarat demikian sudah ditemukan?" tanya wartawan.

3. "Itu bukan pertanyaan yang perlu dijawab sekarang. Sebab, yang Anda tanyakan tadi, baru syarat-syaratnya," jawab Achmad diplomatis.

4. Namun ketika didesak mengenai pendapatnya tentang figur Megawati yang saat ini memiliki pengikut terbanyak dibanding calon-calon lainnya, lagi-lagi Achmad dengan nada diplomatik mengatakan, soal itu terserah kepada MPR dalam sidang umum.

5. Yang pasti, kata Achmad, Megawati belum bisa dinilai ke-

tampil di muka umum. "Bagaimana kami bisa menilai jika Megawatinya masih diam," tandasnya.

Fraksi Islam

Menggarisbawahi sambutannya saat acara pembukaan Rakornas ICMI, Achmad mengatakan, ICMI akan mempraktikkan kemungkinan terbentuknya Fraksi Islam di MPR. Namun, ia menampik jika dikatakan bahwa fraksi tersebut bermaksud menjegal calon presiden tertentu. Apalagi, sebagai organisasi nonpartai, ICMI tidak berhak ikut mencalonkan presiden.

Ditegaskan, fraksi tersebut hanya sebatas mengkoordinasi dan menyatukan visi dan misi para partai-partai yang bernapaskan Islam. "Dulu, pernah ada gagasan agar partai-partai Islam jangan terlalu banyak. Katakanlah, di luar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), cuma ada tambahan satu atau dua. Tetapi, ternyata perkembangan partai pada era selanjutnya makin sulit dibendung," ujar Achmad.

Oleh karena itu, lanjut dia, Fraksi Islam di MPR diharapkan bisa menjadi jembatan penyatuan visi dan misi para partai yang bernapaskan Islam. Soal gagasan fraksi Islam ini sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum PPP Hamzah Haz. (nar)

Gerah Melihat Kondisi Politik

5

Kiai se-Jawa dan Bali Menolak Chaos

Rembang, Rakyat Merdeka

Merasa gerah dengan celoteh politik belakangan ini, para ulama NU dari Jawa, Bali, dan IBT (Indonesia Bagian Timur) berkumpul di Ponpes Roudhotul Tholibin, Letch Rembang, Jawa Tengah. Menurut *salibul bait* pertemuan itu, KH Cholil Bisri, pertemuan itu diselenggarakan semata-mata karena para ulama tidak mau melihat ada gegeran.

"Para ulama ini gerah melihat kondisi politik saat ini. Banyak terjadi khilafiah (perbedaan, *red*) yang terjadi, dan itu sangat mengkhawatirkan kita semua. Makanya, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi gegeran, para ulama mengambil inisiatif untuk berkumpul dan membahas nasib bangsa ini ke depan," jelas Mbah Cholil, panggilan akrabnya di Rembang, Jumat (25/6) lalu.

Direncanakan, ulama yang akan hadir, seperti KH Amin Makruf (Jakarta), KH Muslim Iman Puro (Bali Lim), KH Hasyim Muzadi (Surabaya), KH Dimiyati Rois (Kendal), KH Abdurahman Chudlori (Magelang). Bahkan pimpinan NU, seperti KH Ilyas Ruchiyat maupun KH Said Aqil Siradj. Sedang KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) berhalangan hadir. "Alasan beliau, kesehatan," jelas Mbah Cholil ringkas.

Masih menurut rois dewan syuro DPP PKB ini, para kiai yang akan hadir tidak hanya yang selama ini dikenal mendukung PKB saja. Tetapi banyak kiai netral yang akan hadir di sana. Selain tujuan pertemuan untuk kepentingan dan masa depan bangsa, hasil pemikiran para kiai itu juga akan disumbangkan kepada semua parpol maupun masyarakat secara umum. "Yang jelas, tidak ada pesan sponsor dalam pertemuan para kiai ini, karena kiai memang milik semua golongan," tegasnya berkali-kali.

Secara runtut dijelaskan pula oleh Mbah Cholil, bahwa para kiai itu ingin mencari kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa



KH Said Aqil Siradj

dan bernegara. Bentuknya dengan mencari legitimasi atas berbagai silang pendapat yang muncul, khususnya menyangkut calon presiden dari perspektif gender. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atas perbedaan pendapat dan pemahaman yang diambilkan dari hukum Islam (*syar'ie*).

Bagi Kiai Cholil dan banyak ulama, perbedaan pandang menyangkut boleh tidaknya perempuan menjadi presiden, diyakini akan menjadi sumbu persoalan yang bisa memancing suasana chaos (gegeran). Sehingga para ulama nantinya berusaha untuk mencegah terjadinya silang pendapat yang menjurus kepada perpecahan kekuatan bangsa.

"Dalam Mufas NU sendiri kan sudah ditegaskan, tidak masalah presiden itu laki-laki atau perempuan. Masing-masing ada dasar hukumnya. Yang semacam itu kan khilafiah atau perbedaan. Agar perbedaan itu tidak menimbulkan keributan, sehingga kita

perlu legitimasi atas berbagai pendapat yang muncul itu. Hal semacam itu tidak perlu dipersoalkan."

Dalam keputusan Mufas, tugas masing-masing laki-laki dan perempuan juga sudah dijelaskan. Antara lain, perempuan bertugas meneruskan generasi, merawat anak, rumah tangga, dan sebagainya. Sedang laki-laki bertugas membuat rumah, mencari uang untuk hidup, dan sebagainya. "Kalau dalam masalah pencalonan menjadi pemimpin, termasuk presiden tentunya, itu masih khilaf dan masing-masing ada dasar hukumnya yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Di Pakistan yang negara Islam saja, Benazir Bhutto bisa jadi presiden. Juga di Bangladesh, dan sebagainya," ungkap kakak kandung KH Mustofa Bisri.

Selain membahas masalah perbedaan pandang menyangkut capres dalam perspektif gender, target pertemuan itu juga untuk menyerap para kiai dari parpol agar berkiprah dan menjaga

integrasi bangsa Indonesia. Sedang yang ketiga, bila ada bahan masukan bagi musyawarah pimpinan (Muspim) PKB menjelang sidang umum (SU) MPR mendatang.

Kalau menyangkut masalah gender, apakah pertemuan itu juga bermaksud mencari legalisasi pencalonan Megawati sebagai presiden? Atas pertanyaan itu Mbah Cholil sempat terperanjat. Selain menolak anggapan itu, dia minta agar bisa dipisahkan antara dua materi yang dianggapnya berbeda itu.

Prinsipnya, selama pertemuan tidak akan disebutkan alasan pencalonan Megawati, karena memang tidak diperuntukkan untuk mendukung ketua umum DPP PDI Perjuangan itu.

Melainkan sebagai upaya mendudukkan masalah pada tempatnya sesuai hukum Islam yang berlaku. "Sekali lagi jangan disentuh kepada masalah itu. Kalau membahas bagaimana presiden wanita, memang ya. Tetapi perspektifnya hukumiyah (hukum), dan tidak perlu menyebut nama Megawati," tandas Mbah Cholil.

Apa mungkin akhirnya para kiai yang berkumpul akan memutuskan hukum, bahwa perempuan tidak boleh jadi presiden. Dan, kalau seandainya keputusannya tidak membolehkan, berarti para kiai siap berbenturan dengan Gus Dur? "Sekali lagi, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Masing-masing itu ada dasar hukumnya. Jadi tidak usah dikejar ke mana-mana," tegas dia sekali lagi.

Sedang masalah hubungannya dengan Gus Dur, Kiai Cholil menyatakan, "Gus Dur syaiun, para kiai juga syaiun. Masing-masing punya otoritas, tidak ada ketergantungan. Apalagi yang diputuskan, semuanya tidak atas pesanan, tapi atas kemashlahatan bersama seluruh bangsa." (JPNN)

9/9 h.6

Wanita PDI Perjuangan:

Kelompok "Status Quo" Ganjal Peran Wanita

Yogyakarta, Kompas

Peran dan kepemimpinan wanita telah terbukti sangat besar dan terjadi di mana-mana dalam sejarah dunia. Namun dalam konteks masyarakat Indonesia, dengan segala dayanya, elite politik dan masyarakat pro-status quo ternyata telah menggarjal kehadiran kaum perempuan di gelanggang pemilihan presiden dengan isu gender, kualitas ilmu, kapasitas, kapabilitas, dan isu-isu agama.

2. "Alangkah kita hebat, arus, menggarjal Megawati Soekarnoputri untuk duduk di kursi presiden? Jawabnya tidak! Kita harus berjuang sekuat tenaga untuk memuluskan jalan Megawati Soekarnoputri menjadi presiden RI ke-4. Karena sesuai dengan perjuangan para wanita terdahulu, tidak ada alasan bagi wanita untuk tidak tampil me-

ntingin, kalau terbukti dia mampu memimpin. Dan tidak ada alasan bagi masyarakat pro-status quo untuk menggarjal Megawati Soekarnoputri untuk menjadi presiden kalau ternyata beliau dikehendaki rakyat," kata Sri Adhiti Soetarto Soerjogento di depan sedikinya 700 wanita PDI Perjuangan, di Yogyakarta, Minggu (1/7).

3. Sedikinya 700 wanita PDI Perjuangan dari DI Yogyakarta (DIY), Jeng, Jabar, Jatim, Jakarta, Kalimantan, Bali, Sumatera, kemarin, membacakan iktar dukungan moral kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Gedung Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan Yogyakarta. Ini merupakan protes terhadap pandangan politik yang bias gender dengan gaya Yogyakarta-nya, menyusul aksi

pengumpulan tanda tangan tanpa darah di beberapa titik Kota Yogyakarta.

4. Kegiatan berajuk Silaturahmi dan Bakti Sosial Ibu-Ibu Wanita Utama se-Indonesia ini diprakarsai pengurus DPD PDI Perjuangan DIY, dan dihadiri peserta dari Semarang, Ternang, Kebumen, Gombong, Solo, Magelang, Klaten, Bali, Lampung, Pontianak, dengan acara pidato pembekalan oleh pembina mereka, Dra Sri Adhiti.

5. Ratusan ibu-ibu dan remaja putri itu kemarin secara bersama-sama merencanakan iktar dukungan kepada Megawati Soekarnoputri. Satu langkah satu buntut, bersatulah kaum wanita Indonesia. Dukungan pemimpin wanita berjaya kebangsaan tingginya untuk menyuarakan Indonesia Baru. Siapa mendukung Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai

Presiden Republik Indonesia yang keempat, untuk mewujudkan Indonesia Baru yang adil bagi seluruh bangsa ini.

6. Peranan wanita di berbagai bidang, kata Adhiti, sebenarnya tidak lepas dari sejarah peranan wanita selama ini. Namun, sekarang peranan wanita itu justru ditentang dengan menggunakan isu gender, kualitas, kapasitas, kualitas ilmu yang dimiliki, atau dianggap tidak menguasai agama yang dianutnya dan masih banyak lagi yang menyebabkan para wanita ketakutan untuk ikut berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mewujudkan masyarakat madani.

7. Sedangkan Ketua Departemen Wanita Pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Kebumen, Yulih Kolopaking, menegaskan, berbagai ulant

yang dihubungkan menyatakan bahwa kedudukan wanita dan pria sama, karenanya wanita itu berhak memimpin. Di Indonesia, hal itu semakin penting karena kenyataannya, 60 persen penduduk Indonesia adalah wanita.

8. Sejak tanggal 9-14 Juli lalu, Solidaritas Aksi Rakyat Anti Status Quo (SARAS) Yogyakarta menggarjal aksi pengumpulan tanda tangan untuk mendukung Megawati sebagai presiden. Aksi yang dimulai di Jalan Wirobrajar itu dilanjutkan di depan Gedung Agung Yogyakarta. Menawal rencana, tanda tangan dukungan itu akan dilampung pada 11 spanduk besar masing-masing sepanjang 100 meter dan akan digelar di Jalan Mahabero bersamaan dengan pelaksanaan STU MPR mendiang (hrt)

PP Aisyiyah:

Islam tidak Pernah Hambat Perempuan

Jakarta, Kompas

1. Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah menegaskan, Islam tidak pernah menghambat seorang perempuan untuk menduduki jabatan apa pun jika perempuan itu memang memiliki kapabilitas dan kredibilitas, serta berakhlak.

2. Pernyataan sikap PP Aisyiyah itu diantandatanganinya Ketua Hj Elyda Djaznun dan Sekretaris I Hj Siti Hadroh Ahmad dan ditertima Kompas, Senin (12/7).

Pernyataan sikap itu didasarkan pada hasil sidang pleno mereka pada 2-3 Juli 1999.

3. Meski demikian, PP Aisyiyah berharap, masyarakat tidak memberikan dukungan secara buta atau asal mendukung pada perempuan tanpa mengerti kapabilitas dan kredibilitasnya.

4. Mengajukan asal perempuan juristur dapat merestruksikan perempuan itu sendiri. 5. Secara organisatoris, PP Ai-

syiyah menyatakan, tidak mendukung siapa pun calon-calon presiden yang ada. Sebaliknya, tidak juga akan menjeleg siapa pun yang dicalonkan.

6. PP Aisyiyah menyerahkan sepenuhnya persoalan pemilihan presiden kepada MPR, yang adalah wakil rakyat. Siapa pun presiden ke-4 Aisyiyah akan mendukung secara jernih dan kritis.

7. Soal maraknya kasus porno-grafi atau penayangan gambar artis yang dimuat di media massa serta maraknya tabloid yang sangat mengeksplotasi seksual, PP Aisyiyah menuntut pemerintah lewat Menteri Pencerangan untuk dapat menindak tegas masalah ini.

8. Dinyatakan pula, perlu definisi jelas keberadaan pros sesuai dengan kode etik pers, norma dan nilai budaya, serta etika jurnalis Indonesia. (dnn)

PPP Juga Menolak Capres Perempuan



Hamzah Haz

Jakarta, Rakyat Merdeka

Rapat Pimpinan Nasional (Rapinas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Jakarta, kemarin, menghasilkan pernyataan politik kontroversial, yakni menolak perempuan menjadi presiden.

Partai ber lambang Ka'bah tersebut berpendapat, yang layak menjadi presiden hanyalah seorang putra terbaik bangsa dan harus beragama Islam.

"Pemimpin nasional hanyalah seorang putra terbaik bangsa yang beragama Islam, sekali lagi kami tegaskan putra," tandas Ketua DPP PPP Tosari Widjaya didampingi Ketua Umum PPP Hamzah Haz dalam konferensi pers pernyataan politik Rapinas II PPP.

Rapinas yang berlangsung selama dua hari sejak 14-15 Juni di Jakarta itu juga mengingatkan seluruh komponen bangsa supaya tidak menafikan aspirasi umat Islam Indonesia sebagai kekuatan mayoritas bangsa, khususnya dalam menentukan kepemimpinan nasional dan pemerintahan negara yang memegang prinsip syariah dan asidat.

Bagi PPP tidak menafikan aspirasi umat Islam adalah syarat mutlak yang harus diperhatikan demi memelihara integritas bangsa, persatuan dan kesatuan negara RI untuk membentengi pemerintahan baru pasca

Pemilu 1999.

PPP sendiri belum mau menyebutkan nama calon presiden (capres) yang akan didukungnya pada pemilihan presiden mendatang. Namun pada prinsipnya, lanjut Tosari, PPP akan memilih presiden dari kalangan kadernya sendiri, dan tentu saja seorang putra bukan putri.

Sayangnya baik Tosari maupun Hamzah enggan menyebutkan siapa sesungguhnya capres yang akan dijagokan pada pemilihan presiden mendatang. "Tunggu saja saatnya pada pemilihan presiden nanti, PPP pasti akan mengumumkannya, namun yang jelas bukan Habibie," papar Hamzah Haz.

Pada kesempatan kemarin Hamzah juga menyatakan pihaknya hingga kini belum memutuskan untuk berkoalisi dengan partai manapun. Meski dia mengaku sudah ada pembicaraan tentang koalisi dengan PAN, PKB dan partai-partai Islam lainnya.

"Koalisi atau tidak, tergantung dari mekanisme pemilihan presiden pada SU MPR mendatang. Kalau *one man one vote* kemungkinan kami tak akan melakukan koalisi dengan partai manapun. Sebaliknya, jika pemilihan presiden melalui fraksi-fraksi di MPR, tentu kami akan berkoalisi dengan partai-partai yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama," paparnya.

"Apakah ada kemungkinan untuk berkoalisi dengan Golkar?"

"Sekali lagi saya katakan itu semua tergantung pada mekanisme pemilihan presiden. Terus terang saja, kami belum pernah sekalipun mempertimbangkan berkoalisi dengan Golkar," jawabnya.

Dalam pernyataan politiknya PPP juga menyoroti tentang pelaksanaan Pemilu 1999. PPP berpendapat Pemilu secara umum berlangsung lancar, meskipun belum sepenuhnya diselenggarakan secara bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kesimpulan tersebut didapatkan dari laporan berbagai pihak terutama tim pemantau Pemilu independen dan laporan saksi-saksi dari PPP sendiri. PPP berkesimpulan secara menyeluruh diberbagai propinsi ditemukan adanya paksaan, ancaman dan intimidasi terhadap pemilih untuk memilih partai tertentu.

"Berdasarkan hal itu perlu dilakukan klarifikasi terhadap pelanggaran dan penyimpangan yang menodai keabsahan Pemilu. Kami memandang perlu dilakukan Pemilu ulang pada kasus penyimpangan secara lokal," tandas hamzah. (YUG)

Kelompok Cipayung Tolak "Gender" sebagai Isu Politik

Denpasar, Kompas

Kelompok Cipayung-Bali, yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), secara tegas menolak perbedaan "gender" dijadikan isu politik. Persoalan gender tidak relevan dan tidak substansial ketika dikaitkan dengan hak mencalonkan diri menjadi presiden, sebab negara memberikan perlakuan yang sama kepada warganya, baik pria ataupun wanita.

Hal tersebut terungkap dalam Pernyataan Sikap Bersama Kelompok Cipayung-Bali, terdiri dari enam butir, yang ditandatangani ketua masing-masing organisasi, Senin (28/6), di Den-

pasar.

Kelompok Cipayung juga menegaskan akan mendukung siapa pun yang terpilih menjadi presiden, asal melalui mekanisme demokratis. Selain itu, Kelompok Cipayung juga meminta agar pemilihan presiden memakai mekanisme *one man one vote* secara terbuka. Sedangkan ABRI (TNI dan Polri) didesak untuk bersikap netral dan abstain dalam proses pemilihan presiden.

"Kami juga minta agar dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 untuk menghindari terulangnya kesalahan masa lalu. Terakhir, kamiimbau para elite politik agar jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa meresahkan masyarakat," ujar Asep Kurniawan, Ketua Umum PMII-Denpasar.

(jun)

Habibie tentang Wanita

Tak pada Tempatnya, Berpandangan "Bias Gender"

Jakarta, Kompas

Presiden BJ Habibie menegaskan, sekarang sudah bukan pada tempatnya lagi memandang wanita dengan *bias gender*. Dalam arti, menganggap bahwa tempat wanita hanya di rumah, atau hanya sekadar pendamping suami.

"Pandangan yang denikian bertentangan dengan kodrat penciptaan manusia. Yang membedakan manusia bukanlah jenis kelaminnya, melainkan lingkak ketakwaannya dan kemampuan pribadinya untuk berbuat bagi masyarakat dan bangsa," kata Presiden BJ Ha-

bibie dalam pembukaan Raker-nas Pembangunan Peranan Wanita tahun 1999, di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/6).

Menurut Presiden, telah banyak lapangan kehidupan dan pengabdian yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi wanita untuk mengembangkan diri. Misalnya, bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Ditegaskan, wanita memerlukan pembinaan dan pengembangan diri secara terus-menerus dalam segala hal, sehingga dapat berperan yang sebesar-besarnya dalam kehidupan berbangsa dan bernega-

ra.

Karena itu, Habibie menekankan, agar sasaran utama pembangunan peranan wanita diarahkan pada peningkatan kedudukan, kemampuan, dan kualitas, kemandirian, dan ketahanan mental spiritual, sesuai dengan fungsi dan peranan wanita yang multidimensional.

Penegasan itu disampaikan, karena dalam pandangan Habibie, wanita merupakan faktor penting, di samping pria, terutama dalam usaha mencapai keberhasilan pembangunan nasional. "Jika kaum wanita tertinggal atau ketinggalan, maka

dapat dipastikan bahwa bangsa Indonesia akan terlambat, bahkan tidak akan dapat mencapai cita-citanya," kata Habibie.

Untuk itu, lanjut Presiden, wanita harus mampu meningkatkan kualitas dan memberdayakan diri, keluarga, dan masyarakatnya. Selain itu, wanita juga dituntut, memiliki keterampilan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peka terhadap perkembangan dan dinamika masyarakat, termasuk kreatif dalam memberi sumbangan bagi pemecahan suatu masalah bangsa. (rie)

Capres Perempuan

5/9 h 10

Gairahkan

Masyarakat Madani

Isu gender yang berkembang (atau sengaja dikembangkan?) untuk kampanye telah diskriminasi hak-hak politik perempuan dengan label 'laki-laki', meniadakan perempuan yang tak lebih penting untuk dicermati. Selain masalah pemerintahan presiden berikutnya — Megawati sudah dicoba tiga kali — isu gender, selain sebagai pendobolan yang bersifat kultural dan agama. Perkenalkan ini menarik, karena di sisi lain wanita dan perempuan mendapat perhatian hak sipil dan perpolitikan dan legislatif.



cocok menjadi pemimpin kelimbang pria. Dari segi sosialisasi, wanita tidak mementingkan kepentingan pribadi, anti kekerasan dan lebih peka.
 (Dari sisi sosiologi-politik, kata Nur Syahbani lagi, penciptaan masyarakat sipil (Madani) akan lebih kuat dengan perempuan. "Bila peninggiannya mementingkan kepentingan umum, maka gerakan civil society akan diberdayakan. Dibandingkan Habibia, civil society dimatikan, karena proses pembodohan masyarakat sering dilakukannya," papar Nur Syahbani serius sambil menambatkan pemimpin perempuan mampu mengarahkan lahirnya masyarakat Madani.

Melina Sarumpaet menekankan pula, isu gender untuk menghambat Megawati sangat keterlaluan. "Tapi saya yakin, Mega tidak akan goyah hanya karena isu gender," tandasnya.

"Dari segi budaya, budaya di Indonesia juga mendukung kepemimpinan wanita. Jadi tidak ada masalah dalam budaya kita."

Gunadjah Kartasasmita yakin budaya Indonesia menerima kepemimpinan wanita. Menurutnya, tradisi usang yang menolak perempuan tampil menjadi pemimpin sudah banyak berubah menjelang Milenium Ketiga ini. Dari segi agama, tidak ada penolakan. Jadi menurut saya hambatan terbesar adalah dari politik. Yang penting menurut saya bukan keberaniannya, tetapi apakah pemimpin itu mendapat legitimasi dari rakyat melalui Sidang Umum MPR nanti," tegas Gunadjah. (TSS) //

MPR. (R) "Aktivis perempuan yang juga sutra drama teater. Rina Sarumpaet, isu gender sengaja dilampiarkan atau direkayasa untuk menyalahkan Megawati. "Para elite politik sengaja mencari titik lemah saya. Mereka menggunakan eun-eun tidak jujur. Ini malah meunjukkan ketidakmampuan basis militansi," katanya. "Selain itu, aktivis perempuan lainnya Gunadjah Kartasasmita berpendapat, isu gender yang digunakan untuk menguji Mega sangat tidak proporsional. "Selain itu, saya melihat calon presiden ini perempuan wanita, tapi harus diuji Victor Mbonyang. Orientasi Pemberitaan Media dan RSI/PUJ, mastasi mereka karena tidak me-

papar Gunadjah yang juga ketua senior Golkar. "Menurutnya, perolehan suara PDI Perjuangan di pemilu Megawati Soekarnoputri dalam Pemilu 7 Juni lalu sangat tinggi, yaitu 15 persen. "Dengan menambahkan dukungan kepada Mega berarti rakyat tidak memisahkan gender," tandas Gunadjah. "Aktivis perempuan tak punya Nur Syahbani. Katja Susongkara menandatangani isu gender dengan mengatasnamakan budaya dan agama merupakan perpolitikan elit politik. "Mereka hanya reses senior 2006." katanya.

"Dalam Pemilu," tegasnya. "Nur Syahbani menambahkan. Dari sudut budaya dan secara historis sebenarnya tidak pernah ada penolakan bagi pemimpin wanita. "Zaman dulu di bumi nusantara ini juga ada wanita yang menjadi raja," ujarnya. "Senada dengan Gunadjah, Nur Syahbani juga berpendapat, perjuangan Mega dengan menggunakan isu gender hanyalah permainan politik. "Padahal masyarakat kita masyarakat yang tulus dan jujur. Kemenangan PDI Perjuangan bukti otentik bahwa rakyat menyetujui pemimpin 2006." katanya. "Ditambahkannya, wanita lebih

Amien Rais tentang Pemilihan Presiden

Gender tak Harus Dipersoalkan

Jakarta, Kompas

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Dr Amien Rais mengatakan, dalam pemilihan presiden gender tidak harus dipersoalkan, tetapi lebih ditekankan pada kualitas, mengingat kontroversi soal gender tidak akan pernah tuntas. Pemilihan presiden sebaiknya dilakukan dengan pemungutan suara berjenjang sesuai tingkat penyiangan yang diinginkan.

"Sekarang ini kontroversinya tidak jelas. Antara pemimpin negara boleh wanita atau sebaliknya. Kontroversi ini tidak akan pernah tuntas," kata Amien Rais, pada acara yang diselenggarakan Center for Youth, Future and International Studies (CYFIS) di Jakarta, Selasa (6/7). Selain Amien Rais, tampil pengamat politik UGM Dr Afan Gaffar, pakar hukum tata negara UI Prof Dr Harun Al Rasyid, Ketua FPP DPR Faisal Basir SH, dan dipandu mantan Dirjen Pajak Dr Fuad Bawazier.

Amien menyarankan agar kalangan perguruan tinggi dan media massa melanjutkan "debat capres" sebagai salah satu cara membentuk wacana umum yang lebih obyektif tentang kualitas para capres yang berkembang di masyarakat, sampai SU MPR dimulai.

Soal pemilihan berjenjang, "Bisa saja dilakukan pemilihan pertama untuk menyaring capres yang memperoleh dukungan terbanyak. Tetapi kalau ada calon yang memperoleh dukungan separuh lebih satu suara, otomatis menjadi presiden."

Hal senada juga dilontarkan Afan Gaffar yang menyatakan dengan sistem multipartai yang

ada sangat memungkinkan terjadinya *run off election*, atau pemilihan ulangan untuk dua capres yang memperoleh suara terbanyak. "Pemilihan ulangan dilakukan karena di antara para calon tersebut tidak ada yang menang *simple majority*. Kalau tidak dilakukan *run off election*, maka akan terjadi distorsi yang sangat tinggi," kata Afan Gaffar.

Amien juga mengusulkan, para capres diminta mempresentasikan program sekoligus dialog di depan Sidang Umum MPR selama sekitar satu jam dan dilanjutkan dialog. "Saya ingin presiden nanti harus memiliki kemampuan dan obyektivitas, jadi untuk itu perlu dilakukan tes capres di depan MPR," katanya.

Pemilihan langsung

Berkaitan dengan pemilihan presiden secara langsung, Afan mengatakan, mekanisme tersebut merupakan sesuatu yang sangat ideal.

"Karena hasilnya akan diketahui dengan mudah yang tidak lama dengan derajat demokrasi yang jauh lebih tinggi ketimbang mekanisme dalam UUD 45," katanya.

Meski pemilihan langsung cukup ideal, Afan mengakui mekanisme tersebut tidak mudah diwujudkan karena sejumlah masalah teknis yang harus diselesaikan, seperti pilihan menggunakan mekanisme *popular votes* secara langsung.

"Tetapi masalahnya dalam mekanisme ini dipilih sistem 'simple majority' atau yang menjadi presiden adalah yang mendapat separuh lebih satu suara, atau sistem pluralitas yang me-

mungkinkan siapa pun memperoleh suara terbanyak tanpa harus mencapai separuh sudah dapat menjadi presiden," katanya.

Jika dengan menggunakan *electoral college* yang meniru model Amerika Serikat, menurut dia, timbul pula problem tentang perlunya menyepakati penggunaan sistem distrik, dan walaupun sistem distrik disepakati muncul pula kerumitan dalam menentukan perwakilan tiap distrik akibat keragaman jumlah penduduk tiap wilayah.

Dengan pertimbangan itu, Afan menyarankan, pengkajian lebih mendalam terhadap kemungkinan pemilihan presiden langsung agar siap diterapkan pada pemilu lima tahun mendatang. "Dengan demikian UUD '45 harus diamandemen," kata anggota KPU ini.

Pada perspektif lain, Harun Al Rasyid menyarankan, agar tidak tergesa-gesa mengadopsi pemilihan presiden secara langsung mengingat faktor kesiapan pendidikan masyarakat serta dana pelaksanaan yang besar. "Sebaiknya pemilihan presiden tidak langsung melalui MPR dipertahankan dulu pada pemilu mendatang, sementara itu dilakukan penyiapan pendidikan politik masyarakat dan pembangunan perekonomian negara yang lebih baik," katanya.

Secara implisit Amien Rais menyatakan, terbuka peluang untuk melakukan pemilihan presiden secara langsung. "Tetapi kita harus sadar, siapa pun yang terpilih sebagai presiden adalah cerminan masyarakat bangsa tersebut," katanya.

(Ant/mba)

Ulama NU Dukung Presiden Wanita

Baturaden, Kompas

Berbagai pernyataan dan pendapat sejumlah ulama NU serta kalangan pembicara pada Seminar *Fiqhunnisa* Pra Mukhtamar Nahdlatul Ulama dengan tema "Tafsir Wacana Gender Dalam Kontektualisasi Islam Klasik", yang berlangsung di kawasan wisata Baturaden, Banyumas, Jateng, Jumat (16/7), semakin menguatkan dukungan kepemimpinan wanita di Republik ini, yang belakangan menjadi kontroversi.

Meskipun ditekankan bahwa seminar ini tidak membahas persoalan politik, termasuk soal pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden, namun nuansa politik yang muncul tidak terhindarkan. Dukungan terhadap kepemimpinan Megawati antara lain tercermin dari pernyataan Ketua Umum PB NU KH Abdurrahman Wahid. Meskipun Gus Dur, yang tampil sebagai *key note speaker* mengatakan kedatangannya ke Baturaden tidak ada urusannya dengan masalah politik, akan tetapi nuansa politik dalam setiap pernyataannya

yang dikemukakan pada seminar sangat kental.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Matori Abdul Djilil yang dimintai tanggapannya mengenai kepemimpinan wanita menegaskan, sikap PKB sudah jelas seperti apa yang disampaikan Gus Dur. "Tidak ada masalah atau problem prinsipil yang menghalangi pencalonan dan dukungan terhadap Megawati," tegas Matori.

Selain Ketua PB NU, tampil sebagai pembicara pada seminar yang berlangsung 16-17 Juli 1999, antara lain Dra Hj Sinta Nurriyah Wahid, KH Masduqi Machfudz, Drs Mohammad Sobary MA, Dra Hj Khofifah Indar Parawansa, Dr Megawangi, Dr Hj Musda Mulia MA, KH Husain Muhammad dan Drs H Masdar F Mas'udi MA. Hadir dalam seminar yang dibuka Rais Aam PB NU KH Ilyas Rukhiyat, antara lain, Sekjen PB NU Ahmad Bagja, Muspida Banyumas dan sekitar 200 ulama NU dari berbagai daerah.

(Bersambung ke hlm 11 kol 1-3)

Ulama

Semua sepakat

Menegaskan kembali mengenai kepemimpinan wanita yang pada seminar ini menjadi isu yang sangat dominan, menurut Gus Dur, dari ulama yang paling kuno, yakni Rais Aam sampai ulama yang paling modern, yaitu Katib Aam, semua telah sepakat membolehkan wanita menjadi presiden.

"Terlepas dari Mbak Mega atau bukan yang nantinya terpilih menjadi Presiden RI, karena pembicaraan masalah ini dilihat dari sudut hukum," kata Gus Dur.

Konsep kepemimpinan sekarang ini, lanjut Gus Dur, merupakan kepemimpinan kolektif, di mana setiap pengambilan keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. "Lain dengan dulu, yang hanya dipegang oleh seorang. Jadi, saya tidak melihat adanya bahaya apa pun kalau pemimpin itu wanita. Dalam praktiknya, di NU sudah lama wanita mendapat kesempatan menjadi pengambil keputusan. Dalam rapat-rapat Syuriah NU misalnya, banyak istri-istri kiai yang ikut memberi masukan," jelas Gus Dur.

Dalam hukum Islam, tegasnya,

(Sumbangan dari halaman 1)

sebenarnya tidak ada masalah. "Jadi apabila saya sekarang ini mendukung Mega menjadi presiden, itu bukan karena soal politik-politikan, akan tetapi karena alasan *fiqh*. Dan hukum Islam memang membolehkan pemimpin wanita," tegasnya.

Meski demikian, lanjut Gus Dur, "Saya tidak bisa menjamin Mega menjadi presiden. Sebab tidak semua kalangan ulama NU setuju, dan memang tidak mungkin setuju semuanya karena NU bukanlah lembaga pemerintah yang harus satu suara. Berbeda pendapat 'kan membawa rahmat," ujarnya.

Sementara itu Rais Aam PB NU KH Ilyas Rukhiyat mengatakan, hasil seminar ini, bukanlah merupakan fatwa akan tetapi akan merupakan kesepakatan, karena seminar ini memang bukan untuk membuat fatwa. Namun karena NU merupakan organisasi ulama, tentu saja apa yang diputuskan dan dihasilkan dalam seminar ini harus menjadi panutan para *nahdliyin*. Ditambahkan, hasil seminar ini nantinya akan disampaikan sebagai masukan kepada PB NU.

Dukungan terhadap kepe-

mimpinan wanita juga dikemukakan Ny Sinta Nurriyah Wahid yang tampil sebagai pembicara pertama dalam seminar ini. Dikatakan, Pasal 27 UUD 1945 antara lain menyebutkan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Dalam pandangan Islam, wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria.

"Islam tidak mengenal diskriminasi rasial maupun gender. Jadi masalah kepemimpinan wanita sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan lagi walaupun dalam kenyataannya masih mengalami ketimpangan gender," ujar Sinta Nurriyah, yang juga istri Gus Dur. (nts)

Mereka Menolak Presiden Wanita 8

Jakarta, Rakyat Merdeka

1 Upaya partai-partai Islam menolak pencalonan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi presiden mendatang, kian mengkrystal. Bertempat di Masjid Agung Al Azhar Jakarta, kemarin, partai-partai tersebut secara bersama-sama menggelar tablig akbar. Intinya, mereka menolak pencalonan Mega sebagai presiden. Alasannya, Islam tidak membolehkan seorang wanita menjadi kepala negara atau presiden.

2 Acara tersebut, terlaksana atas prakarsa KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam). Tampak hadir beberapa pucuk pimpinan partai-partai yang berasaskan Islam. Antara lain, Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz, Ketua Umum DPP PBB Prof Dr Yusuf Isha Mahendra, Ketua Umum DPP PNU KH Syukron Makmun, serta Dewan Syariah Padai Keadilan (PK) Dr Daud Rasyid MA.

3 Selain tokoh-tokoh dari partai politik, acara tablig akbar ini juga dihadiri oleh beberapa pengurus KISDI yang kebetulan ada di PBB, seperti Ketua Pelaksana KISDI Ahmad Soemargo, dan KH Kholil Ridwan, Ketua Umum KISDI yang juga pimpinan Perguruan Assafiyah KH Abdul Rosyid Abdillah Syafi'ie juga hadir dalam acara tersebut.

4 Sementara itu, capres dari PK H Didin Hafiduddin yang senestinya dijadwalkan hadir dan memberikan orasi, kemarin tidak bisa datang. Secara mendadak, yang bersangkutan jatuh sakit. Sehingga, posisinya digantikan oleh Daud Rasyid.

5 Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan masjid Al Azhar itu, formatnya seperti demonstrasi. Secara bergantian, para pucuk pimpinan partai Islam ini memberikan orasi di atas mimbar yang

(Sambungan ke halaman 8 kolom 4)

Benazir Minta Mega Diizinkan Jadi Presiden 17

Pakistan, Rakyat Merdeka

1 Bekas PM Pakistan Benazir Bhutto mengikuti secara cermat perkembangan politik di Indonesia saat ini, khususnya setelah Pemilu 7 Juni lalu. Dan, menurut Benazir, masyarakat internasional sudah saatnya menekan "barisan-kuno" di Indonesia agar menghargai kehendak rakyat yang menginginkan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden.

2 Ketua oposisi Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang kini kesandung tuduhan korupsi di dalam negeri sendiri itu mengakui, kemenangan PDI Perjuangan pimpinan Megawati dalam pemilu tersebut memang belum memberinya kans aman ke kursi presiden. Sebab, Mega selalu saja dihantam dengan berbagai isu. Misalnya, pandangan kolot soal nilai-nilai Islam dan isu gender (jenis kelamin). Juga, pandangan menolak presiden wanita yang sebenarnya sudah merupakan ketakutan atas demokrasi itu sendiri. "Sehingga, saat ini barisan kuno itulah yang masih mengklaim sebagai pemenang," tulis Benazir sebagai kolumnis tamu di *Far Eastern Economic Review (FEER)* terbitan hari ini, seperti dicitirama *Rakyat Merdeka* kemarin.

3 Menyadari fenomena tersebut, Benazir menyarankan agar masyarakat internasional melihat dan mendukung Mega sebagaimana yang mereka lakukan ketika mendukung dirinya. Tujuannya, menciptakan peluang yang mengizinkan Mega memimpin Indonesia.

4 Menurut Benazir, sukses yang diraihinya menuju kepemimpinan Pakistan merupakan hasil dukungan aktif, berkesinambungan dan kuat dari masyarakat internasional terhadap demokrasi di negara itu. Karena itu, sudah seharusnya kini masyarakat internasional bersikap serupa terhadap Mega dalam kasus demokrasi di Indonesia.

5 "Dunia harus menunjukkan tekad yang sama mendukung kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini," tandas putri mendiang PM Zulfikar Ali Bhutto, yang tewas digantung itu. (SOL/PNN)

Mereka

biasanya digunakan untuk khotbah Jumat. Yang pertama kali memberikan orasi adalah "bos" PBB Yusuf Isha Hamendra. Kemudian, secara berurutan-turut disusul oleh Ahmad Soemargo, Hamzah Haz, Daud Rasyid, Abdul Rasyid Syafi'ie, Kholil Ridwan, serta diakhiri oleh Syukron Makmun.

2 Yang menarik, dalam tablig akbar tersebut, Syukron Makmun menyempatkan diri membawa kitab kuning "Fiqih Syiyasah" karangan ulama Timur Tengah. Tak ubahnya mengajar para santri, Syukron membaca kitab kuning itu. "Saya tidak ingin asal ngomong seperti yang dilakukan para ulama akhir-akhir ini. Karenanya, saat ini saya membawa kitab ini," ujarnya.

3 Kitab ini, lanjut Syukron, hanya merupakan salah satu saja dari beberapa kitab kuning yang membahas soal presiden wanita. Yang lain, jumlahnya masih banyak. Yang perlu kita garisbawahi di sini, dari sekian banyak kitab ini, tidak ada satu pun yang membolehkan seorang wanita menjadi presiden.

4 Di dalam kitab-kitab lain mem-

hadiri acara tersebut. Mereka memadati ruang utama dan halaman masjid. Meski hujan lebat berkali-kali mengiringi tablig akbar ini, hadirin yang berada di luar masjid, tidak beranjak dari tempatnya. Dengan antusias, mereka mendengarkan orasi para pucuk pimpinan partai ini.

5 Takut Hancur
6 Seperti halnya Syukron, materi orasi para pemimpin partai Islam itu juga sama. Mereka tidak ingin Indonesia dipimpin oleh seorang wanita. Karena bila hal itu terjadi, mereka takut akan terjadi kehancuran di bumi pertiwi ini.

7 Karena itu, Hamzah Haz mengharapkan agar partai-partai Islam bisa bersatu menggolkan seorang presiden yang memenuhi persyaratan hukum Islam. Ulama PPP sendiri, menurut Hamzah, telah memutuskan bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi presiden. Karenanya, sebagai partai Islam yang suaranya cukup signifikan, PPP akan berupaya menggalang kekuatan untuk membanding munculnya presiden wanita.

8 Dijelaskan Hamzah, bila partai-partai Islam bersatu, kursi yang

(Sambungan dari halaman 1)

bakal dikumpulkannya cukup besar. Bahkan, kalau suara partai Islam itu ditambah dengan kursi yang dimiliki PKB dan PAN, maka jumlahnya akan melebihi kursi milik PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

9 Menurut perkiraan Hamzah, dalam Pemilu ini, PDI Perjuangan paling memperoleh kursi sebanyak 151 buah dan Golkar sebanyak 125. Sementara, bila partai Islam bersatu dan kemudian ditambah PAN dan PKB, maka kursi yang terkumpul menjadi 178 kursi.

10 "Jumlah ini jelas cukup besar. Dan sangat mudah untuk mengalahkan capres yang saat ini dimunculkan PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Karena itulah beberapa waktu lalu, saya melakukan lobi dengan Gus Dur dan Pak Amien. Doakan saja agar upaya saya ini berhasil," tandas Hamzah.

11 Hamzah menegaskan, tidak tepat bila ada yang mengatakan bahwa dengan keunggulan suara yang dimiliki PDI Perjuangan, maka secara otomatis partai itu berhak untuk memimpin negeri ini. (NAN)

Muncul Lagi Tokoh yang ③ Membela Mega Forbi: Mega Yang Berhak

Jakarta, Rakyat Merdeka

Satu lagi pembelaan dialamatkan kepada Megawati. Yang mengalamkannya kali ini adalah pakar hukum Islam Prof Dr Muhammad Amin Suma, dan Forum Rekonsiliasi Bangsa Indonesia (Forbi).

2 Prof Muhammad Amin Suma —yang Dekan Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta itu —menegaskan, hingga kini tidak ada *nash* atau teks rujukan di dalam Al Qur'an dan Hadist yang secara jelas menyebutkan bahwa jenis kelamin wanita tidak boleh menjadi presiden. Dalam memilih seorang pemimpin, ajaran agama lebih mempersoalkan masalah kemampuan, bukan gendernya.

3 Hal ini diungkapkan Prof Muhammad Amin Suma di Jakarta, kemarin, saat mengungkapkan rencana seminar nasional tentang *Hukum Pidana Islam: Deskripsi, Analisa Perbandingan dan Kritik*, pada tanggal 22-24 Juni mendatang.

4 Sedangkan Forum Rekonsiliasi Bangsa Indonesia (Forbi) yang dipimpin RM Mustadjab Latip, kepada para wartawan di Jakarta, kemarin, menyatakan sikapnya bahwa secara agama, huda, dan bahkan politik Megawati berhak menjadi presiden.

5 "Mega berhak jadi presiden, tapi dia terus dihalangi. Sekarang ini cara menghalanginya dengan mempolitisir agama, pakai ayat. Kalau begitu terus, nggak *fair* namanya," kata Mustadjab Latip yang juga Ketua Lembaga Studi Strategi Budaya Nusantara.

6 Menjelaskan forum yang dipimpinnya, Mustadjab Latip mengemukakan, Forbi dalam waktu dekat akan memfasilitasi dialog antar kelompok kontra dan pro *status quo*. "Kami menempatkan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid, *red*) sebagai anggota majelis kehormatan," katanya. Bahkan lanjutnya, Forbi sudah mengadakan pendekatan dengan Gus Dur untuk merealisasikan sejumlah program untuk mengaplikasikan gagasan rekonsiliasi nasional.

7 Ditambahkan, dengan memfasilitasi dialog antar kelompok kontra dan pro *status quo* Forbi tidak bermaksud ingin bersikap antagonis. "Forbi hanya ingin rakyat tidak terpengaruh imbas konflik politik di tingkat elit. Padahal rakyat juga masih bertanya-tanya benarkah reformasi membawa hasil," paparnya.

8 Melanjutkan pernyataannya pakar hukum Islam Prof Dr Muhammad Amin Suma mengingatkan kembali mengenai hak Megawati untuk menjadi presiden. Dia mengatakan, karena tidak adanya *nash* yang pasti untuk menentukan hukum apakah seorang wanita boleh menjadi presiden atau tidak, maka muncul berbagai anggapan. (AN) (L)

PDI = Percaya Diri Indonesia



Megawati

Yogyakarta, Rakyat Merdeka
1 Pepatah buah jatuh tak jauh dari pohon, mungkin cocok untuk dipakai sebagai penggambaran bakat yang diwarisi putri sulung Bung Karno, Megawati Sukarnoputri. Selain sebagai proklamator, Bung Karno juga dikenal gemar berfilsafat.

2 Buktinya saat hadir sebagai pembicara dalam seminar *Kepemimpinan Wanita pada Milenium Ketiga* yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu (4/9) lalu. Ketua Umum PDI Perjuangan itu mengemukakan sebuah filsafat tentang

kodrat perempuan dan laki-laki.

3 "Hubungan pria dan wanita diandaikan sebagai hubungan rebusian dan matahari bagi kehidupan bumi. Dengan perumpamaan ini, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa matahari dan rebusian, berada dalam posisi saling membutuhkan dan wajib untuk saling bekerjasama dalam membuahkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan bumi."

4 Seminar dalam rangka *Dasar Menuhis* itu memang jadi agak hifi dari biasa. Biasanya, banyak peserta yang menanyakan sikap Mega mengenai isu gender dan persamaan hak politik perempuan dan pria, termasuk masalah pencalonannya sebagai presiden.

5 "Dengan berpegang kepada falsafah di atas, kita sebagai wanita harus percaya diri, bahwa kehidupan ini membutuhkan kita. Kehidupan ini membutuhkan sentuhan dan jamanah kita. Kehidupan ini membutuhkan kerja nyata kita. Kehidupan ini membutuhkan otehpikir dan jiwa kita. Tanpa semua itu, apalagi jadinya kehidupan ini. Makanya, saya ajarkan ke ada wanita atau istilah program perempuan untuk percaya diri," papar Mega yang disambut riuh tepak tangan para hadirin.

6 Salah satu tentang *filosofi* rebusian dan matahari, Mega berfilsafat bahwa, setelah rebusian, semuanya sudah harmonis. Sementara itu, katanya, saling menaikan dan menurapi, yang terjadi adalah gerhana. "Makanya, cukuplah berbangga terlahir sebagai wanita, karena itulah artinya pria tanpa wanita di muka bumi ini. Begitu pula sebaliknya," tandas Megawati.

7 Kalau ada Mega sikap percaya diri sangat penting untuk mewa jutkan etosnya "PDI" alias Percaya Diri Indonesia. "Seorang pria yang percaya diri, tidak akan pernah merasa khawatir bila bersaing dan bersaing dengan seorang wanita. Sebaliknya, seorang wanita yang percaya diri tidak pernah gentar untuk bersaing dan menyalangi lawan pria, tentunya dalam konteks yang sehat," kata Mega agak diplomatis.

8 Dalam seminar itu Mega juga mengemukakan penilaian sementara kalangan yang menyebut dirinya tidak pantas menjadi presiden karena alasan gender. "Itu kan melecehkan kedudukan wanita secara umum, dan membuktikan keangrogansi ke-lelaki," ujarnya.

9 Lalu dengan santai dan tenang Mega menyindir bahwa data yang beredar itu hanya sekedar bujukan pria di negeri ini. "Kalau yang datang ke sini perempuan yang jumlahnya 9000,"

Kowani Berharap Pada Megawati

Jakarta, Rakyat Merdeka

1 Banyak kalangan kini merasa perlu mengunjungi Megawati. Soalnya, maklum saja Mega adalah calon terkuat presiden keempat RI.

2. Kemarin, di kantor DPP PDI Perjuangan, Megawati kedatangan tamu. Kali ini tamunya adalah Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Organisasi ini meminta kepada Megawati agar memperjuangkan calon legislatif (caleg) perempuan untuk menjadi anggota DPR.

3. "Kami sangat risau, caleg perempuan itu sedikit, hanya 1,3 persen dibanding caleg laki-laki. Kalau sedikit bagaimana bisa memperjuangkan nasib dan kepentingan perempuan," kata Ketua Umum Kowani Inne Sukaryo kepada *Rakyat Merdeka* sesuai bertemu Megawati di kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung

Jakarta, kemarin.

4 Untuk itu, lanjut Inne, pihaknya berharap Megawati selaku pimpinan partai pemenang Pemilu memperhatikan keinginan Kowani tersebut.

5 "Selain memperjuangkan caleg perempuan, kami juga minta agar anggota MPR Utusan Daerah dari PDI Perjuangan mengikutsertakan perempuan, minimal satu orang setiap propinsi," papar Inne lagi.

6 Ditanya bagaimana tanggapan Megawati, Inne mengatakan, pada prinsipnya Mega sependapat dengan keinginan Kowani.

7 "Beliau bilang akan memperhatikan harapan kami. Megawati juga menginginkan supaya perempuan ikut berperan dalam dunia politik," tuturnya.

8 Ditanya apakah dalam pertemuan itu Kowani juga menyatakan dukungan kepada Megawati

untuk menjadi presiden, secara diplomatis Inne mengemukakan, pihaknya bukan partisipan dan parpol. Kowani hanya organisasi massa yang memperjuangkan kepentingan perempuan.

9 Apakah dalam pertemuan juga dipertanyakan kepada Mega mengapa kaum perempuan kurang minat berpolitik, Inne mengakui kiprah perempuan di bidang politik secara umum memang masih dipertanyakan.

10 "Beliau bilang, ada pemikiran bahwa seolah-olah politik itu kasar. Sehingga itu salah satu kendala mengapa perempuan kurang berminat berpolitik. Jadi Mega mempertanyakan itu kepada rakyat Indonesia termasuk perempuan, kok sempat begitu," katanya mengutip Mega. Kowani juga menganggap pertemuan dengan Megawati kemarin, merupakan hal penting. (JGM) (L)

Gus Dur: Perempuan Bisa Wajib Jadi Presiden

Purwokerto, Rakyat Merdeka

1 Kalau selama ini para ulama banyak terlibat dalam silang pendapat mengenai presiden perempuan, Ketua Umum PBNU KH Abdulrahman Wahid (Gus Dur) justru bisa "memwajibkan" perempuan menjadi presiden.

2 "Ini terlepas dari Mbak Mega. Kalau ada pendapat yang mengatakan, negara tidak boleh dipimpin perempuan, itu salah. Semuanya boleh memimpin, orang *wanda* (*bencong*) saja boleh *kok*," tegas Gus Dur di Purwokerto, kemarin.

3 Cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari itu menyatakan hal tersebut ketika membuka seminar nasional "Gender Pra-Muktamar NU" di Batorejo Purwokerto. Di sini hadir Rais Aam Syuriah KH Ilyas Ruchiyah, Khatib Am PBNU KH Said Agil Siradj, KH Hasyim Muzadi, KH Imron Hamzah serta Ketua Umum DPP PKB

Matori Abdul Djamil.

4 "Saya sendiri datang ke sini tidak untuk urusan politik. Tapi untuk seminar. Karena saya memang bukan politisi, saya orang awam saja. Yang politisi itu Pak Matori. Jadi, pernyataan saya ini tidak ada kaitan politiknya. Sama sekali terlepas dari Mbak Mega," tegasnya sekali lagi.

5 Masih menurut Gus Dur, kelebihan perempuan menjadi pemimpin itu didasarkan atas dua alasan. Yakni, alasan sejarah dan hukum. Dalam kesejarahan, sudah banyak pemimpin perempuan, khususnya di Indonesia. Sedang alasan hukum, itu tergantung kepada prinsip-prinsip yang digunakan dan harus dibenarkan dengan cerdas.

6 Gus Dur lalu menyebut prinsip hukum yang ada dalam kaidah *ushul fiqh*, seperti "Meng-

(Berlanjut ke halaman 149)

Gus Dur

(Sambungan dari halaman 1)

hindarkan kesulitan lebih ditanggalkan daripada membawa kesulitan" dan "Hukum itu berputar pada sebabnya, baik ada maupun tidak adanya hukum itu sendiri".

7 "Angka demisiani, lanjutnya, bahwa sekarang ini Indonesia tidak dipimpin perempuan lalu terdapat kesulitan, maka pemimpin perempuan itu baik." (JGM)

8. dan khusus untuk Megawati.

9 Dengan alasan sejarah dan prinsip hukum tersebut, lalu banyak alasan NU membahayakan presiden perempuan. Dia juga minta masyarakat untuk tidak takut dipimpin perempuan. Karena kerja pemerintah akan diawasi kabinet yang mayoritas laki-laki dan juga oleh masyarakat yang laki-laki dan juga perempuan.

10 Sebelumnya, pada kesempatan memberikan wejangan kepada warga NU di Lapangan Rempoah Baturaden — sesaat setelah rombongan Gus Dur mendarat dengan pesawat helikopter — dia juga mengakui kemenangan PDI Perjuangan. Kemenangan itu juga dianggap sebagai hal lumrah, karena "perjuangan" PDI Mega kan cukup panjang. (JGM)

Megawati Masih Diam

Jakarta, Kompas

Meski Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) telah mensahkan penghitungan suara hasil pemilihan umum (pemilu), Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum mau memberikan keterangan pers. Pada rapat kerja nasional (rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Wiyata, Depok, Minggu (18/7) malam, Megawati tetap diam. Dari arena rakernas pun, tidak diperoleh keterangan resmi dari para pengurus DPP PDI Perjuangan.

"Kami memang tidak mengirimi undangan kepada wartawan. Rapat ini memang tidak untuk diliput pers sampai selesai," ujar Alex Litaay, Sekjen PDI Perjuangan, kepada wartawan yang mencoba meminta keterangan.

Ketua DPP PDI Perjuangan Soetardjo Soerjogoeirino hanya mengatakan, rakernas merupakan syukuran PDI Perjuangan dan peneguhan kembali hasil Kongres PDI di Den-

pasar, Bali. "Di Bali 'kan diputuskan, Ketua Umum DPP PDI sekaligus dicalonkan untuk menjadi Presiden. Itu akan kami tegaskan kembali di sini," ujarnya sebefore rakernas dimulai.

Soetardjo menambahkan, PDI Perjuangan akan meminta laporan dari DPD di seluruh Indonesia mengenai pelaksanaan pemilu di daerah masing-masing. "Apa alasan mereka menerima hasil pemilu, kami juga mau tahu 'kan. Juga kendala yang dihadapi di daerah masing-masing," ujarnya.

Sesepuh PDI Perjuangan, Sabam Sirait, menegaskan, Mega berhak menegaskan kembali hasil Kongres Bali. "Sebagai Ketua Umum, dia berhak menegaskan kembali hasil di Bali. Ini penting agar tidak ada simpang siur dalam hal pencalonan presiden," ujarnya.

Sumber Kompas mengatakan, DPP PDI Perjuangan akan berusaha merebut sebanyak-

banyaknya utusan daerah yang dipilih DPRD I. "Kami akan mencoba maksimal lewat tata tertib DPRD I untuk bisa meraih itu," ujarnya.

"Jalan koalisi makin terbuka, tambah sumber itu, jika melihat dukungan terhadap Megawati untuk menjadi Presiden. "Seperti PKB (Partai Kebangkitan Bangsa—Red) 'kan sudah jelas. Peluang ke arah koalisi, saya kira harus diperhitungkan," ujarnya.

Wartawan tak diundang

Ketua DPP PDI Perjuangan Mangara Siahaan membenarkan jika rakernas sengaja tidak mengundang wartawan. "Mbak Mega masih belum mau berkomentar. Mbak Mega masih menunggu persahan penghitungan suara oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum—Red)," tambahnya.

Sekitar pukul 19.15, Megawati tiba di Hotel Wiyata, dan langsung masuk ke dalam lift. Menyangka Mega pergi ke ka-

mar, wartawan menunggu di depan lift. Tetapi, beberapa menit kemudian Mega sudah berada di ruang rapat yang terletak di bagian belakang hotel. "Mbak Mega lewat jalan belakang," ujar seorang satgas PDI Perjuangan.

Kepada wartawan foto dan kameraman TV yang belum sempat mengambil gambar Mega, satgas PDI Perjuangan berjanji akan memberi waktu hingga lagu kebangsaan *Indonesia Raya* diperdengarkan. Tetapi, sampai acara pembukaan usai, tidak satu pun juru foto dan juru kamera yang diizinkan masuk.

Presiden perempuan

Di Yogyakarta, Ketua Umum PKB Matori Abdul Djali dan Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Syafii Maarif sama-sama berpendapat bahwa tidak ada masalah jika kepemimpinan nasional dipegang seorang

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-4)

Megawati — —

perempuan. Bahkan Menteri Agama Malik Fadjar mengungkapkan, tata tertib dan Undang-Undang Dasar sama sekali tidak mempersoalkan gender.

Pernyataan itu muncul secara terpisah dalam Sarasehan Kebudayaan XI Tamansiswa di Yogyakarta, Sabtu dan Minggu.

Prof Dr Syafii Maarif yang ditemui wartawan hari Minggu dalam acara yang sama menyatakan, "Kami tidak permasalahan gender. Yang kita masalahkan adalah kualitas, kapabilitas, dan visi ke depan. Tidak ada masalah kepemimpinan wanita dipersoalkan," tegasnya.

Syafii Maarif mengisyaratkan, biar MPR yang memperdebatkan sengit tentang masalah calon presiden, asal tidak merusak bangsa. "Asal tidak menjurus ke perbuatan destruktif, sengitnya perebutan presiden itu, biar saja, yang penting dipikirkan adalah bagaimana menyelamatkan bangsa di masa

(Sambungan dari halaman 1)

depan," katanya.

Sementara Ketua Umum PKB Matori Abdul Djali menandatangani, sebagai partai pemenang, Megawati berhak tampil sebagai presiden mendatang. "Oleh karena itu, kita mengharapkan Golkar untuk mencabut dukungannya terhadap Habibie dan tampil sebagai oposisi yang kritis," kata Matori menjawab wartawan, selepas menjadi pembicara dalam sarasehan itu, Sabtu.

Aneh bila Habibie

Matori menyatakan, jika dalam Pemilu PDI Perjuangan yang menang, kemudian yang tampil menjadi presiden adalah Habibie, Indonesia tentu akan ditertawakan dunia internasional, karena sistem demokrasinya terkesan lucu. Sebagaimana diungkapkan Gus Dur juga, kat: Matori, PKB menerima Megawati sebagai Presiden keempat. "PKB tidak lagi memandang pria atau wanita," tegasnya.

Dengan menyebut yang memimpin adalah partai yang menang, Matori menandatangani, untuk pemilu kali ini biarlah partai-partai proreformasi yang memimpin.

Sedang Menteri Agama A Malik Fadjar menyatakan, dalam tata tertib atau undang-undang dasar sama sekali tidak permasalahan gender. "Kenapa kita mau digiring ke permasalahan agama?" katanya.

"Kenapa kita terjebak kepada masalah-masalah seperti itu. Kita harus kembali kepada pijakan yang benar. Negeri ini sudah 54 tahun merdeka, kita harus percaya diri dan percaya pada aturan main yang kita tegakkan. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita siap mengakui perbedaan, mengakui kelebihan dan kekurangan terhadap yang lain," katanya.

Kompromi

Sementara Ketua ICMI Achmad Tirtosudiro ditanya menyangkut calon presiden mendatang menyatakan, masalah siapa calon presiden terbaik dan

siapa yang nantinya muncul menjadi presiden adalah dua masalah yang berbeda. "ICMI sendiri melihat Habibie yang terbaik," tegasnya.

Jika Habibie kalah dalam pemilihan presiden nanti, kata Achmad, pihaknya akan menghormati siapa yang menang dan akan memberikan dukungan sepenuhnya.

Oleh karena itu, Achmad mengharapkan, untuk memperoleh presiden yang berkualitas, di MPR nantinya ada semacam dialog atau debat terbuka untuk masing-masing calon untuk mengemukakan program. "Kalau Megawati calon juga harus ikut dalam acara debat itu," tegasnya.

Ketika didesak wartawan apakah Achmad meragukan kemampuan Megawati, dengan tegas menyatakan, "Saya tidak mau menilai. Yang pasti saya ada julukan baru untuk Mega, ibarat Sphinx yang terdapat di Mesir, tidak pernah terdengar suaranya, sehingga kita tidak tahu isinya apa," tegasnya.

(mba/t p)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Themotia Titi Widaningsih
 Tempat/Tgl.Lahir : Klaten 24 Januari 1963
 Agama : Khatolik
 Status : Menikah
 Alamat : Bukit Cengkeh I, Jl. Jambi Blok A VIII/2
 Cimanggis 16951 (telp.8716329)

Menenrangkan riwayat pendidikan

1. Lulus SD Kanisius di Klaten tahun 1974
2. Lulus SMP Pangudi Luhur di Klaten tahun 1977
3. Lulus SMA Pangudi Luhur di Solo tahun 1981
4. Lulus Sarjana Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 1986.

Pengalaman kerja :

1. Tahun 1987 s/d 19981 mengajar di AISI/STIM Jakarta
2. Tahun 1988 Mengajar di STIA YAPPAN Jakarta
3. Tahun 1990 Pudir I dan mengajar di LPK St. Ursula Jakaarta
4. Tahun 1992 s/d sekarang mengajar di Universitas Sahid Jakarta

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Jakarta, Agustus 2000

Themotia Titi Widaningsih